



**LAPORAN PEREKONOMIAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOVEMBER 2019

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
Provinsi Kalimantan Timur**

Publikasi ini dapat diakses secara *online* pada:
www.bi.go.id/web/id/publikasi

Salinan publikasi dalam bentuk hardcopy dapat diperoleh di:
Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Gajah Mada No. 1
Samarinda 75122, Kalimantan Timur
Telp: 0542 – 741 022, 741 023
Fax: 0542 – 732 644

KATA PENGANTAR

Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini berisi tentang informasi terkini mengenai kondisi ekonomi makro daerah, keuangan pemerintah, inflasi, stabilitas sistem keuangan daerah, sistem pembayaran, ketenagakerjaan dan kesejahteraan serta prospek perekonomian kedepan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi *stakeholders* di wilayah Kaltim dalam melakukan perumusan kebijakan ekonomi dan keuangan daerah.

Perekonomian Kaltim triwulan III 2019 tumbuh sebesar 6,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019 sebesar 5,43% (yoy). Pertumbuhan perekonomian Kaltim pada triwulan III 2019 didorong oleh meningkatnya kinerja ekspor luar negeri yang bersumber dari akselerasi kinerja lapangan usaha pertambangan di tengah melambatnya beberapa lapangan usaha utama lainnya seperti Industri Pengolahan dan Konstruksi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kaltim juga turut disokong oleh meningkatnya kinerja investasi serta belanja pemerintah ditengah konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan.

Analisa pada laporan ini menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari kegiatan survei dan *liaison* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga menggunakan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari pihak eksternal, baik dari kalangan Pemerintah maupun swasta. Atas seluruh bantuan tersebut, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, hubungan kemitraan yang terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami juga senantiasa mengharapkan kritikan, masukan, dan saran dalam rangka peningkatan kualitas laporan ini sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dalam upaya mengembangkan ekonomi regional khususnya dan pengembangan ekonomi nasional pada umumnya.

Samarinda, November 2019
**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ttd.

Tutuk S.H. Cahyono
Kepala Perwakilan

VISI BANK INDONESIA

Menjadi bank sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan terbaik diantara negara-negara *emerging markets*.

MISI BANK INDONESIA

- a. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
- b. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
- d. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
- e. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
- f. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
- g. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi Bank Indonesia.

NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
VISI BANK INDONESIA	3
MISI BANK INDONESIA	3
NILAI-NILAI STRATEGIS BANK INDONESIA.....	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GRAFIK	7
DAFTAR GAMBAR	9
TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI.....	11
RINGKASAN EKSEKUTIF	14
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	4
1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran	20
BOKS I.1 Pemandangan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.....	37
BOKS I.2 Roadmap Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur.....	42
BOKS I.3 Kebijakan Ekonomi Hijau Tiongkok	46
II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.....	49
2.1 Gambaran Umum	49
2.2 APBD Pemerintah Provinsi.....	50
2.3 APBD Kabupaten/Kota.....	53
2.4 APBN di Wilayah Kalimantan Timur	56
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	58
3.1 Gambaran Umum	58
3.1.1 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pembentuk	58
3.1.2 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota Pembentuk.....	61
3.1.3 Tracking Inflasi Triwulan IV 2019	62
3.2 Program Pengendalian Inflasi Daerah	65
IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM ..	70
4.1 Gambaran Umum	70

4.2	Stabilitas Keuangan Daerah	70
4.2.1	Asesmen Sektor Korporasi	70
4.2.2	Asesmen Sektor Rumah Tangga	75
4.2.3	Asesmen Sektor Perbankan.....	78
4.3	Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	84
V.	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH.....	86
5.1	Gambaran Umum	86
5.2	Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia	86
5.3	Pengelolaan Uang Rupiah	88
5.4	Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan	90
	BOKS V.1 Upaya Elektronifikasi Kalimantan Timur	96
VI.	KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN	99
6.1	Gambaran Umum.....	99
6.2	Ketenagakerjaan.....	99
6.3	Kesejahteraan	101
VII.	PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	104
7.1	Prospek Pertumbuhan Ekonomi.....	104
7.2	Prospek Inflasi	107
	DAFTAR ISTILAH.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)	5
Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)	20
Tabel I.3 Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim	25
Tabel I.4 Perkembangan Ekspor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan	26
Tabel I.5 Komoditas Impor Utama Kaltim	28
Tabel I.6 Negara Asal Impor Utama Kaltim	28
Tabel I.7 Pengalaman Beberapa Negara yang Merelokasi Ibu Kota	38
Tabel II.1 Perkembangan Keuangan Daerah Kaltim Triwulan III 2018 dan 2019	49
Tabel II.2 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta).....	50
Tabel II.3 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)	52
Tabel II.4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta).....	54
Tabel II.5 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta).....	55
Tabel II.6 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)	56
Tabel II.7 Transfer Dana Desa Kaltim Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Rp Juta)	57
Tabel III.1 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)	60
Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan III 2019 (yoy)	61
Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk Menurut Kelompok Barang (yoy)	62
Tabel III.4 Harga Komoditas Pangan Kaltim	63
Tabel III.5 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019	68
Tabel V.1 Kecamatan Lokasi BI Jangkau	90
Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim.....	99
Tabel VI.2 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kaltim	100
Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim	101
Tabel VI.4 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur	102
Tabel VII.1 <i>Outlook</i> Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kaltim	106
Tabel VII.2 <i>Outlook</i> Harga Komoditas Ekspor Utama Kaltim	106

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim & Nasional.....	2
Grafik I.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Berdasarkan Provinsi.....	2
Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tanpa Tambang.....	4
Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertambangan.....	6
Grafik I.5 Produksi Batubara IUP Kaltim.....	6
Grafik I.6 Volume Ekspor Batubara Kaltim.....	7
Grafik I.7 Rasio DMO Batubara Kaltim.....	7
Grafik I.8 <i>Lifting</i> Minyak Kaltim.....	8
Grafik I.9 <i>Lifting</i> Gas Kaltim.....	8
Grafik I.10 Kredit dan NPL Pertambangan Kaltim.....	8
Grafik I.11 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Industri Pengolahan.....	10
Grafik I.12 Indeks Produksi LNG Kaltim.....	10
Grafik I.13 Volume Ekspor CPO Kaltim.....	10
Grafik I.14 Harga CPO Internasional & Kaltim.....	10
Grafik I.15 Pangsa Ekspor CPO Kaltim.....	11
Grafik I.16 Pertumbuhan Ekspor CPO ke Negara Tujuan Utama.....	11
Grafik I.17 Volume Ekspor Bahan Kimia Organik Kaltim.....	12
Grafik I.18 Kredit dan NPL Industri Pengolahan Kaltim.....	12
Grafik I.19 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Pertanian.....	14
Grafik I.20 Indeks El Nino dan La Nina.....	14
Grafik I.21 Harga TBS Kaltim.....	14
Grafik I.22 Kredit dan NPL Pertanian Kaltim.....	15
Grafik I.23 Kredit dan NPL Perikanan Kaltim.....	15
Grafik I.24 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konstruksi.....	16
Grafik I.25 Penjualan Semen Kaltim.....	16
Grafik I.26 Kredit dan NPL Konstruksi Kaltim.....	17
Grafik I.27 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Penyedia Akomodasi dan Makan Minum.....	18
Grafik I.28 TPK dan Rata – Rata Hari Inap Kaltim.....	18
Grafik I.29 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Perdagangan Besar dan Eceran.....	18
Grafik I.30 Indeks Keyakinan Konsumen.....	18
Grafik I.31 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Transportasi dan Pergudangan.....	19
Grafik I.32 Neraca Perdagangan Kaltim.....	21
Grafik I.33 Neraca Perdagangan Migas Kaltim.....	22
Grafik I.34 Neraca Perdagangan Nonmigas Kaltim.....	22
Grafik I.35 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor Luar Negeri.....	23
Grafik I.36 Likert Skale – Penjualan Ekspor Kaltim.....	23
Grafik I.37 Perkembangan Volume Ekspor Batubara Kaltim ke Tiongkok dan ASEAN.....	24
Grafik I.38 Perkembangan Volume Ekspor CPO Kaltim ke Tiongkok dan India.....	25
Grafik I.39 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor Luar Negeri.....	27
Grafik I.40 Perkembangan Impor Migas Kaltim.....	27
Grafik I.41 Perkembangan Impor Nonmigas Kaltim.....	27

Grafik I.42 Impor Barang Modal dan Bahan Baku Kaltim.....	27
Grafik I.43 Perkembangan Investasi Kaltim.....	29
Grafik I.44 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim	30
Grafik I.45 Penanaman Modal Asing Kaltim Berdasarkan Sektor Ekonomi	30
Grafik 0.46 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim	31
Grafik 0.47 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim Berdasarkan Sektor Ekonomi.....	31
Grafik 1.48 Kredit dan NPL Investasi Kaltim	31
Grafik I.49 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Rumah Tangga	32
Grafik I.50 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	32
Grafik I.51 Optimisme Konsumen Rumah Tangga Kaltim	33
Grafik I.52 Kredit Konsumsi Kaltim	34
Grafik I.53 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Pemerintah	35
Grafik I.54 Simulasi Dampak Proyek Jembatan Pulau Balang	41
Grafik I.55 Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kalimantan Timur.....	42
Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019	51
Grafik II.2 Komponen Realisasi PAD APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019	51
Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim	51
Grafik II.4 Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019	53
Grafik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019.....	55
Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional	58
Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan	58
Grafik IV.1 PDRB Kaltim dan PDB Tiongkok.....	71
Grafik IV.2 PDRB Kaltim dan Indeks Harga Komoditas Ekspor Kaltim	71
Grafik IV.3 <i>Asset Turnover</i>	72
Grafik IV.4 <i>Inventory Turnover</i>	72
Grafik IV.5 <i>Return on Asset</i> dan <i>Return on Equity</i>	73
Grafik IV.6 <i>Interest Coverage Ratio</i> dan <i>Debt to Service Ratio</i>	73
Grafik IV.7 <i>Current Ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i>	74
Grafik IV.8 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim.....	74
Grafik IV.9 Komposisi DPK Korporasi Kaltim Triwulan III 2019.....	74
Grafik IV.10 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim.....	75
Grafik IV.11 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	75
Grafik IV.12 Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim	76
Grafik IV.13 Indeks Kondisi Ekonomi Kaltim.....	76
Grafik IV.14 Proporsi Belanja Rumah Tangga Kaltim Triwulan III 2019	76
Grafik IV.15 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim.....	77
Grafik IV.16 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya.....	77
Grafik IV.17 Perkembangan DPK RT Kaltim.....	78
Grafik IV.18 Komposisi DPK RT Kaltim Triwulan III 2019.....	78
Grafik IV.19 Indeks Tendensi Konsumen Kaltim.....	78
Grafik IV.20 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional.....	79

Grafik IV.21 Komposisi DPK Kaltim Triwulan III 2019	79
Grafik IV.22 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional.....	80
Grafik IV.23 Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	80
Grafik IV.24 Pangsa Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaan Triwulan III 2019	80
Grafik IV.25 Pangsa Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan III 2019	80
Grafik IV.26 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim.....	81
Grafik IV.27 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019	81
Grafik IV.28 Perkembangan Kredit dan NPL Kaltim	82
Grafik IV.29 Risiko Kredit Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan	82
Grafik IV.30 Risiko Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	82
Grafik IV.31 Risiko Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim	82
Grafik IV.32 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim	83
Grafik IV.33 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim	83
Grafik IV.34 Perkembangan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim	84
Grafik IV.35 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim.....	85
Grafik IV.36 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltim	85
Grafik IV.37 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan Triwulan III 2019	85
Grafik IV.38 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha	85
Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Non Tunai Kaltim.....	87
Grafik V.2 Transaksi Non Tunai Kaltim Triwulan III 2019 Berdasarkan Instrumennya	87
Grafik V.3 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltim	87
Grafik V.4 Perkembangan Transaksi Transportasi <i>Online</i> Kaltim	94
Grafik V.5 Pangsa Transaksi.....	95
Grafik V.6 Pangsa Transaksi Transportasi <i>Online</i> Kaltim Alat Pembayaran	95
Grafik VI.1 Perbandingan TPT Kalimantan Berdasarkan Provinsi	100
Grafik VI.2 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur	102
Grafik VI.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim.....	103
Grafik VI.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim Berdasarkan Komponen.....	103
Grafik VII.1 Ekspektasi Harga 3 & 6 Bulan Kedepan	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Regional.....	3
Gambar I.2 Timeline Pemindahan IKN	37
Gambar I.3 Estimasi Jumlah Penduduk IKN.....	38
Gambar I.4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Kalimantan Timur	43
Gambar I.5 Alur Pikir dan <i>Roadmap</i> Pembangunan Pariwisata Kaltim	44
Gambar I.6 Emisi CO ₂ Global secara Geografis pada Tahun 2017	47
Gambar I.7 Konsumsi Energi Primer Tiongkok 2000-2040.....	47
Gambar I.8 Konsumsi, Produksi, dan Proporsi Batubara dalam Energy Mix Tiongkok.....	48

TABEL INDIKATOR MAKROEKONOMI

PERTUMBUHAN EKONOMI

Komponen PDRB	2015	2016	2017	2018					2019		
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
PDRB TOTAL	-1,20	-0,38	3,13	1,77	1,92	1,83	5,14	2,67	5,46	5,43	6,89
Berdasarkan Lapangan Usaha											
Pertanian	4,55	0,46	5,81	5,83	6,39	7,11	5,74	6,27	6,22	4,39	3,16
Pertambangan	-4,89	-3,52	1,21	-1,28	-0,56	-0,49	6,84	1,11	7,72	8,30	11,46
Industri Pengolahan	2,66	5,46	3,47	1,44	0,40	0,16	0,10	0,52	-1,84	1,75	1,63
Listrik dan Gas	30,43	8,32	6,78	12,38	11,31	9,19	6,51	9,76	8,37	8,97	8,02
Air	2,56	6,57	9,05	5,68	2,96	2,30	3,83	3,67	6,06	8,11	5,49
Konstruksi	-0,94	-3,86	6,42	4,52	4,46	10,09	10,01	7,37	13,92	3,25	0,46
Perdagangan	1,42	3,20	7,90	9,88	9,90	5,13	5,06	7,44	5,30	5,86	9,27
Transportasi dan Pergudangan	2,76	3,05	7,06	9,31	9,57	4,33	2,47	6,34	1,18	1,20	3,35
Akomodasi dan Makan Minum	7,74	6,79	9,17	9,97	12,13	7,45	7,20	9,14	7,29	5,09	6,72
Informasi dan Komunikasi	7,66	7,45	8,73	7,88	4,39	4,27	3,78	5,04	6,13	8,80	6,70
Jasa Keuangan	2,05	1,84	-0,62	2,98	2,99	4,61	6,93	4,37	7,17	-3,06	-0,62
Real Estate	3,59	-0,83	3,35	6,96	6,59	3,53	2,35	4,83	1,29	0,15	4,15
Jasa Perusahaan	-3,75	-4,25	3,54	7,51	9,56	1,32	1,64	4,96	-1,12	-3,72	6,05
Adm. Pemerintahan	3,64	-3,27	-0,37	6,84	2,56	0,37	1,44	2,70	3,79	-0,02	3,22
Jasa Pendidikan	9,88	7,06	7,27	8,88	9,15	6,06	5,93	7,47	6,58	3,84	4,21
Jasa Kesehatan dan Sosial	10,53	9,31	7,16	7,97	8,87	7,90	7,48	8,05	7,07	6,49	7,34
Jasa lainnya	8,81	7,81	6,44	6,76	9,84	9,69	9,73	9,02	9,20	7,27	7,42
Berdasarkan Pengeluaran											
Konsumsi Rumah Tangga	1,46	1,56	2,47	2,34	2,77	2,71	3,42	2,81	3,82	3,35	3,10
Konsumsi LNPRT	8,30	-4,04	4,89	9,51	7,23	12,47	8,56	9,41	7,41	6,41	6,67
Konsumsi Pemerintah	-4,93	-13,03	-12,14	3,04	-1,23	17,60	11,76	8,21	16,29	-1,68	7,74
PMTB	-1,47	-6,04	2,75	5,07	16,64	2,19	6,83	7,54	7,93	-3,87	3,18
Perubahan Inventori	-35,89	-65,19	-15,85	-32,30	-27,06	-8,53	24,06	-15,13	16,45	-73,15	-67,04
Ekspor Luar Negeri	-16,07	-9,88	2,55	-6,03	-4,35	-3,01	-1,39	-3,71	1,09	8,94	15,94
Impor Luar Negeri	3,49	-12,70	2,51	19,67	2,27	8,23	8,03	9,39	-20,60	-25,61	-27,54
Net Ekspor Antar Daerah	222,87	32,54	7,51	29,76	1,33	13,83	21,04	16,15	-5,96	-9,96	-26,35

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

EKSPOR DAN IMPOR

Ekspor dan Impor	2015	2016	2017	2018					2019		
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III
	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy	%yoy
EKSPOR TOTAL	-32,31	-20,50	26,31	6,16	9,11	3,73	1,52	4,98	-9,36	-8,26	-11,80
Ekspor Migas	-40,65	-41,37	12,45	-24,79	-13,88	-29,41	-18,74	-21,81	-21,11	-53,88	-37,01
Ekspor Nonmigas	-26,21	-8,23	31,53	16,56	16,39	14,40	7,83	13,59	-6,81	2,43	-6,79
TOTAL IMPOR	-34,99	-32,59	-12,98	72,35	26,37	49,82	31,38	43,06	-39,79	-45,17	-52,43
Impor Migas	-40,16	-36,83	-8,05	76,18	13,81	46,45	19,11	35,95	-61,03	-61,82	-62,53
Impor Nonmigas	-12,06	-19,79	-24,68	62,52	62,40	60,19	68,75	63,74	19,40	-11,71	-24,02

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

INFLASI

No	Kelompok Barang	INFLASI YOY										
		2017				2018				2019		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
	U M U M / T O T A L	3,89	4,54	3,65	3,15	2,59	2,60	3,61	3,24	2,99	2,71	1,73
1	Bahan Makanan	0,61	1,38	1,10	-0,24	2,34	5,46	4,53	3,31	1,64	1,90	2,15
2	Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	4,17	2,86	3,30	3,11	2,68	3,19	2,47	2,93	3,23	2,98	2,98
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	4,01	6,09	6,11	5,51	3,97	2,08	2,81	2,64	2,22	2,04	0,78
4	Sandang	2,12	2,01	2,18	2,77	3,48	2,59	2,72	2,78	3,03	4,31	5,12
5	Kesehatan	4,85	3,81	3,34	2,74	2,43	3,49	2,94	3,24	2,21	1,45	1,65
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	2,41	2,40	2,43	2,24	2,28	2,17	3,81	3,97	4,40	4,89	4,07
7	Transportasi dan Komunikasi	8,14	9,82	4,51	4,12	0,57	-0,63	5,44	4,28	5,02	3,30	-0,62

**)Sejak tahun 2016, inflasi Kaltim tidak lagi memperhitungkan inflasi Kota Tarakan*

sumber: BPS Provinsi Kaltim, diolah

PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja Perbankan dan Sistem Pembayaran	2015	2016	2017	2018					2019			
	%yoy	%yoy	%yoy	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	
DPK dan ASET												
Dana Pihak Ketiga (KC/KCP)	-3,67	0,85	5,33	4,91	5,26	8,94	13,88	13,88	12,42	17,19	16,47	
Giro	-20,54	-0,97	8,22	2,92	0,26	12,19	17,60	17,60	-0,47	36,67	31,23	
Tabungan	2,15	2,39	6,17	10,92	10,55	12,89	10,00	10,00	7,96	8,63	7,41	
Deposito	1,05	-0,25	2,36	-1,62	1,29	2,14	17,42	17,42	26,99	18,26	20,00	
Aset	-7,18	-0,97	4,11	5,99	4,18	5,53	11,74	11,74	8,95	16,90	13,01	
KREDIT												
Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek)	-2,20	2,05	-5,44	-0,02	5,67	9,80	16,72	16,72	6,47	9,50	8,43	
<i>Non Performing Loans</i> (Lokasi Proyek)	5,46	6,54	5,89	5,61	5,14	5,49	4,61	4,61	4,71	3,74	3,81	
Berdasarkan Jenis Penggunaan												
Modal Kerja	-13,56	6,92	2,95	12,24	16,00	17,57	21,99	21,99	0,99	9,02	8,10	
Investasi	4,28	-1,60	-16,85	-11,36	-1,88	5,65	19,12	19,12	12,19	12,87	11,37	
Konsumsi	2,65	3,16	5,80	5,93	5,42	6,21	5,67	5,67	4,86	4,34	3,75	
Berdasarkan Sektor Ekonomi												
Pertanian dan Kehutanan	1,86	9,90	-0,12	-9,30	-7,99	-11,22	9,98	9,98	7,26	12,08	17,54	
Perikanan	0,49	28,37	11,60	51,20	35,25	28,23	14,97	14,97	9,11	-12,64	-19,82	
Pertambangan	-29,81	-2,58	-33,82	19,34	48,06	71,91	83,55	83,55	12,65	25,80	13,20	
Industri Pengolahan	23,05	-1,22	-14,20	-16,65	-13,87	-3,30	10,32	10,32	-14,46	0,33	-5,64	
Listrik, Gas dan Air	73,83	-8,16	-19,62	32,86	72,31	129,82	130,08	130,08	43,62	25,39	19,73	
Konstruksi	2,33	0,55	11,60	9,94	18,90	22,57	22,78	22,78	32,91	27,82	27,63	
Perdagangan Besar dan Eceran	4,63	5,02	2,93	-0,75	5,84	4,55	-0,09	-0,09	2,01	4,36	5,25	
Akomodasi dan Makan Minum	21,98	-5,59	1,11	-3,71	-0,49	-2,32	0,58	0,58	2,34	-2,16	1,13	
Transportasi, Gudang dan Komunikasi	-10,47	-3,77	-15,74	-1,10	2,41	8,13	12,54	12,54	-5,22	-9,37	3,22	
Jasa Keuangan	-28,33	-26,99	-24,47	-3,71	0,66	21,03	36,44	36,44	7,09	13,10	-14,08	
Real Estate dan Jasa Perusahaan	-19,83	1,71	-4,76	-6,41	-0,14	5,76	6,89	6,89	10,47	9,87	1,95	
Administrasi Pemerintahan	-18,47	-10,59	24,98	3,59	7,09	79,84	168,86	168,86	326,76	280,86	109,60	
Jasa Pendidikan	100,00	42,01	26,98	7,96	-1,69	-10,33	-12,22	-12,22	-2,23	10,72	50,75	
Jasa Kesehatan dan Sosial	-1,54	3,54	18,43	17,88	16,44	22,16	23,82	23,82	38,17	36,14	44,27	
Jasa Kemasyarakatan	-8,72	19,28	-26,89	-13,73	2,58	-4,21	14,26	14,26	16,65	15,20	15,69	
Jasa Perorangan	37,56	6,95	5,37	-0,89	-9,45	-14,04	-18,31	-18,31	-13,93	-5,67	0,91	
Badan Internasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lainnya	-65,52	-65,15	205,54	330,51	-16,22	-35,33	-38,01	-38,01	-54,33	-89,19	-84,25	
Rumah Tangga	2,65	3,16	5,80	5,93	5,42	6,21	5,67	5,67	4,86	4,34	3,75	
SISTEM PEMBAYARAN												
<i>Inflow</i>	8,54	14,98	0,62	-6,83	117,56	-26,22	18,62	12,31	16,93	17,64	11,31	
<i>Outflow</i>	-4,28	-6,90	8,65	-4,09	6,24	17,71	11,75	7,92	6,11	-1,85	16,61	
<i>Net</i>	-17,63	-36,93	28,74	-42,06	-40,76	-125,81	6,37	-0,67	246,65	-32,08	66,10	

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOVEMBER 2019

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Ekonomi Kaltim pada triwulan III 2019 tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan pertumbuhan tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertambangan. Perbaikan lebih lanjut tertahan oleh perlambatan kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi. Sementara di sisi pengeluaran, perbaikan kinerja perekonomian Kaltim didorong oleh kenaikan ekspor luar negeri.

Lebih lanjut pada triwulan IV 2019, perekonomian Kaltim diperkirakan akan masih tumbuh positif walau tidak setinggi pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut terutama bersumber dari kinerja lapangan usaha pertambangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan.

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan III 2019 tumbuh positif sebesar 6,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat mencapai 5,43% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional dan wilayah Kalimantan yang masing-masing tumbuh sebesar 5,02% dan 5,92%. Bahkan di wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi yang tertinggi.

Di sisi lapangan usaha, kinerja positif pertumbuhan ekonomi Kaltim ditopang oleh naiknya pertumbuhan lapangan usaha utama pertambangan. Permintaan batubara yang masih tinggi dari negara tujuan utama serta didukung oleh kondisi cuaca yang kondusif untuk melakukan aktifitas produksi pertambangan menjadi motor utama peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan. Sementara itu, kilang minyak Balikpapan yang kembali beroperasi secara normal pasca *maintenance* juga turut mendorong kinerja perekonomian Kaltim. Namun demikian, kenaikan pertumbuhan ekonomi lebih lanjut tertahan oleh perlambatan kinerja konstruksi dan industri pengolahan terutama di sektor industri pengolahan non migas.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019 ditopang oleh kinerja ekspor luar negeri seiring dengan naiknya output lapangan usaha utama. Peningkatan ekspor luar negeri Kaltim terutama bersumber dari komoditas nonmigas, khususnya batubara. Permintaan ekspor batubara ke Tiongkok tercatat masih tinggi didorong oleh aksi *frontloading* importir Tiongkok dalam rangka mengantisipasi musim dingin dan rencana kebijakan restriksi impor batubara oleh Pemerintah Tiongkok. Di samping itu, ekspor batubara ke negara kawasan ASEAN juga mengalami kenaikan didorong oleh peningkatan permintaan batubara di negara-negara tersebut guna pemenuhan kebutuhan PLTU yang beroperasi di negaranya.

Pada triwulan IV 2019, ekonomi Kaltim diperkirakan masih tumbuh positif, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perlambatan tersebut bersumber dari tertahannya kinerja pertambangan seiring dengan potensi penurunan permintaan eksternal, serta tren penurunan harga komoditas yang masih berlanjut. Di samping itu, produksi batubara juga berpotensi mengalami penurunan yang disebabkan mulai masuknya musim hujan yang membuat aktivitas pertambangan menjadi kurang kondusif.

Secara keseluruhan tahun 2019, perekonomian Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan tahun 2019 menjadi faktor pendorong utama tumbuhnya perekonomian Kaltim pada tahun 2019. Kinerja pertambangan yang membaik didorong oleh permintaan dari negara tujuan ekspor yang masih terjaga disertai dengan meningkatnya produksi pertambangan seiring dengan faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2019 juga didorong oleh perbaikan kinerja investasi di tengah konsumsi masyarakat yang masih terbatas. Secara keseluruhan, perekonomian Kaltim tahun 2019 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,87% - 5,27% (yoy).

Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur triwulan III 2019 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Peningkatan kinerja tersebut terutama bersumber dari pemerintah kabupaten/kota.

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 mengalami peningkatan. Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp24,90 triliun atau 69,93% dari target 2019. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang tercatat sebesar Rp20,53 triliun atau 63,42% dari total anggaran. Sementara itu, realisasi belanja Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp5,86 triliun atau 54,89% dari total anggaran 2019. Secara nominal, realisasi belanja pada triwulan III 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya namun secara pemenuhan target tahunan relatif lebih rendah. Realisasi yang lebih rendah tersebut bersumber dari

belanja modal yang masih rendah dikarenakan terdapat proses lelang yang mengalami keterlambatan.

Realisasi pendapatan dan belanja 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 mengalami peningkatan.

Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi pendapatan 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim mencapai Rp17,15 triliun atau 68,02% dari anggaran tahun 2019. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah kabupaten/kota Kaltim juga mengalami peningkatan pada triwulan III 2019. Realisasi belanja pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim mencapai Rp13,65 triliun atau 53,49% dari pagu tahun 2019. Capaian ini meningkat 15,42% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi belanja APBN wilayah Kaltim triwulan III 2019 telah mencapai 58,18% dari pagu belanja APBN.

Realisasi belanja APBN Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 telah mencapai Rp6,39 triliun atau sebesar 58,18% dari pagu belanja APBN. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja triwulan III 2019 mencapai Rp2,15 triliun atau 59,81% dari pagu belanja tahun 2019. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah dengan realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp73,35 miliar atau 42,47% dari pagu belanja tahun 2019. Saat ini, penyaluran dana desa di wilayah Kaltim telah mencapai tahap III. Adapun realisasi transfer dana desa dari Pemerintah pusat ke wilayah Kaltim mencapai Rp547,08 miliar atau sebesar 62,87% dari total alokasi anggaran dana desa tahun 2019.

Perkembangan Inflasi Daerah

Pergerakan inflasi Kaltim triwulan III 2019 tercatat terkendali dan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019. Meredanya tekanan inflasi Kaltim triwulan III 2019 dipengaruhi terutama oleh deflasi yang terjadi pada

Inflasi Kaltim pada periode triwulan III 2019 tercatat stabil di level yang rendah. Capaian inflasi Kaltim triwulan III 2019 tercatat 1,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 2,71% (yoy). Inflasi Kaltim triwulan III 2019 tercatat berada dibawah level inflasi Nasional dan Kalimantan yang masing-masing tercatat 3,39% dan 2,64% (yoy). Tekanan inflasi Kaltim triwulan III 2019 yang

kelompok transportasi dan komunikasi. Secara spasial, penurunan tekanan inflasi Kaltim bersumber dari kedua kota pembentuknya yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang mengalami penurunan inflasi dari triwulan sebelumnya.

Pada triwulan IV 2019, diperkirakan tekanan inflasi Kaltim akan mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan permintaan di kelompok bahan makanan maupun kelompok transportasi dan komunikasi.

lebih rendah secara tahunan dipengaruhi oleh lebih terjaganya pasokan pangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya serta tarif angkutan udara yang berangsur turun. Berdasarkan kota pembentuknya, meredanya inflasi Kaltim terjadi pada kedua kota pembentuk inflasi yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Tekanan inflasi Kaltim yang lebih rendah pada triwulan III 2019 terutama dipengaruhi oleh kelompok transportasi dan komunikasi.

Normalisasi permintaan tarif angkutan udara pasca HBKN Idul Fitri dan periode liburan tengah tahun serta penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengendalikan tarif angkutan udara menjadi penyebab utama meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi Kaltim triwulan III 2019. Lebih lanjut, penurunan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga yang disebabkan oleh telah berakhirnya periode pendaftaran tahun ajaran baru serta musim liburan sekolah.

Pada triwulan IV 2019, tekanan inflasi Kaltim diperkirakan tetap stabil dan terkendali.

Inflasi Kaltim pada triwulan IV 2019 diperkirakan berada pada rentang 2,65%-2,85% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada bulan Oktober 2019, Kaltim mengalami deflasi sebesar -0,37% (mtm), lebih dalam dibandingkan deflasi pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar -0,27% (mtm). Dengan demikian, inflasi tahun kalender Kaltim sampai dengan bulan Oktober 2019 tercatat 1,04% (ytd) atau secara tahunan mengalami inflasi 1,52% (yoy). Lebih lanjut, untuk inflasi di bulan November 2019 dan Desember 2019 diperkirakan akan mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan permintaan pada kelompok bahan makanan maupun transportasi dan komunikasi. Risiko inflasi Kaltim triwulan IV 2019 utamanya bersumber dari kelompok transportasi dan komunikasi dikarenakan adanya potensi peningkatan permintaan menjelang HBKN di akhir tahun serta mulai masuknya periode liburan dan juga didorong oleh pengalihan penumpang dari Bandara APT Pranoto Samarinda menuju Bandara Sepinggian Balikpapan. Selain itu, kenaikan juga diperkirakan bersumber dari inflasi pada kelompok bahan makanan seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas hortikultura yang disebabkan oleh terbatasnya pasokan di tengah musim tanam yang mengalami kemunduran.

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas keuangan daerah Kaltim pada triwulan III 2019 masih terjaga meskipun dibayangi perlambatan kinerja sektor korporasi dan sektor rumah tangga. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan konvensional dan UMKM juga masih tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan periode sebelumnya. Adapun dari sisi resiko, tercatat NPL Kaltim masih relatif terjaga walaupun terjadi peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan kondisi perekonomian Kaltim yang tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan III 2019, kondisi stabilitas keuangan daerah Kaltim masih terjaga. Stabilitas keuangan daerah Kaltim tercermin dari kinerja korporasi yang masih positif sejalan dengan kinerja positif pertumbuhan ekonomi Kaltim. Meskipun kondisi ekonomi global masih diikuti dengan ketidakpastian, kinerja korporasi dari lapangan usaha utama masih menunjukkan peningkatan. Lebih lanjut, kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tetap positif walau mengalami perlambatan ditengah resiko yang mengalami peningkatan. Penyaluran kredit perbankan kepada korporasi pada triwulan III 2019 tumbuh hingga mencapai 10,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 14,03% (yoy). Risiko kredit kepada korporasi juga tetap terjaga dengan tingkat *non-performing loan* (NPL) sebesar 2,50%, masih berada di bawah *threshold* 5% meskipun meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 2,31%.

Kinerja sektor rumah tangga pada triwulan III 2019 juga masih tetap positif meskipun melambat dari triwulan sebelumnya. Kondisi ini sejalan dengan normalisasi permintaan pasca berakhirnya momen HBKN maupun liburan tengah tahun yang secara langsung mendorong melambatnya aktivitas sektor rumah tangga di Kaltim. Laju pertumbuhan kredit rumah tangga triwulan II 2019 tercatat masih positif sebesar 3,75% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,34%. Perlambatan pertumbuhan kredit rumah tangga triwulan III 2019 terjadi di seluruh komponen, antara lain Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor dan kredit multiguna. Perlambatan penyaluran kredit ini juga tercermin dari menurunnya tingkat optimisme masyarakat sebagaimana terlihat dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan tahun triwulan sebelumnya.

Kinerja intermediasi perbankan di wilayah Kaltim masih menunjukkan kinerja positif pada triwulan III 2019 walau mengalami perlambatan

dengan risiko kredit yang sedikit meningkat dibandingkan periode sebelumnya- Pertumbuhan kredit Kaltim pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 8,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,50% (yoy). Perlambatan kinerja intermediasi juga terjadi pada penyaluran kredit UMKM triwulan III 2019. Pertumbuhan kredit UMKM Kaltim triwulan III 2019 tumbuh sebesar 9,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,08% (yoy). Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM mendorong penurunan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kaltim yang turun dari 21,78% di triwulan II 2019 menjadi 20,83% pada triwulan III 2019. Di sisi lain, kinerja intermediasi perbankan syariah mengalami penurunan kinerja yang tercermin dari turunnya pertumbuhan pembiayaan setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan positif. Sementara itu risiko kredit pada triwulan III 2019 relatif masih terkendali dan berada di bawah threshold 5% walaupun secara umum lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan III 2019, penyelenggaraan sistem pembayaran Kalimantan Timur mengalami peningkatan diiringi oleh peningkatan net outflow yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan transaksi non tunai terutama bersumber dari volume dan nilai transaksi BI-RTGS dan SKNBI. Pada transaksi PUR/tunai tercatat masih berada dalam posisi net outflow yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyelenggaraan sistem pembayaran Kaltim mengalami peningkatan pada triwulan III 2019. Pada triwulan III 2019, jumlah transaksi non tunai Kaltim mencapai Rp41,38 triliun dengan volume sebesar 208,91 ribu transaksi. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai Rp10,2 triliun dengan volume sebesar 208,9 ribu transaksi. Peningkatan kinerja sistem pembayaran Kaltim terutama dipengaruhi oleh peningkatan transaksi Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS). Usainya periode libur panjang dalam rangka HBKN Idul Fitri serta kinerja perekonomian Kaltim yang bersumber dari peningkatan kinerja korporasi menjadi faktor penyebab tingginya transaksi RTGS yang umumnya dilakukan oleh korporasi. Di sisi lain, transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Kaltim triwulan III 2019 juga mengalami perbaikan.

Sementara itu, transaksi PUR/tunai Kaltim masih berada dalam posisi net outflow yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III 2019, nilai uang kartal yang diedarkan Bank Indonesia (*outflow*) mencapai Rp3,83 triliun, meningkat sebesar

16,61% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,70 triliun. Sementara itu, nilai uang kartal yang kembali ke Bank Indonesia (*inflow*) di wilayah Kaltim mencapai Rp 3,30 triliun pada triwulan III 2019 atau naik 11,31% (yoy) dibandingkan triwulan III 2018 sebesar Rp 2,96 triliun. Dengan demikian, transaksi tunai di Kaltim pada triwulan III 2019 tetap berada pada posisi *net outflow* sebesar Rp528 miliar, lebih tinggi dari posisi *net outflow* triwulan III 2018 yang tercatat Rp318 miliar.

Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi serta mendukung program keuangan inklusif. Di wilayah Kaltim, Bank Indonesia senantiasa mendukung program elektronifikasi dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait. Program elektronifikasi tersebut antara lain Bantuan Sosial (Bansos) non tunai, elektronifikasi transaksi jalan tol, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) non tunai, dan sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami perbaikan yang tercermin dari naiknya beberapa indikator ketenagakerjaan. Di samping itu, tingkat kesejahteraan Kaltim juga membaik sebagaimana tercermin dari perkembangan nilai tukar petani yang lebih baik.

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim mengalami perbaikan pada tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan Kaltim tercermin dari naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kaltim pada tahun 2019 didorong oleh naiknya jumlah penduduk yang bekerja. Berdasarkan lapangan usahanya, tenaga kerja Kaltim pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor perdagangan dengan pangsa sebesar 27,81% terhadap total tenaga kerja. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun relatif masih tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan.

Disamping itu, kesejahteraan Kaltim terus mengalami perbaikan pada tahun 2019. Tingkat kemiskinan Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2017. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kaltim mengalami penurunan dari 6,03% di tahun 2018 menjadi 5,94%. Penurunan tingkat kemiskinan terjadi di seluruh kawasan, baik di pedesaan maupun perkotaan. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan III 2019. Peningkatan NTP ini didorong oleh naiknya NTP pada seluruh sektor kecuali NTP

sektor perkebunan. Penurunan NTP sektor perkebunan dipengaruhi oleh tren penurunan harga TBS yang terjadi di sepanjang tahun 2019.

Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan masih tumbuh positif namun lebih rendah daripada triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi didorong oleh melemahnya permintaan global serta tren penurunan harga komoditas di pasar internasional.

Sementara itu, tingkat inflasi pada triwulan I 2020 diperkirakan masih terkendali di tengah meningkatnya tekanan kenaikan harga yang bersumber dari kenaikan tarif yang ditentukan pemerintah.

Secara tahunan, perekonomian kaltim pada tahun 2020 diperkirakan masih tetap tumbuh positif dengan tingkat inflasi yang masih terkendali

Pada triwulan I 2020, perekonomian Kaltim diperkirakan masih tumbuh positif namun lebih rendah dibandingkan trwiulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh terbatasnya permintaan seiring degan proyeksi melambatnya volume perdagangan dunia di tengah tren harga komoditas batubara yang terus menurun. Dari sisi produksi, perlambatan pertumbuhan dipengaruhi oleh volume permintaan global yang semakin menunjukkan perlambatan di tengah berlanjutnya perang dagang serta tren penurunan produksi batubara seiring dengan pola musiman cuaca yang kurang kondusif untuk aktivitas pertambangan pada setiap awal tahun. Namun demikian, penurunan lebih lanjut tertahan oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Perekonomian Kaltim pada keseluruhan tahun 2020 diperkirakan masih tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan yang lebih rendah tersebut terutama bersumber dari penurunan permintaan negara tujuan ekspor ditengah tren harga komoditas yang diperkirakan masih mengalami penurunan. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh kinerja sektor industri pengolahan di tengah menggeliatnya industri CPO akibat perbaikan harga komoditas serta momen pembangunan IKN yang akan mengkatalisasi lapangan usaha konstruksi maupun investasi di Kaltim. Pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada rentang 2,87%-3,27% (yoy).

Inflasi Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan masih tetap terkendali di tengah meningkatnya tekanan harga dari tarif yang diatur oleh pemerintah. Tekanan inflasi Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kenaikan tekanan tersebut terutama bersumber dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS per 1 Januari 2020 serta berlanjutnya kenaikan cukai rokok secara gradual. Tekanan inflasi lebih

lanjut diperkirakan akan tertahan oleh meredanya tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan. Musim panen yang biasanya berlangsung pada awal tahun menjadi faktor meredanya tekanan inflasi bahan makanan. Selain itu, normalisasi permintaan tarif angkutan udara pasca HBKN dan liburan akhir tahun juga turut mengurangi tekanan inflasi.

Sementara itu, tekanan inflasi Kaltim pada keseluruhan tahun 2020 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 terutama akibat kenaikan tarif yang diatur oleh pemerintah namun masih di dalam target. Kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tarif listrik, BPJS, dan cukai rokok diperkirakan akan mendorong harga lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, tekanan inflasi juga diperkirakan bersumber dari kelompok transportasi dan kelompok bahan makanan yang disebabkan oleh dimulainya aktivitas persiapan pembangunan IKN. Secara keseluruhan, inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,40%-3,80% (yoy), masih berada di dalam target inflasi nasional sebesar $3,00 \pm 1\%$ (yoy).

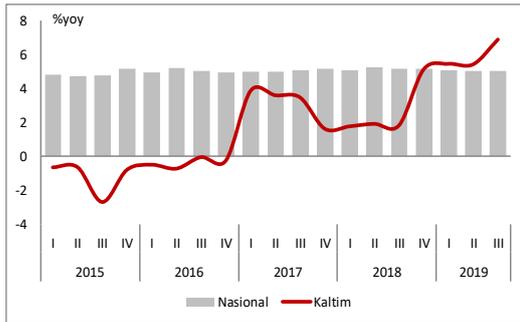
I. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim pada triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perbaikan kinerja tersebut ditopang oleh membaiknya kinerja lapangan usaha pertambangan dan perdagangan ditengah melambatnya lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan konstruksi. Sementara di sisi pengeluaran, kinerja positif perekonomian Kaltim didorong perbaikan kinerja ekspor luar negeri yang diikuti oleh peningkatan kinerja konsumsi pemerintah dan investasi.

1.1 Gambaran Umum

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan III 2019 tumbuh positif bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi Kaltim triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 6,89% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang mencapai 5,43% (yoy). Kinerja perekonomian Kaltim triwulan III 2019 bahkan lebih tinggi dibandingkan pencapaian nasional sebesar 5,02% (yoy) dan juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan yang mencapai 5,92% (yoy) (Grafik I.1 dan I.2).

Lapangan usaha pertambangan dan ekspor luar negeri menjadi penopang utama peningkatan kinerja perekonomian Kaltim pada triwulan III 2019. Pertumbuhan positif ekonomi Kaltim triwulan III 2019 yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama ditopang oleh lapangan usaha pertambangan serta perdagangan. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih lanjut tertahan oleh perlambatan lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri yang bersumber dari masih tingginya permintaan dari negara tujuan ekspor. Selain itu, pertumbuhan juga bersumber dari positifnya investasi dan konsumsi pemerintah pada triwulan III 2019. Namun pertumbuhan lebih lanjut masih tertahan oleh konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim & Nasional

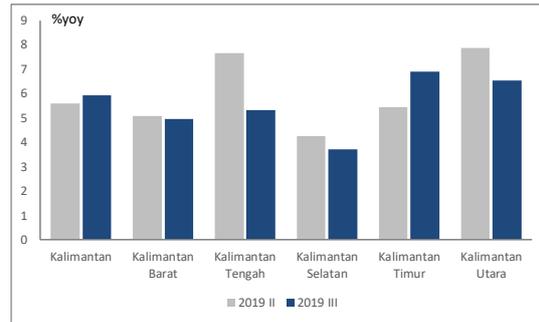


Figure 0-1

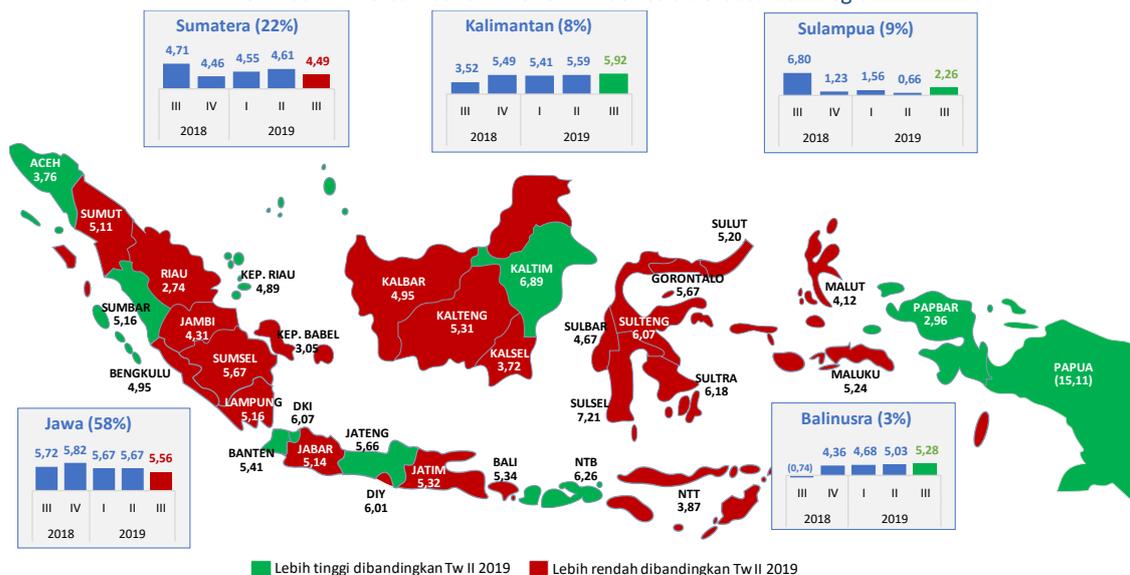
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Berdasarkan Provinsi

Perbaikan kinerja perekonomian Kaltim telah mendorong perekonomian di wilayah Kalimantan pada triwulan III 2019 menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019. Perekonomian di wilayah Kalimantan pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 5,92% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 5,59% (yoy) pada periode sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari peningkatan ekonomi Kaltim ditengah melambatnya pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Kalimantan lainnya. Kalimantan Selatan (Kalsel) tercatat menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah. Pada triwulan III 2019, perekonomian Kalsel tercatat tumbuh positif sebesar 3,72% (yoy), namun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,20% (yoy).

Lapangan usaha pertambangan masih menjadi penyumbang utama perekonomian Kalimantan pada triwulan III 2019. Berdasarkan lapangan usahanya, lapangan usaha pertambangan masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Kalimantan dengan pangsa 32,73% (yoy). Lapangan usaha pertambangan Kalimantan tumbuh sebesar 8,61% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,85% (yoy). Kinerja perekonomian wilayah lainnya di Indonesia relatif mengalami perlambatan di mana 24 dari 34 provinsi tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Beberapa provinsi yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada umumnya memiliki struktur perekonomian yang masih didominasi oleh ekspor komoditas serta investasi yang cukup besar meskipun konsumsi domestiknya masih terbatas (Gambar I.1).

Gambar I.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Regional¹



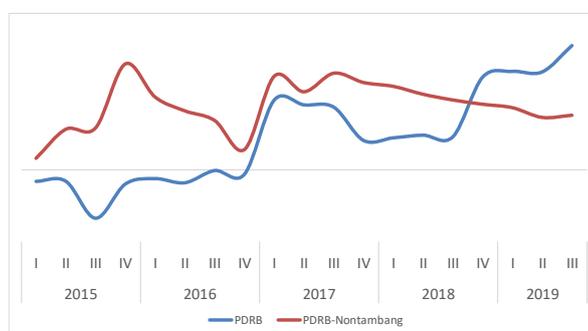
Sumber: BPS, diolah

Pada triwulan IV 2019, perekonomian Kaltim diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tersebut terutama bersumber dari melambatnya kinerja lapangan usaha pertambangan. Permintaan ekspor batubara dari Tiongkok berpotensi menurun seiring dengan mulai diimplementasikannya pembatasan impor pada beberapa pelabuhan utama di Tiongkok. Selain itu, potensi penurunan permintaan batubara juga bersumber dari India yang tercatat mengalami kenaikan produksi domestik sebesar 28% (mtm) pasca *monsoon* di bulan Oktober 2019 dan diperkirakan produksi domestik di India akan terus meningkat seiring dengan belum tercapainya target tahunan produksi batubara pada tahun 2019. Dari sisi produksi, perlambatan kinerja pertambangan di Kaltim disebabkan oleh mulai masuknya musim penghujan yang menyebabkan kegiatan pertambangan menjadi terkendala. Selain itu, perusahaan PKP2B diperkirakan akan mengalami perlambatan kegiatan produksi yang disebabkan oleh pemenuhan target produksi tahunan yang tercapai lebih cepat daripada rencana awal. Namun demikian, perlambatan kinerja pertambangan lebih lanjut tertahan oleh meningkatnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan di tengah harga CPO yang mengalami perbaikan serta meningkatnya permintaan ekspor ke Tiongkok dan India akibat diturunkannya tarif impor CPO Indonesia di kedua negara tersebut.

¹Gambar I.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan regional, adapun persentase yang berada di dalam kotak per regional menunjukkan pangsa regional tersebut terhadap perekonomian nasional

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang

Ekonomi Kaltim tanpa tambang pada triwulan III 2019 tetap tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019. Perekonomian Kaltim tanpa tambang tumbuh positif sebesar 3,03% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,91% (yoy). Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh peningkatan kinerja lapangan usaha tersier seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum (Grafik I.3). Pertumbuhan yang tinggi pada lapangan usaha pertambangan serta peningkatan realisasi belanja pemerintah secara langsung mampu berimplikasi positif terhadap sektor tersier dengan meningkatkan jumlah kegiatan *Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition* (MICE) dan tingkat hunian kamar, serta peningkatan volume lalu lintas transportasi termasuk bongkar muat barang.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.3 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Tanpa Tambang

1.2 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ditopang oleh kinerja lapangan usaha pertambangan dan perdagangan. Kinerja positif lapangan usaha pertambangan bersumber dari naiknya permintaan negara-negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok yang mengalami peningkatan permintaan pada triwulan III 2019. Selain itu, kondisi iklim yang lebih kondusif pada awal tahun 2019 menjadi faktor pendukung aktivitas pertambangan. Peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan yang terjadi pada triwulan III 2019 bersumber dari pertumbuhan positif konsumsi masyarakat Kaltim khususnya untuk komoditas barang tahan lama. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019 lebih lanjut tertahan oleh perlambatan kinerja industri pengolahan dan konstruksi. Perlambatan sektor industri pengolahan bersumber dari kinerja LNG yang terus mengalami penurunan dan juga disebabkan oleh berlanjutnya proses *natural declining* di sektor hulu. Sementara itu, perlambatan kinerja sektor konstruksi

disebabkan oleh pembangunan beberapa proyek yang hampir selesai seperti proyek Jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang progressnya telah mencapai 90,91% di awal triwulan III 2019.

Berdasarkan pangsa, ekonomi Kaltim triwulan III 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. Industri pertambangan berkontribusi sebesar 45,14%. Sementara itu, industri pengolahan memberikan kontribusi tertinggi kedua dalam struktur ekonomi Kaltim dengan pangsa sebesar 18,01%, disusul oleh lapangan usaha konstruksi dengan pangsa 9,02% dan pertanian sebesar 7,83% (Tabel I.1). Dalam beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi Kaltim tidak banyak berubah dengan masih tingginya ketergantungan aktivitas perekonomian terhadap lapangan usaha pertambangan.

Tabel I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha (yoy)

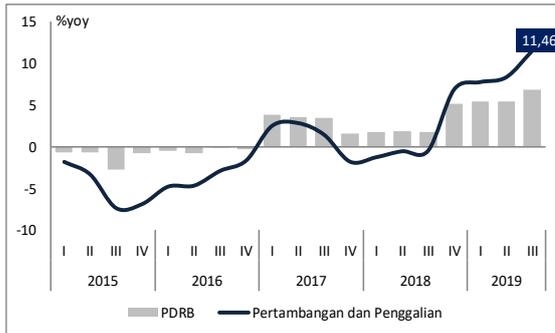
Berdasarkan Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018					2019				
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III		
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	andil (%)	share* (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,55	0,46	5,81	5,83	6,39	7,11	5,74	6,27	6,22	4,39	3,16	0,22	7,83
Pertambangan dan Penggalian	-4,89	-3,52	1,21	-1,28	-0,56	-0,49	6,84	1,11	7,72	8,30	11,46	5,26	45,14
Industri Pengolahan	2,66	5,46	3,47	1,44	0,40	0,16	0,10	0,52	-1,84	1,75	1,63	0,35	18,01
Pengadaan Listrik, Gas	30,43	8,32	6,78	12,38	11,31	9,19	6,51	9,76	8,37	8,97	8,02	0,00	0,05
Pengadaan Air	2,56	6,57	9,05	5,68	2,96	2,30	3,83	3,67	6,06	8,11	5,49	0,00	0,05
Konstruksi	-0,94	-3,86	6,42	4,52	4,46	10,09	10,01	7,37	13,92	3,25	0,46	0,03	9,02
Perdagangan Besar & Eceran	1,42	3,20	7,90	9,88	9,90	5,13	5,06	7,44	5,30	5,86	9,27	0,51	6,10
Transportasi dan Pergudangan	2,76	3,05	7,06	9,31	9,57	4,33	2,47	6,34	1,18	1,20	3,35	0,10	3,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,33	6,79	9,17	9,97	12,13	7,45	7,20	9,14	7,29	5,09	6,72	0,06	1,03
Informasi dan Komunikasi	7,66	7,45	8,73	7,88	4,39	4,27	3,78	5,04	6,13	8,80	6,70	0,11	1,32
Jasa Keuangan	2,05	1,84	-0,62	2,98	2,99	4,61	6,93	4,37	7,17	-3,06	-0,62	-0,01	1,52
Real Estate	3,59	-0,83	3,35	6,96	6,59	3,53	2,35	4,83	1,29	0,15	4,15	0,04	0,89
Jasa Perusahaan	-3,75	-4,25	3,54	7,51	9,56	1,32	1,64	4,96	-1,12	-3,72	6,05	0,01	0,21
Administrasi Pemerintahan	4,20	-3,27	-0,37	6,84	2,56	0,37	1,44	2,70	3,79	-0,02	3,22	0,06	2,04
Jasa Pendidikan	9,88	7,06	7,27	8,88	9,15	6,06	5,93	7,47	6,58	3,84	4,21	0,06	1,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,53	9,31	7,16	7,97	8,87	7,90	7,48	8,05	7,07	6,49	7,34	0,04	0,66
Jasa lainnya	8,81	7,81	6,44	6,76	9,84	9,69	9,73	9,02	9,20	7,27	7,42	0,04	0,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1,21	-0,38	3,13	1,77	1,92	1,83	5,14	2,67	5,46	5,43	6,89	6,89	100,00

*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

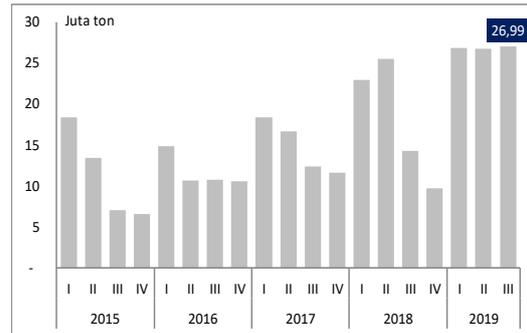
Sumber: BPS, diolah

Pertambangan dan Penggalian

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian Kaltim triwulan III 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan lapangan usaha pertambangan triwulan III 2019 mencapai 11,46% (yoy), meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 8,30% (yoy). Capaian kinerja pertambangan Kaltim triwulan III 2019 ini merupakan yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir (Grafik I.4). Dengan pangsa sebesar 45,14%, pertambangan memberikan andil pertumbuhan sebesar 5,26% terhadap ekonomi Kaltim triwulan III 2019.



Sumber: BPS, diolah
Grafik I.4 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Pertumbuhan



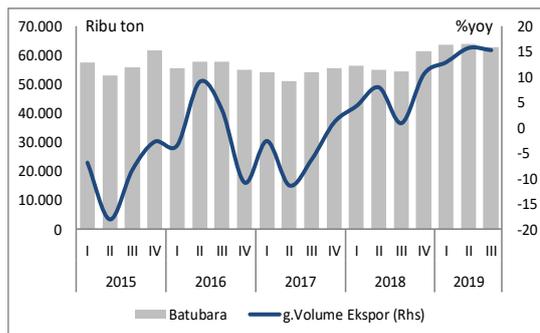
Sumber: Mc Closkey Coal Report, diolah
Grafik I.5 Produksi Batubara IUP Kaltim

Kinerja positif lapangan usaha pertambangan bersumber dari masih tingginya permintaan serta optimalisasi produksi batubara di tengah tren menurunnya pertambangan migas. Tingginya permintaan batubara terutama dari Tiongkok disertai dengan kondisi cuaca yang lebih kering pada awal triwulan III 2019, mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan produksi untuk menjaga kesesuaian target produksi sampai dengan akhir tahun 2019. Berdasarkan data yang diperoleh dari IHS Energy dan Dinas ESDM Provinsi Kaltim, peningkatan produksi terutama terjadi untuk Perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Produksi batubara perusahaan IUP pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 26,90 Juta MT, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 26,69 juta MT. Secara tahunan, produksi perusahaan IUP pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 120,52% (yoy) (Grafik I.5). Sementara itu, produksi batubara Perusahaan Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 45,98 juta MT lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 47,11 juta MT.

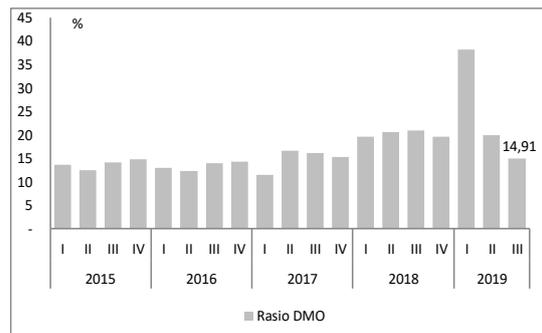
Peningkatan produksi batubara Kaltim didukung oleh kenaikan permintaan dari negara-negara mitra dagang utama. Volume ekspor batubara Kaltim triwulan III 2019 tercatat tumbuh positif sebesar 15,24% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan lalu sebesar 15,69% (yoy) (Grafik I.6). Volume ekspor batubara Kaltim yang masih tumbuh positif didorong oleh naiknya ekspor batubara ke Tiongkok dan negara-negara di kawasan ASEAN. Ekspor batubara ke kedua negara tersebut tercatat tumbuh masing-masing sebesar 83,74% (yoy) dan 26,37% (yoy). Peningkatan permintaan dari Tiongkok disebabkan oleh pembelian di depan (*front loading*) yang dilakukan oleh sejumlah *trader* ataupun *end buyer* sebagai persiapan menghadapi musim dingin dan antisipasi kebijakan restriksi impor batubara serta harga batubara domestik Tiongkok yang lebih tinggi. Kenaikan produksi batubara Kaltim juga

bersumber sebagai langkah antisipatif penurunan harga batubara yang diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2019 dan tahun 2020.

Penyerapan *Domestic Market Obligation* (DMO) batubara Kaltim triwulan III 2019 menunjukkan penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh IHS Energy, rasio penjualan DMO batubara Kaltim triwulan III 2019 mencapai 14,91% relatif lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 20,03% (Grafik I.7). Penurunan penjualan DMO terjadi baik pada PKP2B maupun IUP dengan penurunan masing-masing sebesar -28,28% (yoy) dan -35,07% (yoy). Lebih lanjut, penyerapan DMO batubara Kaltim yang rendah seringkali disebabkan oleh spesifikasi batubara yang tidak cocok dengan kebutuhan PLN. Selain itu, penjualan domestik juga sering kali kurang menguntungkan secara ekonomi akibat harga jual yang lebih rendah. Khusus untuk IUP sendiri, kendala pemenuhan DMO tersebut lebih kepada terbatasnya akses penjualan ke PLN sehingga penjualan IUP lebih didominasi oleh permintaan ekspor-



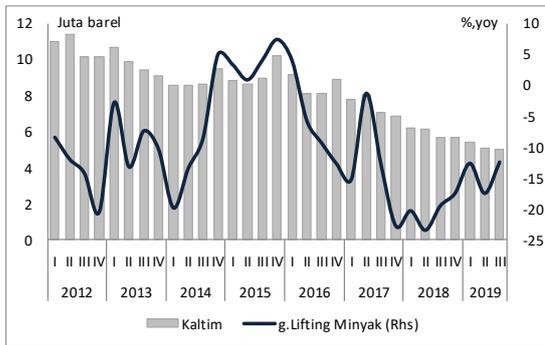
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.6 Volume Ekspor Batubara Kaltim



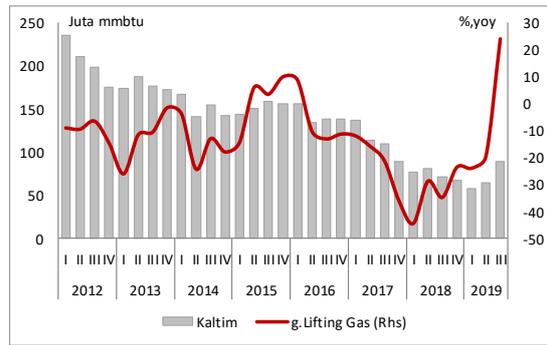
Sumber: Mc Closkey Coal Report, diolah
Grafik I.7 Rasio DMO Batubara Kaltim

Kinerja pertambangan migas mengalami tren menurun terutama akibat *natural declining* blok Mahakam. *Lifting* minyak bumi triwulan III 2019 tercatat 4,98 juta barel atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -12,43% (yoy) (Grafik I.8). Demikian pula, meski *lifting* gas pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tercatat 88 juta mmbtu atau tumbuh sebesar 22,89% (yoy) (Grafik I.9), namun tren *lifting* migas terus turun yang bersumber dari tingkat *natural declining* blok migas di wilayah Kaltim. Operator blok Mahakam tercatat telah melakukan pengeboran 52 sumur dari 118 target sumur yang akan dibor sepanjang tahun 2019. Meskipun secara kuantitas masih *on track* tetapi tingkat maturasi blok migas yang cukup tinggi, kantung reservoir yang lebih kecil, serta jarak antar sumur yang semakin rapat menjadi hambatan bagi operator untuk mengatasi masalah *natural declining*.

Akibatnya *lifting* gas blok Mahakam triwulan III 2019 hanya sebesar 47,62% dari target sementara minyak bumi sebesar 59,80% dari target.

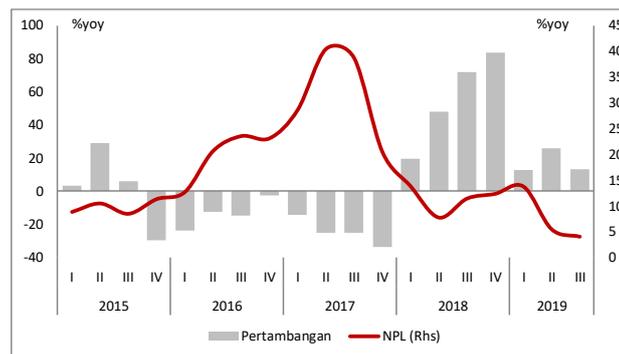


Sumber: Kementerian ESDM, diolah
Grafik I.8 **Lifting Minyak Kaltim**



Sumber: Kementerian ESDM, diolah
Grafik I.9 **Lifting Gas Kaltim**

Kinerja pertambangan yang membaik (terutama batubara) juga tercermin dari dukungan pembiayaan ke lapangan usaha ini yang masih positif. Kredit pertambangan triwulan III 2019 masih tumbuh positif sebesar 13,20% (yoy) meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 25,80% (yoy) (Grafik I.10). Kredit lapangan usaha pertambangan yang masih positif tersebut bersumber dari kinerja kredit jenis modal kerja yang digunakan untuk kegiatan operasional produksi. Penyaluran kredit yang masih tumbuh positif juga disertai dengan semakin membaiknya risiko kredit dengan tingkat NPL sebesar 5,29%. Meskipun berada di atas *threshold* 5%, risiko kredit pertambangan Kaltim triwulan III 2019 menurun dari periode sebelumnya yang mencapai sebesar 5,45%.



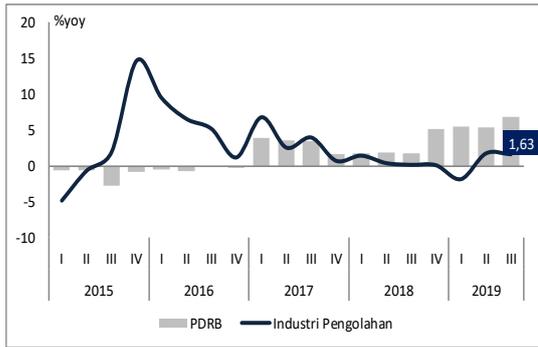
Grafik I.10 **Kredit dan NPL Pertambangan Kaltim**

Pada triwulan IV 2019, lapangan usaha pertambangan diperkirakan masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Realisasi pemenuhan target perusahaan batubara yang lebih cepat di awal triwulan 2019 serta mulai masuknya

musim hujan di triwulan IV 2019 yang merupakan faktor penghambat produksi akan menjadi risiko penahan pertumbuhan lapangan usaha pertambangan lebih lanjut. Dari sisi permintaan eksternal, terdapat resiko penurunan permintaan Tiongkok bersumber dari kuota awal impor batubara Tiongkok sebesar 281 juta ton yang telah hampir terpenuhi di bulan November 2019. Selain itu, kebijakan restriksi impor Tiongkok juga mulai diterapkan di beberapa pelabuhan RRC bagian Selatan dan pada akhirnya akan berpotensi menurunkan permintaan impor batubara Tiongkok. Sementara itu permintaan dari pasar India juga diperkirakan menurun, mengingat potensi peningkatan produksi batubara domestik India paska berakhirnya musim hujan badai (*monsoon*) serta terdapat kompetitor batubara Rusia yang memasuki pasar India. Di sisi pertambangan migas, *natural declining* blok migas diperkirakan masih berlanjut dengan tingkat penurunan yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya. Dengan demikian, *lifting* migas juga diperkirakan sulit untuk mencapai target produksi tahun 2019.

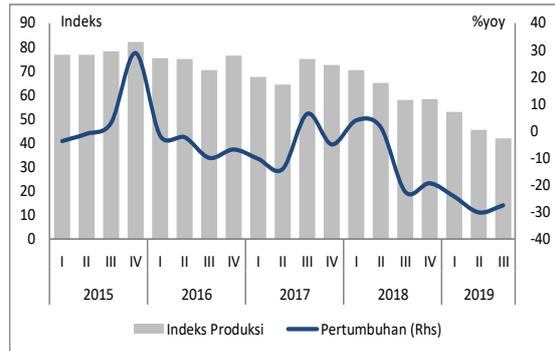
Industri Pengolahan

Kinerja industri pengolahan Kaltim triwulan III 2019 masih tumbuh positif meski melambat dibandingkan dengan triwulan lalu. Industri pengolahan tercatat tumbuh sebesar 1,63%(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,75% (yoy) (Grafik I.11). Dengan pangsa sebesar 18,01%, industri pengolahan memberikan kontribusi 0,35% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019. Perlambatan kinerja industri pengolahan salah satunya bersumber dari kinerja industri LNG yang terus mengalami perlambatan. Kinerja Industri LNG yang relatif melambat disebabkan oleh penurunan produksi dan pengiriman LNG dipengaruhi oleh semakin berkurangnya bahan baku utama berupa gas alam akibat *natural declining* blok-blok migas di wilayah Kaltim. Produksi LNG Kaltim tercatat masih mengalami penurunan sebesar -27,69% (yoy) pada triwulan III 2019 meskipun lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun hingga -30,34% (yoy). Lebih lanjut, hingga akhir 2019, masih belum terdapat *giant discovery* sumur-sumur baru yang dapat menambah jumlah *lifting* migas Kaltim (Grafik I.12)



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.11 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim - Industri Pengolahan

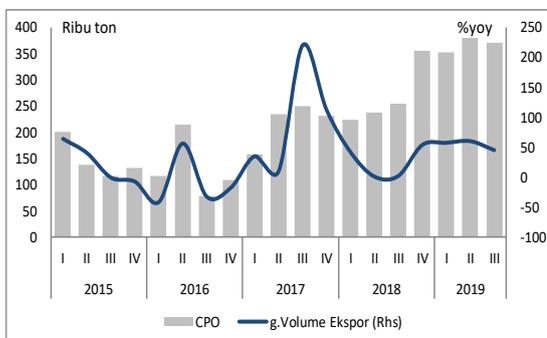


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.12 Indeks Produksi LNG Kaltim

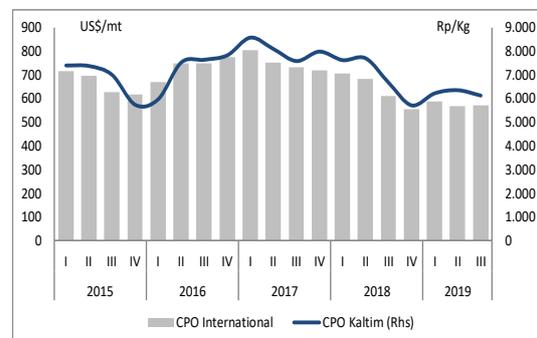
Sementara itu, industri pengolahan nonmigas Kaltim triwulan III 2019 tumbuh positif didorong oleh kinerja industri CPO yang masih baik. Industri pengolahan CPO masih tumbuh positif meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan volume ekspor CPO Kaltim triwulan III 2019 yang juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 45,17% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 60,18% (yoy) (Grafik I.13). Kinerja positif industri CPO tersebut terutama didorong oleh masih kuatnya permintaan ekspor serta suksesnya implementasi program B20, yang direspon dengan kenaikan produksi CPO yang terjadi di hampir seluruh sentra produksi.

Di tengah masih baiknya volume ekspor, tren penurunan harga CPO masih terus berlanjut di tengah *oversupply* CPO di pasar dunia. Harga CPO internasional pada triwulan III 2019 tercatat sebesar US\$570,10/mt, turun sebesar -6,82% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik I.14). Penurunan harga CPO tersebut dimanfaatkan oleh sebagian negara mitra dagang dalam melakukan *stockpiling*. Hal ini yang menyebabkan ekspor CPO pada triwulan III 2019 masih mampu mencatatkan pertumbuhan yang positif.



Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah

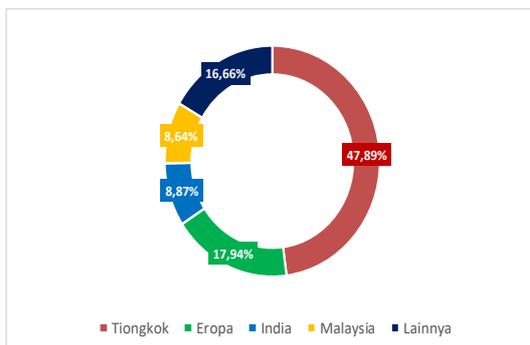
Grafik I.13 Volume Ekspor CPO Kaltim



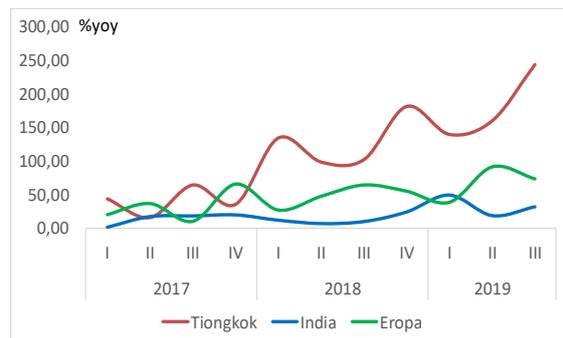
Sumber: Worldbank dan Dinas Perkebunan Kaltim, diolah

Grafik I.14 Harga CPO Internasional & Kaltim

Lebih jauh, kinerja industri pengolahan CPO ditopang oleh masih kuatnya permintaan ekspor CPO ke Tiongkok dan India. Volume ekspor CPO ke Tiongkok pada triwulan III 2019 juga mengalami peningkatan dari 62,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 138,57% (yoy). Tiongkok merupakan negara tujuan utama CPO asal Kaltim dengan pangsa ekspor mencapai 47,89% dari total ekspor CPO Kaltim (Grafik I.15). Peningkatan tensi dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat berdampak pada pembatasan pembelian produk-produk dari Amerika Serikat, termasuk minyak kedelai atau *soybean oil*. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok melakukan substitusi *edible oil* dari semula minyak yang berbahan dasar kacang kedelai menjadi minyak kelapa sawit. Selain Tiongkok, ekspor CPO triwulan III 2019 ke pasar India juga tumbuh cukup tinggi sebesar 32,21% (yoy) meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 18,93% (yoy). Peningkatan ekspor CPO ke India terutama bersumber dari penyetaraan bea masuk kelapa sawit dengan Malaysia serta kenaikan permintaan menjelang perayaan Diwali di India (Grafik I.16). Namun demikian, pelemahan permintaan dari Eropa akibat terus berlanjutnya kampanye negatif penggunaan CPO khususnya dari Indonesia menahan kinerja positif ekspor CPO lebih lanjut.



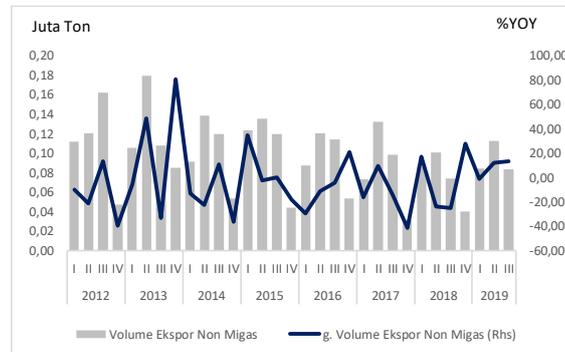
Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.15 Pangsa Ekspor CPO Kaltim



Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.16 Pertumbuhan Ekspor CPO ke Negara Tujuan Utama

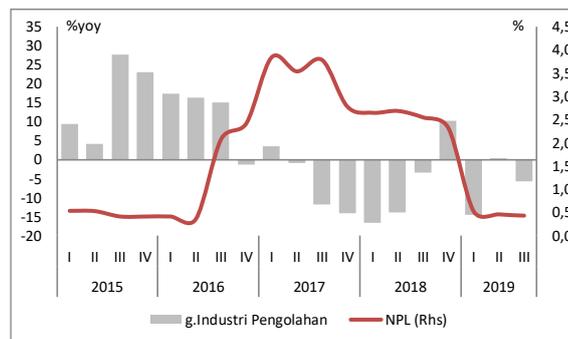
Kinerja positif industri pengolahan lebih lanjut tertahan oleh penurunan kinerja industri pengolahan kayu lapis. Penurunan kinerja tersebut tercermin dari volume ekspor kayu lapis yang mengalami penurunan pada triwulan III 2019. Volume ekspor kayu lapis pada triwulan III 2019 mengalami penurunan sebesar -14,81% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar -4,84% (yoy). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh permintaan ekspor yang menurun seiring dengan selesainya proyek pembangunan persiapan Olimpiade 2020 di Jepang yang memerlukan bahan baku kayu lapis.

Industri pengolahan bahan kimia organik pada triwulan III 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekspor bahan kimia organik pada triwulan III 2019 tercatat 13,26% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,97% (yoy) (Grafik I.17). Sementara itu, kinerja industri pengolahan lain seperti pupuk, kayu olahan dan asam lemak lainnya juga turut mengalami kenaikan.



Sumber: Ditjen Bea dan Cukai, diolah
Grafik I.17 Volume Ekspor Bahan Kimia Organik Kaltim

Kinerja lapangan usaha industri pengolahan Kaltim yang melambat juga tercermin dalam penurunan penyaluran kredit triwulan III 2019. Penyaluran kredit pada industri pengolahan mengalami penurunan sebesar -5,64% (yoy) pada triwulan III 2019, berkebalikan dengan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh positif sebesar 0,33% (yoy) (Grafik I.18). Namun demikian, risiko kredit industri pengolahan triwulan III 2019 relatif membaik yang tercermin dari penurunan angka NPL dari 0,45% di triwulan III 2019 menjadi 0,42%.



Grafik I.18 Kredit dan NPL Industri Pengolahan Kaltim

Pada triwulan IV 2019, kinerja industri pengolahan diprakirakan kembali tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Positifnya kinerja industri pengolahan salah satunya bersumber dari rencana Tiongkok untuk menghapus tarif impor CPO di tengah penurunan *supply* akibat el nino serta minimnya pasokan kedelai akibat masih

berlanjutnya perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta mewabahnya *swine flu* di Tiongkok. Selain Tiongkok, potensi peningkatan permintaan juga bersumber dari India yang tengah meningkatkan restriksi impor CPO dari Malaysia akibat sentimen politik antara kedua negara tersebut. Selain itu, peningkatan kinerja industri pengolahan CPO juga bersumber dari potensi kenaikan permintaan domestik seiring dengan berlanjutnya program B20 dan percepatan implementasi program B30 di akhir tahun 2019. Dari sisi industri pengolahan migas, produksi hasil minyak Pertamina RU V pada triwulan IV 2019 diperkirakan masih tetap stabil pasca *turnaround* kilang minyak Pertamina RU V yang sudah selesai pada triwulan I 2019 (3 Februari - 3 Maret 2019) yang lalu. Tren historis produksi Pertamina pada triwulan IV juga menunjukkan produksi yang cenderung stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

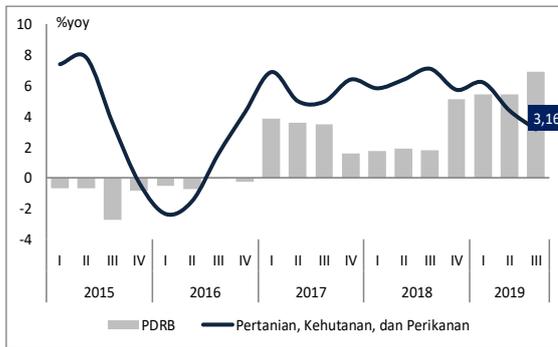
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan Kaltim pada triwulan III 2019 masih tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Pertanian dalam arti luas tercatat tumbuh 3,16% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,39% (yoy) (Grafik I.19). Dengan pangsa sebesar 7,83% terhadap ekonomi Kaltim, lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 0,22% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019. Perlambatan kinerja pertanian tersebut dipengaruhi oleh kondisi iklim kemarau yang cenderung lebih kering pada tahun 2019. Berdasarkan data yang dihimpun dari Bureau of Meteorology of Australia, kondisi iklim yang tercermin dari *Southern Oscillation Index (SOI)*² menunjukkan bahwa kondisi iklim di wilayah Samudera Pasifik di awal tahun 2019 lebih panas jika dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik I.20). Selain itu, perlambatan pertumbuhan lapangan usaha pertanian juga bersumber dari fenomena banjir yang sempat melanda sejumlah kawasan di Kalimantan Timur termasuk di beberapa pusat kegiatan pertanian.

Perkebunan kelapa sawit turut mendorong masih positifnya kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan Kaltim pada triwulan III 2019. Kinerja positif perkebunan kelapa sawit karena memasuki periode puncak panen dan optimalisasi penggunaan B20. Sementara itu, kebakaran hutan yang sempat terjadi di kawasan Kalimantan tidak terlalu

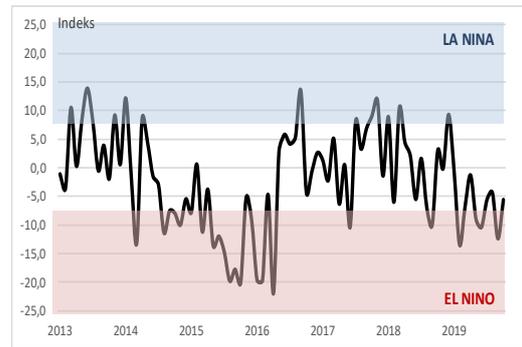
² Southern Oscillation Index (SOI) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui intensitas El Nino atau La Nina di daerah Samudera Pasifik. Angka SOI dibawah -7 mengindikasikan kondisi El Nino, sementara angka SOI diatas +7 mengindikasikan kondisi La Nina.

berpengaruh terhadap kondisi tanaman di Kaltim, namun dapat berpotensi terhadap kesuburan tanaman sawit di Kaltim dalam rentang 6 (enam) bulan – 1 (satu) tahun ke depan.



Sumber: BPS, diolah

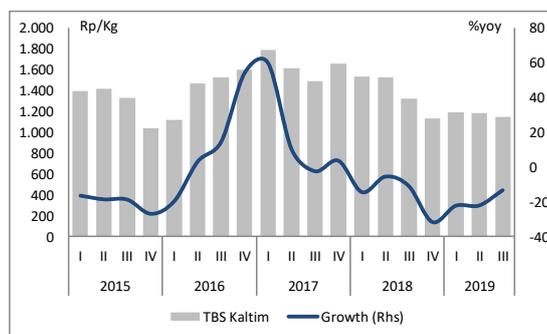
Grafik I.19 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Pertanian



Sumber: Bureau of Meteorology of Australia, diolah

Grafik I.20 Indeks El Nino dan La Nina

Melimpahnya pasokan kelapa sawit mendorong harga TBS di tingkat petani masih cukup rendah. Pada triwulan III 2019 harga TBS Kaltim tercatat sebesar Rp1.144,51/kg lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang berada pada level Rp1.185,58 dan tercatat mengalami penurunan sebesar -13,45% (yoy) (Grafik I.21). Rendahnya harga komoditas kelapa sawit juga dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang tinggi di pasar global. Sementara itu, investasi swasta dalam negeri untuk sub-lapangan usaha tanaman pangan dan perkebunan juga menunjukkan pertumbuhan yang masih positif sebesar 22,82% (yoy) pada triwulan III 2019 meski lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang tumbuh mencapai 68,88% (yoy).

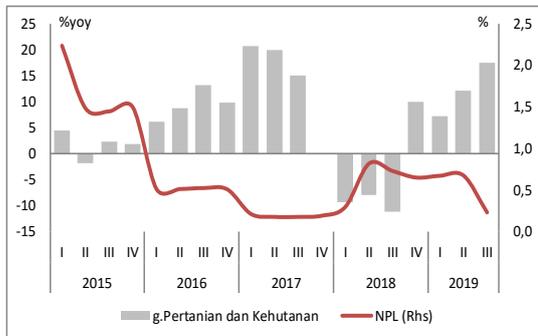


Sumber: Dinas Perkebunan Kaltim, diolah

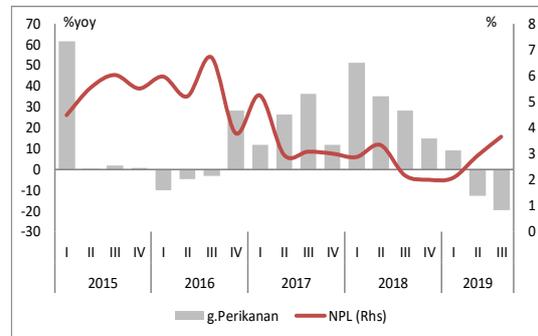
Grafik I.21 Harga TBS Kaltim

Penyaluran kredit kepada sub-lapangan usaha pertanian dan kehutanan meningkat dengan risiko yang terjaga, namun tertahan oleh penyaluran kredit kepada sub-lapangan usaha perikanan. Penyaluran kredit pertanian dan kehutanan triwulan III 2019 tumbuh 17,54% (yoy), meningkat dari periode sebelumnya 12,08% (yoy) dengan NPL yang relatif terjaga pada level 0,23% (Grafik I.22). Namun demikian, penyaluran kredit sub-lapangan usaha perikanan

mengalami penurunan sebesar -19,82% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pertumbuhan pada periode sebelumnya sebesar -12,64% (yoy) (Grafik I.23). Penurunan penyaluran kredit tersebut juga diikuti oleh kenaikan risiko kredit namun masih tetap berada di bawah *threshold*. NPL sub-lapangan usaha perikanan meningkat dari 2,91% pada triwulan II 2019 menjadi 3,66% pada triwulan III 2019.



Grafik I.22 Kredit dan NPL Pertanian Kaltim



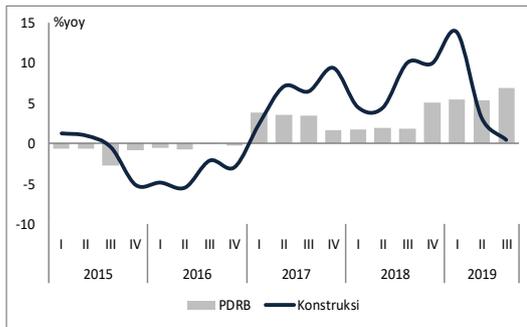
Grafik I.23 Kredit dan NPL Perikanan Kaltim

Pada triwulan IV 2019, lapangan usaha pertanian diperkirakan masih tumbuh positif meski lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya. Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh telah berlalunya musim panen TBS serta mundurnya jadwal tanam untuk beberapa komoditas yang pada awalnya dijadwalkan pada September 2019 namun diperkirakan baru akan terealisasi pada November 2019. Mundurnya jadwal tanam tersebut akan berpengaruh kepada mundurnya jadwal panen beberapa komoditas dan ditambah oleh mulai masuknya musim penghujan yang berpotensi akan menyebabkan produksi menjadi terhambat.

Konstruksi

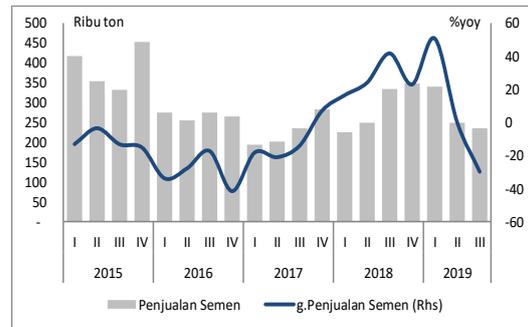
Kinerja lapangan usaha konstruksi Kaltim triwulan III 2019 tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan triwulan lalu, terutama akibat hampir selesainya beberapa proyek strategis dan lebih rendahnya realisasi belanja modal Pemerintah Daerah. Konstruksi tercatat tumbuh 0,46% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,25% (yoy) (Grafik I.24). Dengan pangsa sebesar 9,02%, pertumbuhan lapangan usaha konstruksi berkontribusi sebesar 0,03% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019. Kinerja konstruksi yang lebih rendah pada triwulan III 2019 dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas pembangunan proyek pemerintah di wilayah Kaltim, sejalan dengan hampir selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Strategis Daerah (PSD) di wilayah Kaltim. Selain itu, penurunan sektor konstruksi juga turut dipengaruhi oleh realisasi belanja

modal pemerintah daerah yang mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal Kaltim pada triwulan III 2019 hanya berada pada level 24,13%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 46,93%. Perlambatan kinerja konstruksi juga tercermin dari penjualan semen Kaltim triwulan III 2019 yang menurun sebesar -29,8% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya masih tumbuh positif sebesar 0,01% (yoy) (Grafik I.25).



Sumber: BPS, diolah

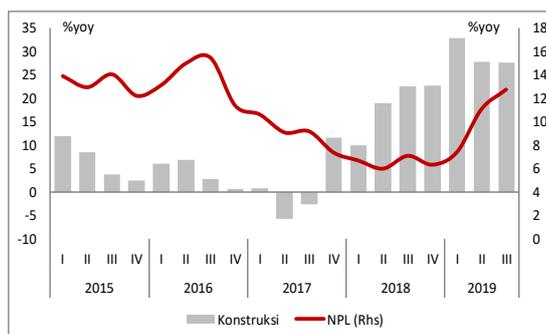
Grafik I.24 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konstruksi



Sumber: Asosiasi Semen, diolah

Grafik I.25 Penjualan Semen Kaltim

Searah dengan kinerja lapangan usaha konstruksi yang melambat, penyaluran kredit konstruksi triwulan III 2019 dari perbankan tumbuh positif, namun mengalami penurunan yang disertai dengan risiko yang meningkat. Kredit konstruksi tercatat tumbuh sebesar 27,63% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan lalu sebesar 27,82% (yoy) (Grafik I.26). Perlambatan kredit konstruksi dipengaruhi oleh penurunan kinerja *real estate* pada triwulan III 2019. Hal ini terkonfirmasi dari perlambatan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang pada triwulan III 2019 tumbuh sebesar 1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 3,14% (yoy). Sementara itu, *Non Performing Loan* (NPL) konstruksi menunjukkan peningkatan dari 7,87% di triwulan II 2019 menjadi 7,94% pada triwulan III 2019. Tingginya risiko kredit berdampak pada preferensi industri perbankan untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit di lapangan usaha konstruksi.

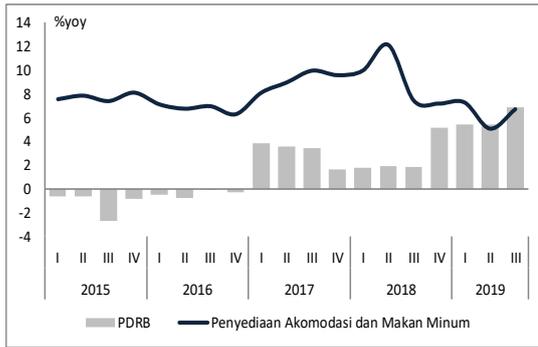


Grafik I.26 Kredit dan NPL Konstruksi Kaltim

Pada triwulan IV 2019, kinerja lapangan usaha konstruksi diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2019. Peningkatan kinerja konstruksi tersebut bersumber dari telah disetujuinya penambahan PAGU APBD Provinsi 2019 sebesar Rp2,9 triliun pada akhir Oktober 2019 dan percepatan belanja daerah pada triwulan IV 2019. Selain itu, meningkatnya sektor konstruksi juga bersumber dari masih berlanjutnya proyek konstruksi RDMP V Balikpapan yang pada akhir tahun 2019 secara kumulatif diperkirakan akan mencapai diatas 10,56%. Realisasi konstruksi RDMP V pada triwulan III 2019 baru mencapai 7,60%.

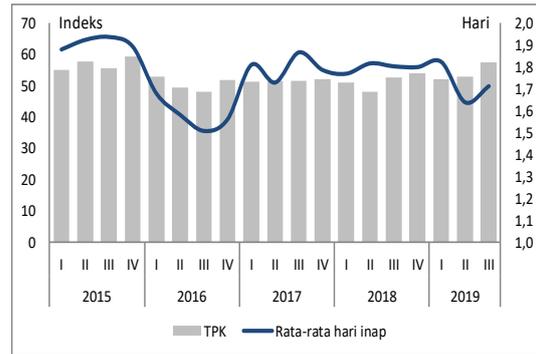
Lapangan Usaha Lainnya

Pertumbuhan ekonomi Kaltim pada lapangan usaha tersier mengalami peningkatan= Lapangan usaha penyedia akomodasi makan minum tumbuh sebesar 6,72% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2019 yang tumbuh 5,09% (yoy) (Grafik I.27). Dengan pangsa sebesar 1,03%, lapangan usaha ini memberikan andil sebesar 0,06% (yoy) terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019. Peningkatan lapangan usaha akomodasi dan makan minum dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja korporasi di Kaltim yang secara langsung mendorong kinerja di sektor akomodasi dan makan minum. Selama triwulan III 2019, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Kaltim tercatat sebesar 57,48% lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2019 sebesar 52,87%. Kondisi ini dipengaruhi oleh kegiatan MICE yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, rata-rata hari inap pada triwulan III 2019 juga mengalami peningkatan menjadi 1,71 hari per kunjungan dari triwulan sebelumnya sebesar 1,64 hari per kunjungan (Grafik I.28).



Sumber: BPS, diolah

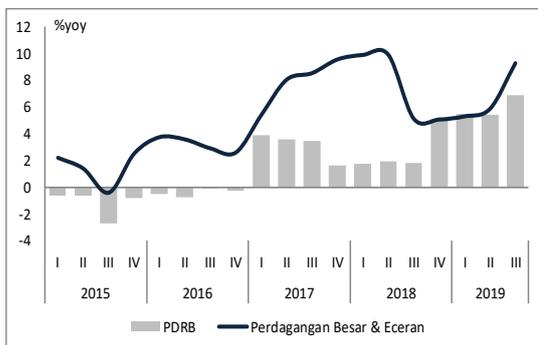
Grafik I.27 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Penyedia Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: BPS, diolah

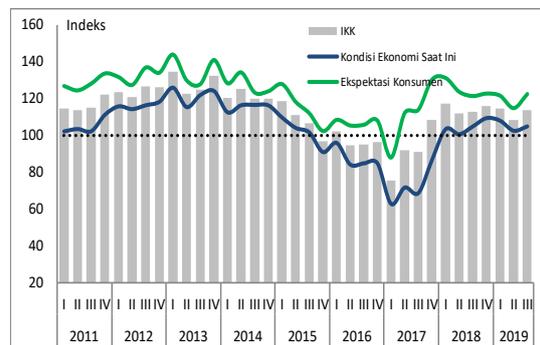
Grafik I.28 TPK dan Rata – Rata Hari Inap Kaltim

Lapangan usaha tersier lainnya, seperti perdagangan besar dan eceran serta transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi. Perdagangan besar dan eceran triwulan III 2019 tumbuh sebesar 9,27% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 5,86% (yoy) (Grafik I.29). Dengan pangsa sebesar 6,10%, lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 0,51% terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019. Peningkatan kinerja perdagangan besar dan eceran bersumber dari tumbuhnya sektor utama yang menyebabkan konsumsi masyarakat juga mengalami pertumbuhan. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil survei konsumen yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 113,53, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 108,50 (Grafik I.30). Peningkatan IKK tersebut salah satunya bersumber dari Indeks Kondisi Ekonomi saat ini yang tercatat sebesar 104,72 pada triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 102,33.



Sumber: BPS, diolah

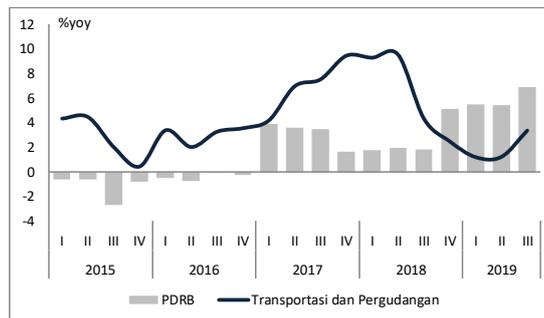
Grafik I.29 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber: Survei Konsumen, diolah

Grafik I.30 Indeks Keyakinan Konsumen

Lapangan usaha transportasi dan pergudangan juga tercatat mengalami peningkatan pertumbuhan. Pada triwulan III 2019, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat meningkat dari 1,20% (yoy) pada triwulan II 2019 menjadi 3,35% (yoy) pada triwulan III 2019 (Grafik I.31). Peningkatan ini pada umumnya disebabkan oleh peningkatan volume lalu lintas perdagangan serta bongkar muat di Kaltim seiring dengan tumbuhnya lapangan usaha pertambangan serta industri pengolahan. Selain itu, peningkatan tersebut juga diperkuat oleh mulai ditambahkannya beberapa rute baru di Bandara APT Pranoto Samarinda yang mendorong peningkatan kinerja lapangan usaha transportasi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.31 **Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Transportasi dan Pergudangan**

Pada triwulan IV 2019, lapangan usaha tersier diperkirakan tumbuh positif namun melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perlambatan tersebut terutama bersumber dari adanya rencana penutupan Bandara APT Pranoto Samarinda pada minggu ketiga November 2019 – minggu kedua Desember 2019 dikarenakan adanya perpanjangan *runway* serta penambahan lampu pada landasan pacu yang menyebabkan proses distribusi barang dagang maupun jasa sedikit mengalami hambatan. Selain itu, perlambatan juga terjadi seiring dengan prakiraan adanya perlambatan produksi batubara pada akhir tahun 2019 akibat faktor cuaca yang mulai masuk musim penghujan sehingga akan menurunkan volume bongkar muat di Pelabuhan Utama. Kondisi ini terkonfirmasi dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2019 yang tercatat sebesar 108,17 atau lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata triwulan III 2019 sebesar 113,53.

1.3 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran

Di sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kaltim triwulan III 2019 didorong oleh peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan Pembentukan Modal Tetap Bruto/ PMTB (investasi). Peningkatan ekspor Kaltim triwulan III 2019 bersumber dari volume ekspor batubara ke Tiongkok yang cukup tinggi. Adapun investasi tumbuh positif selaras dengan upaya pemerintah dalam pembangunan proyek – proyek infrastruktur. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tumbuh positif namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh normalisasi konsumsi masyarakat pasca HBKN. Kinerja ekspor yang cukup tinggi berdampak signifikan kepada ekonomi secara keseluruhan disebabkan oleh pangsa ekspor yang mencapai 35,88%. Selain ekspor luar negeri, net ekspor antar daerah juga memiliki pangsa yang relatif tinggi sebesar 24,24%, diikuti dengan investasi (PMTB) sebesar 27,59% dan konsumsi rumah tangga sebesar 16,83% (Tabel I.2).

Tabel I.2 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Berdasarkan Pengeluaran (yoy)

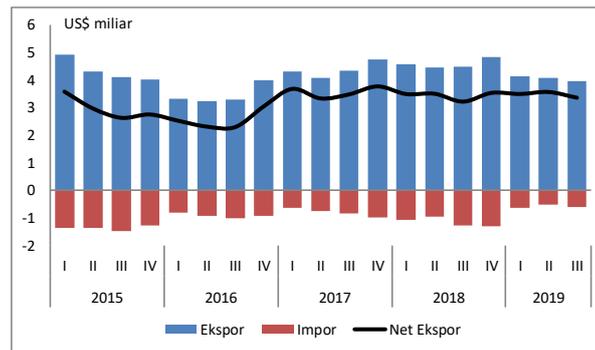
Berdasarkan Pengeluaran	2015	2016	2017	2018					2019				
	TOTAL	TOTAL	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III		
	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	yoy (%)	andil (%)	share* (%)
Konsumsi RT	1.28	1.56	2.47	2.34	2.77	2.71	3.42	2.81	3.82	3.35	3.10	0.46	16.83
Konsumsi LNPRT	8.30	-4.04	4.89	9.51	7.23	12.47	8.56	9.41	7.41	6.41	6.67	0.03	0.50
Konsumsi Pemerintah	-7.77	-13.03	-12.14	3.04	-1.23	17.60	11.76	8.21	16.29	-1.68	7.74	0.22	3.68
PMTB	-1.47	-6.04	2.75	5.07	16.64	2.19	6.83	7.54	7.93	-3.87	3.18	0.81	27.59
Perubahan Inventori	-35.89	-65.19	-15.85	-32.30	-27.06	-8.53	24.06	-15.13	16.45	-73.15	-67.04	-0.14	0.07
Ekspor LN	-16.07	-9.88	2.55	-6.03	-4.35	-3.01	-1.39	-3.71	1.09	8.94	15.94	7.57	35.88
Impor LN	3.49	-12.70	2.51	19.67	2.27	8.23	8.03	9.39	-20.60	-25.61	-27.54	-4.95	8.80
Net Ekspor Antar Daerah	225.50	32.54	7.51	29.76	1.33	13.83	21.04	16.15	-5.96	-9.96	-26.35	-7.01	24.24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.21	-0.38	3.13	1.77	1.92	1.83	5.14	2.67	5.46	5.43	6.89	6.89	100.00

*pangsa diperoleh dari angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Sumber: BPS, diolah

Perdagangan Luar Negeri – Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan Kaltim triwulan III 2019 mencatatkan surplus menurun akibat penurunan harga batubara dan peningkatan impor minyak mentah. Surplus neraca perdagangan turun dari US\$3,56 miliar pada triwulan sebelumnya menjadi US\$3,35 miliar. Ekspor Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar US\$3,96 miliar, sementara impor Kaltim tercatat sebesar US\$611,19 Juta (Grafik I.32). Nominal ekspor pada triwulan III 2019 sedikit mengalami penurunan disebabkan oleh tren penurunan harga batubara di pasar internasional. Penurunan lebih lanjut tertahan oleh kenaikan ekspor migas. Di sisi impor, peningkatan impor minyak mentah sebagai bahan baku industri pengolahan minyak menyebabkan impor Kaltim secara keseluruhan meningkat.

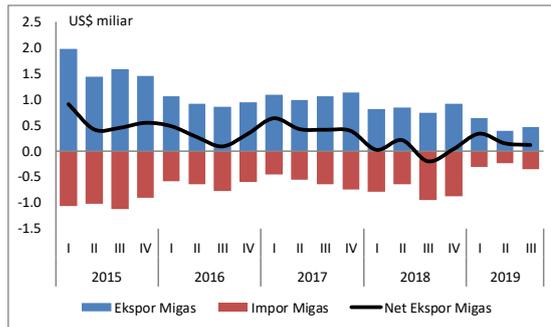


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.32 Neraca Perdagangan Kaltim

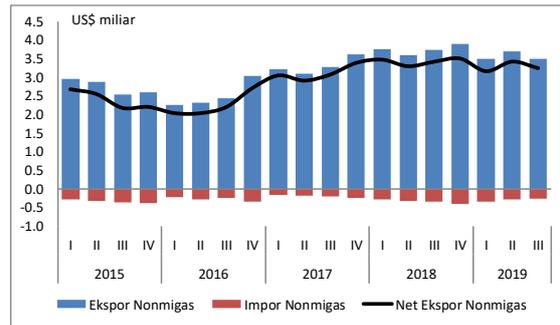
Meskipun impor minyak mentah yang lebih tinggi secara triwulanan, namun secara tahunan turun cukup signifikan akibat kebijakan pemanfaatan produksi dalam negeri. Pada triwulan III 2019, impor minyak mentah tercatat meningkat dari US\$103,6 juta pada triwulan II 2019 menjadi menjadi US\$254,02. Secara keseluruhan, impor migas Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar US\$355,05 juta, lebih besar daripada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar US\$243,74 juta. Meski mengalami peningkatan secara triwulanan, namun secara tahunan impor migas mengalami penurunan sebesar -63,57% (yoy). Penurunan impor migas tahunan tersebut didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 42 Tahun 2018 yang menekankan pemanfaatan minyak mentah produksi dalam negeri sebagai bahan baku industri pengolahan migas.

Ekspor migas Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya akibat peningkatan ekspor gas, namun secara tahunan mengalami penurunan akibat kebijakan pemanfaatan produksi dalam negeri dan *natural declining*. Ekspor migas Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar US\$469,55 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan US\$390,49 juta pada periode sebelumnya. Ekspor migas yang lebih tinggi tersebut terutama bersumber dari peningkatan ekspor gas. Pada triwulan III 2019, ekspor gas Kaltim mengalami peningkatan dari US\$350,25 juta menjadi US\$385,02 juta. Namun secara tahunan, ekspor migas mengalami penurunan sebesar -37,01% (yoy) seiring dengan berlakunya Permen ESDM No.42 Tahun 2018 (Grafik I.33). Dengan diutamakan produksi minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri maka pasokan untuk ekspor luar negeri menjadi lebih rendah. Penurunan ekspor migas tahunan juga disebabkan oleh *lifting* migas yang masih mengalami penurunan terutama sebagai dampak dari *natural declining*.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.33 Neraca Perdagangan Migas Kaltim



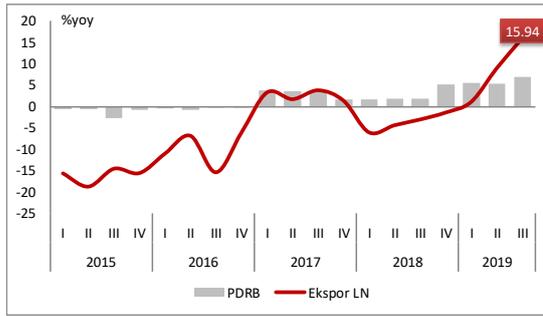
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.34 Neraca Perdagangan Nonmigas Kaltim

Neraca perdagangan nonmigas Kaltim pada triwulan III 2019 mencatat surplus meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya akibat penurunan harga batubara. Surplus neraca non migas Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar US\$3,24 miliar, lebih rendah dibandingkan US\$3,41 miliar triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh harga batubara di pasar internasional yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, ekspor non migas tercatat mengalami penurunan sebesar -6,79% (yoy) (Grafik I.34).

Perdagangan Luar Negeri - Ekspor

Ekspor luar negeri (LN) Kaltim pada triwulan III 2019 masih menunjukkan tren peningkatan, terutama disumbang oleh meningkatnya ekspor batubara dan CPO. Kinerja ekspor LN tercatat tumbuh sebesar 15,94% (yoy), meningkat dibandingkan 8,94% (yoy) triwulan sebelumnya (Grafik I.35). Ekspor LN Kaltim dengan pangsa mencapai 35,88% dari PDRB mampu memberikan andil sebesar 7,57% terhadap ekonomi Kaltim pada triwulan III 2019. Peningkatan ekspor LN bersumber dari komoditas batubara, minyak kelapa sawit (CPO), serta pupuk yang masih tumbuh positif di triwulan III 2019. Peningkatan ekspor luar negeri juga tampak dalam *likert scale* hasil liaison Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan ekspor luar negeri (Grafik I.36)



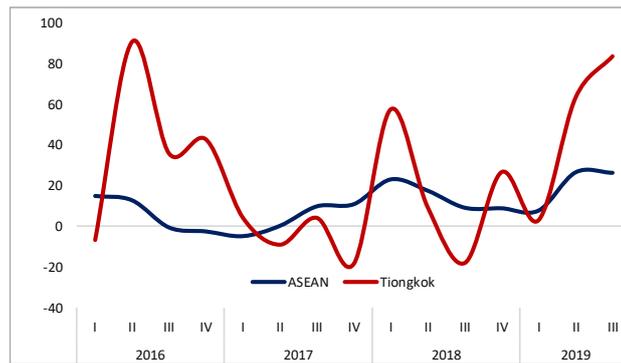
Sumber: BPS, diolah

Grafik I.35 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Ekspor Luar Negeri



Grafik I.36 Likert Skale – Penjualan Ekspor Kaltim

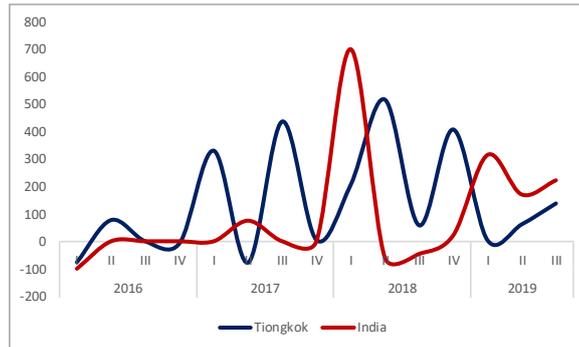
Peningkatan penjualan batubara ke Tiongkok menjadi motor penggerak ekspor utama di Kaltim, meskipun harganya dalam tren menurun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, ekspor batubara ke Tiongkok tumbuh sebesar 83,74% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 63,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.37). Meskipun pemerintah Tiongkok sedang menerapkan restriksi impor di sejumlah pelabuhan namun belum berdampak pada pengurangan permintaan batubara asal Kaltim. Kenaikan permintaan batubara Tiongkok tersebut terutama dilakukan sebagai upaya persiapan musim dingin di tengah produksi batubara Tiongkok yang lebih rendah. Di samping itu, harga batubara di pasar internasional yang sedang dalam tren penurunan juga dioptimalkan oleh importir untuk menjaga pasokan. Pangsa ekspor batubara ke Tiongkok pada triwulan III 2019 mencapai 35,46% terhadap keseluruhan ekspor batubara Kaltim. Oleh sebab itu, perkembangan kebijakan perdagangan luar negeri Tiongkok turut mempengaruhi neraca perdagangan Kaltim. Selain Tiongkok, ekspor batubara dengan tujuan negara – negara ASEAN dan Taiwan juga masih tumbuh positif meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan kinerja ekspor lebih lanjut tertahan oleh ekspor batubara ke India yang mengalami penurunan sejalan dengan penurunan kinerja industri manufaktur India. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) India triwulan III 2019 tercatat 51,40, lebih rendah dibandingkan 52,20 triwulan lalu.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.37 Perkembangan Volume Ekspor Batubara Kaltim ke Tiongkok dan ASEAN

Kinerja ekspor luar negeri juga didukung oleh peningkatan volume ekspor CPO ke Tiongkok dan India sebagai negara mitra dagang utama. Ekspor CPO Kaltim ke Tiongkok pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 138,57% (yoy), meningkat dari 62,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan ekspor CPO ke Tiongkok didukung oleh rencana pemerintah Tiongkok untuk menghapuskan bea masuk untuk sejumlah *edible oil* termasuk minyak kelapa sawit. Selain itu, peningkatan konsumsi minyak kelapa sawit merupakan dampak dari pengurangan penggunaan kedelai sebagai pakan ternak. Flu babi yang sedang mewabah di sejumlah wilayah Tiongkok menyebabkan kebutuhan pakan ternak berbahan kedelai menurun. Akibatnya, minyak kedelai yang dihasilkan dari proses penghancuran kedelai menurun sehingga membutuhkan alternatif *edible oil* lainnya. Ekspor CPO juga mengalami peningkatan untuk tujuan India. Pertumbuhan ekspor CPO Kaltim ke India pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 222,10% (yoy), meningkat dari 170,42% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.38). Tensi politik yang meningkat antara India dan Malaysia berdampak pada pemberhentian sementara pembelian CPO asal Malaysia. Hal tersebut dimanfaatkan oleh eksportir Indonesia dengan memenuhi kebutuhan CPO India.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.38 Perkembangan Volume Ekspor CPO Kaltim ke Tiongkok dan India

Sampai dengan September 2019 ekspor Kaltim masih didominasi ekspor bahan bakar mineral dan batubara dengan pangsa sebesar 90,37%. Berdasarkan disagregasinya, bahan bakar mineral non migas masih mendominasi komoditas mineral dan batubara (terutama batubara) dengan pangsa sebesar 86,36% dari total ekspor bahan bakar mineral dan batubara, sementara bahan bakar migas memiliki pangsa 13,64%. Selain bahan bakar mineral, ekspor lemak dan minyak hewani atau nabati (15), termasuk CPO, berkontribusi sebesar 4,56% dari total ekspor Kaltim dan Pupuk (31) berkontribusi sebesar 3,34% (Tabel I.3). Berdasarkan negara tujuannya, sebagian besar ekspor migas Kaltim bertujuan ke negara – negara Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok masing-masing dengan pangsa sebesar 62,87% dan 18,97%. Serupa dengan ekspor migas, ekspor non migas Kaltim juga sebagian besar bertujuan ke negara – negara Asia. Total pengiriman komoditas non migas ke dua negara yaitu Tiongkok dan India melebihi 50% dari keseluruhan ekspor non migas Kaltim (Tabel I.4). Oleh sebab itu, pengaruh kebijakan perdagangan serta *appetite* pembeli dari kedua negara tersebut memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap ekonomi Kaltim.

Tabel I.3 Perkembangan Komoditas Ekspor Kaltim

No	Komoditas Ekspor Utama	Pangsa (%)
1	Mineral dan Batubara (27)	90.38
2	CPO (15)	4.56
3	Pupuk dan Bahan Kimia Anorganik (31) dan (28)	3.34
4	Bahan Kimia Organik (29)	0.50
5	Kayu (44)	0.54
Total 5 Komoditas		99.32

Sumber: BPS, diolah

Tabel I.4 Perkembangan Ekspor Kaltim berdasarkan Negara Tujuan

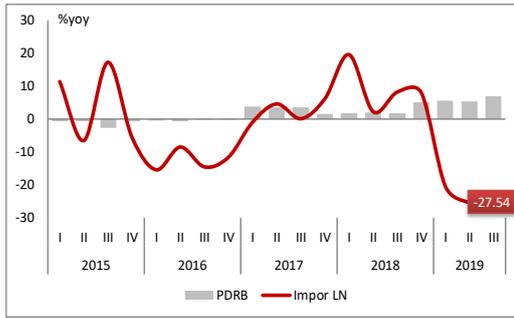
No	Negara Tujuan Ekspor Migas	Pangsa (%)	No	Negara Tujuan Ekspor Non Migas	Pangsa (%)
1	Jepang	62.87	1	Tiongkok	28.36
2	Malaysia	5.45	2	India	22.05
3	Tiongkok	18.97	3	Jepang	8.44
			4	Taiwan	7.66
			5	Filipina	6.69
	Total 3 Negara	87.29		Total 5 Negara	73.20

Sumber: BPS, diolah

Kinerja ekspor luar negeri Kaltim pada triwulan IV 2019 diperkirakan masih tumbuh positif namun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama karena sudah hampir terpenuhinya kuota impor di Tiongkok. Mendekati akhir tahun, permintaan batubara dari Tiongkok diperkirakan akan tertekan karena sudah mendekati kuota impor batubara tahun 2019 yaitu sebesar 281 juta ton. Sampai dengan September 2019, impor batubara Tiongkok telah mencapai 250 juta ton, atau 88,96% dari kuota impor Tiongkok tahun ini. Selain batubara, perlambatan ekspor juga bersumber dari komoditas CPO. Meredanya tensi politik antara India dan Malaysia akan berdampak pada normalisasi permintaan CPO asal India. Kondisi ini tampak dari dimulainya kembali perdagangan CPO antar kedua negara per November 2019.

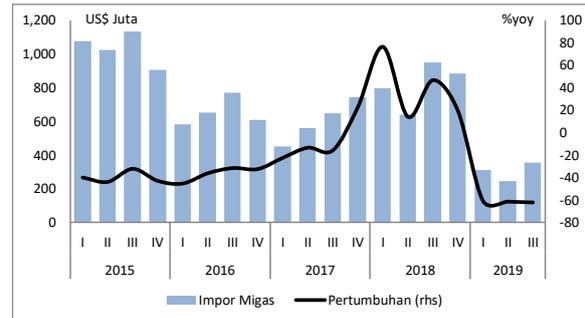
Perdagangan Luar Negeri - Impor

Impor luar negeri Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami penurunan yang lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama karena menurunnya impor migas. Impor luar negeri Kaltim menurun sebesar -27,54% (yoy) di triwulan III 2019, lebih dalam dibandingkan dengan -26,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik I.39). Impor yang lebih rendah bersumber dari menurunnya impor migas dari -61,82% (yoy) triwulan sebelumnya menjadi -62,53% (yoy) (Grafik I.40). Permen ESDM No.42 tahun 2019 yang mengatur tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk keperluan dalam negeri mendorong optimalisasi penggunaan minyak bumi yang diproduksi di Indonesia untuk kebutuhan industri pengolahan minyak. Dengan demikian, kebutuhan minyak impor mengalami penurunan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.39 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Impor Luar Negeri

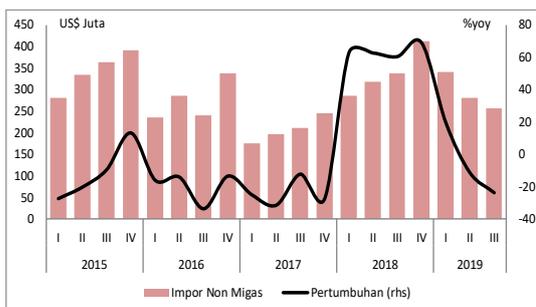


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.40 Perkembangan Impor Migas Kaltim

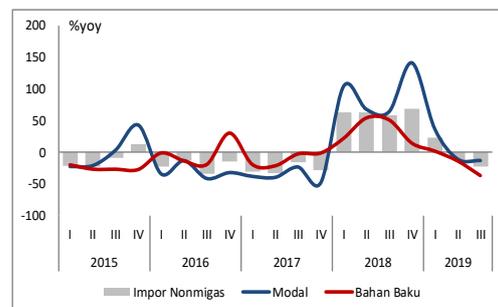
Impor non migas mengalami penurunan untuk semua kelompok impor non migas.

Penurunan impor non migas pada triwulan III 2019 tercatat sebesar -24,02% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar -11,71% (yoy) (Grafik I.41). Berdasarkan data dari Ditjen Bea dan Cukai, penurunan impor non migas terjadi untuk seluruh jenis barang baik barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku. Impor barang modal triwulan III 2019 tercatat mengalami penurunan sebesar -12,77% (yoy), lebih dalam dibandingkan penurunan pada triwulan sebelumnya sebesar -10,42% (yoy). Penurunan impor kelompok barang modal antara lain terjadi pada komoditas reaktor dan boiler yang turun sebesar -33,24% (yoy) pada triwulan III 2019 (Grafik I.42). Selesaiannya beberapa proyek pembangunan infrastruktur berdampak pada penurunan impor besi dan baja. Pada triwulan III 2019, impor besi dan baja mengalami penurunan sebesar -79,25% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.41 Perkembangan Impor Nonmigas Kaltim



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.42 Impor Barang Modal dan Bahan Baku Kaltim

Berdasarkan komoditasnya, impor luar negeri Kaltim masih didominasi oleh bahan bakar mineral. Impor bahan bakar mineral Kaltim mencapai pangsa 51,07% dari total impor luar negeri Kaltim. Selain bahan bakar mineral, impor kelompok barang reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan juga cukup besar dengan pangsa 23,74%. Selain itu, impor juga dilakukan

untuk kelompok barang mesin dan perlengkapan elektrik, kendaraan selain kereta, dan karet dengan pangsa masing-masing sebesar 4,34%, 3,58% dan 2,87% (Tabel I.5). Berdasarkan negaranya, impor migas Kaltim berasal dari Nigeria sebesar 17,38% dari total impor migas Kaltim, yang diikuti oleh impor dari Malaysia dan Singapura dengan pangsa masing-masing sebesar 8,19%, dan 2,27%. Sementara itu, impor non migas Kaltim didominasi oleh impor dari negara Tiongkok dengan pangsa sebesar 26,60% dari total impor non migas. Selain Tiongkok, impor non migas juga berasal dari Singapura dan Amerika Serikat masing-masing dengan pangsa sebesar 12,04% dan 12,53% (Tabel I.6)

Tabel I.5 Komoditas Impor Utama Kaltim

No.	Komoditas Impor Utama	Pangsa (%)
1	Bahan Bakar Mineral (27)	51.07
2	Reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan (84)	23.74
3	Mesin dan Perlengkapan Elektrik (85)	4.34
4	Kendaraan selain Kereta (87)	3.58
5	Karet (40)	2.87
	Total	85.59

Sumber: BPS, diolah

Tabel I.6 Negara Asal Impor Utama Kaltim

No.	Negara Asal Impor Migas Utama	Pangsa (%)	No.	Negara Asal Impor Non-Migas Utama	Pangsa (%)
1	Nigeria	17.38	1	Tiongkok	17.38
2	Malaysia	8.19	2	Singapura	8.19
3	Singapura	2.27	3	Amerika Serikat	2.27
4	Amerika Serikat	0.01	4	Perancis	0.01
5	Tiongkok	0.26	5	Jepang	0.26
	Total	28.12		Total	66.70

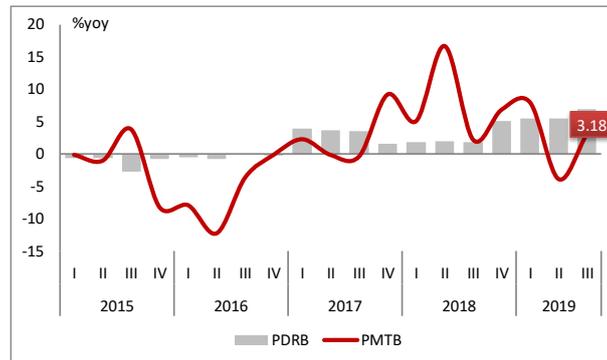
Sumber: BPS, diolah

Impor luar negeri Kaltim pada triwulan IV 2019 diperkirakan tumbuh lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan konstruksi akhir tahun. Berdasarkan pola historisnya, realisasi pembangunan proyek infrastruktur akan meningkat pada triwulan terakhir. Hal ini juga dilakukan untuk memastikan penyerapan anggaran belanja infrastruktur sesuai dengan target. Oleh sebab itu, kebutuhan impor barang-barang modal diperkirakan akan meningkat pada triwulan IV 2019.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Investasi

Kinerja PMTB (investasi) Kaltim triwulan III 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya didorong baik oleh investasi pemerintah maupun swasta. Investasi Kaltim tercatat tumbuh sebesar 3,18% (yoy) pada triwulan III 2019, membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -3,87% (yoy)

(Grafik I.43). Dengan pangsa sebesar 27,59% dari PDRB Kaltim, investasi berkontribusi sebesar 0,81% terhadap ekonomi Kaltim triwulan III 2019.



Sumber: BPS, diolah

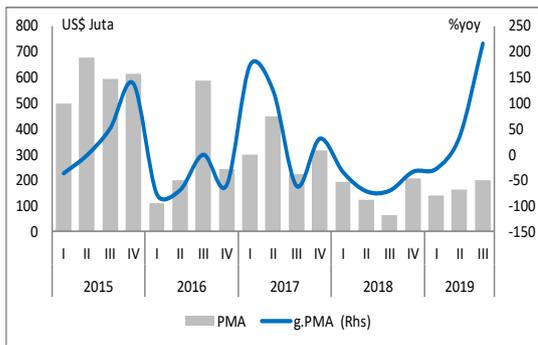
Grafik I.43 Perkembangan Investasi Kaltim

Investasi pemerintah pada triwulan III 2019 meningkat seiring dengan penyerapan anggaran yang lebih optimal. Penyerapan anggaran pada awal tahun 2019 yang relatif lebih lambat menyebabkan kinerja investasi pada semester I 2019 juga melambat. Pada paruh kedua tahun 2019 ini, penyerapan anggaran lebih optimal sehingga kinerja investasi juga lebih tinggi.

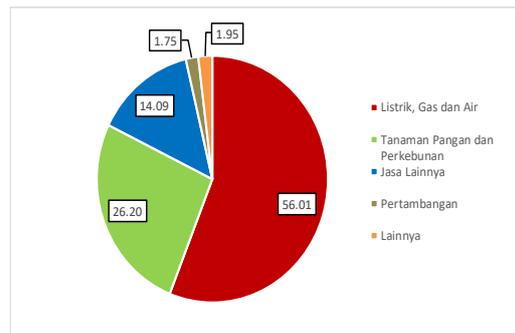
Kinerja investasi swasta pada triwulan III 2019 menunjukkan peningkatan ditopang terutama oleh kenaikan investasi asing. Secara total, investasi swasta Kaltim triwulan III 2019 tercatat Rp7,3 triliun atau tumbuh sebesar 7,91% (yoy). Capaian pertumbuhan investasi triwulan ini lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -40,03% (yoy). Berdasarkan komponen penyusunnya, peningkatan kinerja investasi swasta terutama bersumber dari kenaikan Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara itu, kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga mengalami perbaikan.

Investasi PMA pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh PMA di sektor tersier. Pada triwulan III 2019, PMA Kaltim tercatat sebesar US\$201,19 juta ekuivalen dengan Rp2,8 triliun. Secara tahunan, PMA Kaltim tumbuh sebesar 214,87% (yoy), meningkat dari 33,42% (yoy) pada periode sebelumnya (Grafik I.44). Berdasarkan sektornya, PMA Kaltim terbesar triwulan III 2019 berasal dari sektor utilitas (Listrik, Gas, dan Air) dengan pangsa mencapai 56,01%, diikuti dengan tanaman pangan dan perkebunan sebesar 26,20% (Grafik I.45). Tingginya PMA di sektor utilitas sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim yang masih menunjukkan tren peningkatan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat untuk fasilitas pendukung pun meningkat. Selain itu,

tingginya investasi di sektor utilitas juga sejalan dengan perkembangan pembangunan Kawasan Industri yang sedang berjalan dan membutuhkan dukungan dari sektor tersebut. Adapun pangsa PMA di sektor tanaman pangan dan perkebunan yang cukup tinggi sejalan dengan potensi kelapa sawit di Kaltim yang masih tinggi. Kebijakan *biofuel* menyebabkan potensi penyerapan minyak kelapa sawit domestik untuk kebutuhan tersebut masih tinggi dan menarik bagi investor asing.

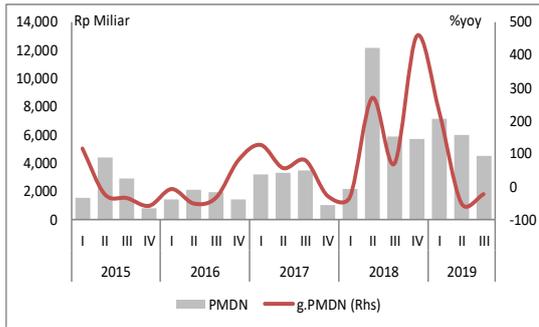


Sumber: DPMPTSP Kaltim, diolah
Grafik 1.44 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim

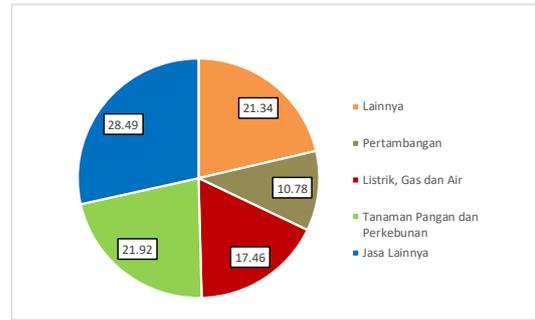


Sumber: DPMPTSP Kaltim, diolah
Grafik 1.45 Penanaman Modal Asing Kaltim Berdasarkan Sektor Ekonomi

Kinerja investasi swasta yang berasal dari dalam negeri pada triwulan III 2019 lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat meningkatnya investasi di sektor industri mineral non logam dan industri kimia serta industri kelapa sawit. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III 2019 masih mengalami penurunan sebesar -23,28% (yoy) namun membaik dibandingkan dengan periode sebelumnya yang turun sebesar -50,80% (yoy) (Grafik 1.46). Perbaikan kinerja PMDN bersumber dari meningkatnya investasi di sektor industri mineral non logam dan industri kimia. Kondisi ini sejalan dengan dimulainya proses perizinan salah satu pabrik kimia di Kota Bontang. Dalam beberapa tahun ke depan, pabrik tersebut diharapkan berpotensi meningkatkan pangsa industri pengolahan di Kaltim. Di samping itu, meskipun industri kelapa sawit mengalami penurunan tetapi investasi dalam negerinya tetap tumbuh positif sebagai respon atas kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah. Berdasarkan sektor ekonomi, PMDN terbesar Kaltim triwulan III 2019 bersumber dari sektor Jasa sebesar 28,49%, diikuti dengan tanaman pangan dan perkebunan sebesar 21,92% (Grafik 1.47).

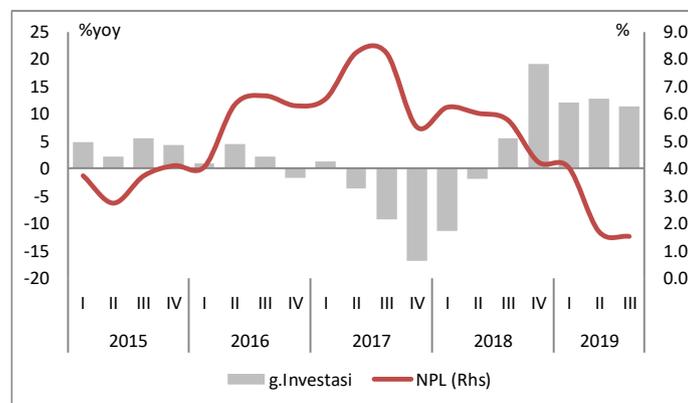


Sumber: DPMPTSP Kaltim, diolah
Grafik 0.46 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim



Sumber: DPMPTSP Kaltim, diolah
Grafik 0.47 Penanaman Modal Dalam Negeri Kaltim Berdasarkan Sektor Ekonomi

Perbaikan kinerja investasi swasta pada triwulan III 2019 didukung oleh peningkatan kinerja kredit investasi Kaltim dengan risiko yang terjaga. Pada triwulan III 2019, kredit investasi Kaltim tumbuh sebesar 11,37% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan penyaluran kredit investasi tersebut dibarengi dengan risiko kredit yang terjaga. Risiko kredit investasi Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 1,53%, masih dibawah *threshold* 5% (Grafik 1.48). Peningkatan kredit investasi juga menjadi salah satu indikator masih baiknya prospek usaha di Kalimantan Timur untuk beberapa tahun ke depan. Tenggat waktu kredit investasi yang berjangka menengah menggambarkan optimisme terhadap ekonomi domestik.



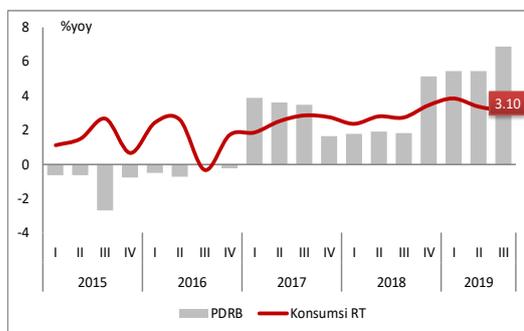
Grafik 1.48 Kredit dan NPL Investasi Kaltim

Kinerja PMTB (Investasi) Kaltim triwulan IV 2019 diperkirakan akan mengalami peningkatan karena penyelesaian beberapa proyek strategis. Penyelesaian beberapa proyek strategis tersebut seperti berlanjutnya pembangunan RDMP RU V serta pemantapan pembangunan konstruksi di Pelabuhan dan KEK Maloy. Selain itu, adanya perbaikan *runway* serta pemasangan lampu di Bandara APT Pranoto Samarinda dan beberapa proyek

pembangunan pabrik pengolahan CPO akan mendorong kinerja investasi Kaltim triwulan IV 2019.

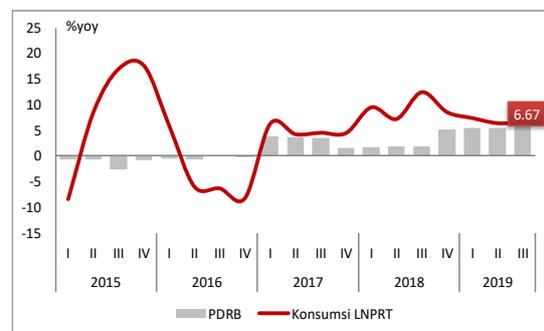
Konsumsi Swasta

Konsumsi swasta pada triwulan III 2019 masih tumbuh positif, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun Lembaga Non-Profit Rumah Tangga (LNPRT), meskipun mengalami perlambatan. Secara total, konsumsi swasta masih tumbuh positif sebesar 3,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perlambatan konsumsi tersebut lebih disebabkan oleh musiman akibat normalisasi konsumsi pasca HBKN Idul Fitri pada triwulan sebelumnya. Konsumsi Rumah Tangga (RT) pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh positif sebesar 3,10% (yoy), lebih rendah dibandingkan konsumsi RT pada triwulan sebelumnya yang mencapai 3,35% (yoy) (Grafik I.49). Pasca HBKN Idul Fitri pada triwulan II 2019, konsumsi RT kembali ke pola normalnya. Namun demikian, perlambatan konsumsi yang lebih dalam tertahan dengan dimulainya tahun ajaran baru sekolah. Meskipun melambat, peran konsumsi RT masih cukup signifikan dalam ekonomi Kaltim pada triwulan III 2019 dengan memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,46%. Di sisi lain, konsumsi LNPRT mengalami peningkatan pertumbuhan dari 6,41% (yoy) pada triwulan II 2019 menjadi 6,67% (yoy). Dengan demikian, konsumsi LNPRT memberikan kontribusi sebesar 0,03% terhadap ekonomi Kaltim pada triwulan III 2019 (Grafik I.50).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.49 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Rumah Tangga

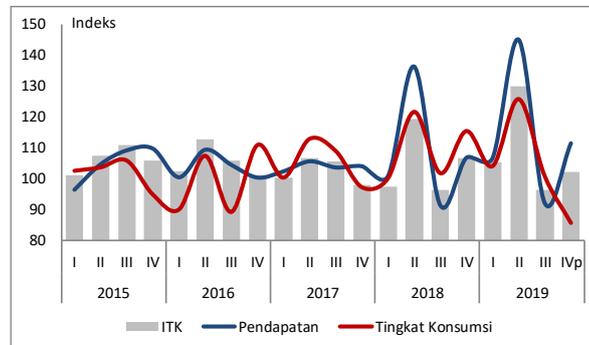


Sumber: BPS, diolah

Grafik I.50 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga

Perlambatan konsumsi rumah tangga Kaltim pada triwulan III 2019 sejalan dengan perkembangan Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang lebih rendah. Pada triwulan III 2019, ITK tercatat sebesar 96,27, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 129,91. Penurunan tersebut disebabkan baik oleh penurunan indeks pendapatan maupun indeks tingkat konsumsi. Indeks pendapatan pada triwulan III 2019 tercatat menurun dari

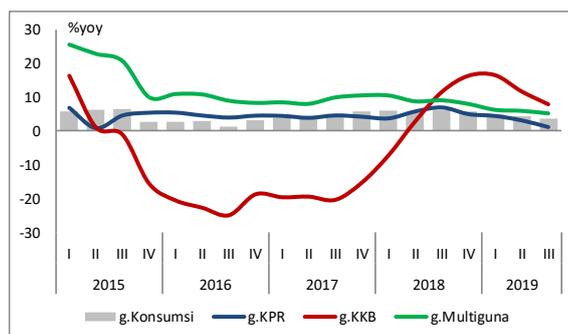
144,94 pada triwulan sebelumnya menjadi 91,06. Penurunan tersebut terutama didorong oleh normalisasi pendapatan setelah pada triwulan II 2019 sebagian besar masyarakat mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Sementara itu, indeks tingkat konsumsi pada triwulan III 2019 menurun dari 125,83 pada triwulan II 2019 menjadi 100,81 (Grafik I.51).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik I.51 Optimisme Konsumen Rumah Tangga Kaltim

Perlambatan kinerja positif konsumsi RT pada triwulan III 2019 sejalan dengan lebih rendahnya penyaluran kredit perbankan, meskipun masih mengalami pertumbuhan yang positif. Kredit konsumsi pada triwulan III 2019 masih tumbuh positif sebesar 3,75% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,34% (yoy). Kinerja positif penyaluran kredit pada triwulan III 2019 didukung baik oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna, maupun Kredit Kendaraan Bermotor (KKB). Pada triwulan III 2019, penyaluran kredit KPR tumbuh sebesar 1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan penyaluran KPR pada triwulan sebelumnya yang mencapai 3,14% (yoy). Penyaluran kredit KKB dan Kredit Multiguna pada triwulan III 2019 juga masih mencatatkan kinerja positif dengan tumbuh masing-masing sebesar 7,79% (yoy) dan 5,16% (yoy), meskipun lebih rendah dibandingkan dengan penyaluran kredit pada triwulan sebelumnya yang masing-masing mencapai 11,57% (yoy) dan 5,92% (yoy) (Grafik I.52). Kinerja penyaluran kredit perbankan yang masih positif tersebut mencerminkan keyakinan perbankan akan kemampuan bayar masyarakat yang masih tinggi.

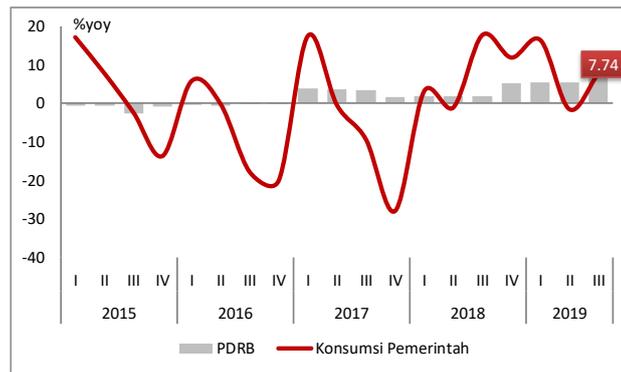


Grafik I.52 Kredit Konsumsi Kaltim

Konsumsi rumah tangga Kaltim pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi. Kebutuhan masyarakat pada periode HBKN Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi. Di samping itu, periode libur sekolah yang dimulai pada pertengahan bulan Desember 2019 juga berpotensi meningkatkan konsumsi rumah tangga Kaltim. Prakiraan kenaikan konsumsi swasta tersebut juga tercermin dari proyeksi ITK yang mengalami peningkatan dari 96,27 pada triwulan III 2019 menjadi 102,05 pada triwulan IV 2019.

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah Kaltim triwulan III 2019 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan kenaikan realisasi belanja pemerintah daerah sebagai upaya percepatan penyerapan anggaran. Kinerja konsumsi pemerintah pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 7,74% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar -1,68% (yoy) (Grafik I.53). Dengan pangsa sebesar 3,68% dari total PDRB Kaltim, konsumsi pemerintah berkontribusi sebesar 0,22% terhadap ekonomi Kaltim. Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah didukung oleh upaya percepatan penyerapan anggaran, khususnya belanja modal. Realisasi belanja pemerintah tahun 2019 sempat terkendala proses lelang yang terlambat. Akibatnya, pembangunan infrastruktur lebih lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini juga sejalan dengan investasi yang tumbuh lebih tinggi di triwulan III 2019. Realisasi belanja Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota sampai dengan September 2019 tercatat Rp19,5 triliun atau 53,90% dari pagu anggaran TA 2019. Secara parsial, penyerapan anggaran untuk triwulan III 2019 tercatat 24,80%, lebih tinggi dibandingkan dengan 19,47% periode sebelumnya (Grafik I.53).



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.53 Pertumbuhan Ekonomi Kaltim – Konsumsi Pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan akan mencapai puncaknya pada triwulan IV 2019. Realisasi penyerapan anggaran yang masih cukup rendah sampai dengan triwulan III 2019 menyebabkan optimalisasi anggaran belanja akan terkonsentrasi pada triwulan akhir 2019. Mundurnya lelang juga menyebabkan sebagian besar pembayaran pekerjaan proyek infrastruktur baru dapat dilaksanakan pada triwulan IV 2019. Di sisi belanja operasional, penyerapan juga diperkirakan meningkat sejalan dengan kegiatan pemerintah daerah seperti rapat koordinasi yang biasanya akan meningkat pada triwulan IV.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya terutama disebabkan peningkatan kinerja ekspor pertambangan dan investasi beberapa proyek strategis. Perbaikan kinerja lapangan usaha pertambangan batubara menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha. Peningkatan kinerja lapangan usaha pertambangan tahun 2019 didorong oleh meningkatnya permintaan ekspor dari negara mitra utama seiring dengan faktor cuaca yang lebih kondusif dan kinerja IUP Kaltim yang lebih produktif dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga akhir triwulan III 2019, realisasi produksi batubara IUP telah mencapai 72,16 juta ton atau secara tahunan mengalami pertumbuhan sebesar 34% (yoy). Di tengah harga komoditas batubara yang kian melambat, beberapa pelaku usaha pertambangan batubara tetap mampu memenuhi kuota produksi di tahun 2019 yang secara tahunan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di samping itu, penambahan kuota nasional dari 489,73 juta ton menjadi 600 juta ton pada pertengahan 2019 menyebabkan kinerja pertambangan batubara Kaltim 2019 juga mengalami peningkatan. Selain dari lapangan usaha pertambangan, pertumbuhan ekonomi Kaltim juga turut didorong dari sektor konstruksi yang bersumber dari percepatan pengerjaan beberapa proyek strategis

di Kaltim antara lain pengerjaan proyek RDMP RU V, penyelesaian pembangunan jalan tol Balikpapan – Samarinda, penyelesaian konstruksi pelabuhan KEK Maloy serta pengerjaan beberapa pembangunan proyek swasta. Hal tersebut tercermin dari angka realisasi investasi kumulatif Kaltim dari bulan Januari hingga bulan September 2019. Realisasi PMDN dan PMA di Kaltim pada periode tersebut mencapai Rp25,21 triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp17,65 triliun dan PMA sebesar Rp7,56 triliun. Kinerja investasi tersebut telah mencapai 69,35% dari target investasi 2019 dengan jumlah sebanyak 1.808 proyek. Di level nasional, selama tahun 2019, realisasi investasi PMDN Kaltim menempati urutan ke-5, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sementara itu, realisasi investasi PMA Kaltim secara nasional berada di urutan ke-12. Secara keseluruhan, ekonomi Kaltim tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh pada rentang 4,87 -5,27% (yoy).

BOKS I.1

“Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur”

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur merupakan momentum menumbuhkan alternatif sumber pertumbuhan baru sekaligus tantangan yang harus dipersiapkan dengan baik. Harapan atas tumbuhnya alternatif sumber pertumbuhan tersebut seiring dengan pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke provinsi Kalimantan Timur. Wilayah seluas 180.000 hektare di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara dipersiapkan untuk IKN yang baru. Lahan tersebut berstatus kawasan hutan dan dikuasai oleh negara sehingga dapat mempermudah pemindahan tersebut. Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggelar Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN yang dilaksanakan sejak 3 Oktober 2019 sampai dengan 27 Desember 2019. Selanjutnya, berdasarkan *timeline* dari Bappenas (Gambar I.2), pada tahun 2020, akan disusun regulasi dan kelembagaan terkait, penyusunan *Master Plan* IKN, serta perencanaan teknis kawasan. Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan sendiri direncanakan akan selesai pada tahun 2024.



Sumber: Bappenas, 2019

Gambar I.2 Timeline Pemindahan IKN

Relokasi IKN tentunya akan diikuti oleh perpindahan penduduk, setidaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarganya serta pelaku ekonomi lainnya akan migrasi dari Jakarta ke IKN

yang baru. Berdasarkan skenario I dari Bappenas, sekitar 1,5 juta penduduk akan migrasi ke IKN baru. Estimasi jumlah penduduk yang migrasi ke IKN baru dapat dilihat pada Gambar I.3

KATEGORI	PENDUDUK	KETERANGAN
 Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif	195.550 orang	Estimasi jumlah penduduk yang beraktivitas di Lembaga negara eksekutif, legislative, dan yudikatif
 POLRI/TNI	25.660 orang	Skenario pindah sebagian
 Anggota Keluarga	884.840 orang	Estimasi setiap pegawai memiliki 4 orang anggota keluarga
 Pelaku Ekonomi	393.950 orang	Estimasi jumlah penduduk yang beraktivitas di sekitar ekonomi pendukung.

Sumber: Bappenas, 2019

Gambar I.3 Estimasi Jumlah Penduduk IKN

Migrasi ke IKN baru tersebut setidaknya dapat mendorong perekonomian yang berasal dari investasi pembangunan IKN baru. Bappenas memperkirakan pembangunan IKN baru akan membutuhkan biaya sekitar Rp486 triliun. Skema utama pembiayaan pembangunan IKN baru tersebut diharapkan berasal dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan swasta. Pemindahan ibu kota juga dilakukan oleh banyak negara lain. Alasan utama relokasi ibu kota tersebut antara lain karena faktor ingin memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dengan pusat kegiatan bisnis. Pemisahan ini diharapkan ibu kota negara yang baru dapat menjadi motor penggerak perekonomian yang baru sehingga terjadi pemerataan perekonomian. Beberapa negara yang telah melakukan relokasi ibu kotanya dirangkum pada Tabel I.7.

Tabel I.7 Pengalaman Beberapa Negara yang Merelokasi Ibu Kota

No	Negara	Kebijakan	Alasan
1	Amerika Serikat	Pada 1790, IKN dipindahkan dari New York ke Washington DC	Pemisahan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat kegiatan bisnis
2	Australia	Pada 1927, IKN dipindahkan dari Melbourne ke Canberra	Pada saat itu, Melbourne mengalami permasalahan kemacetan dan kepadatan penduduk. Selain itu, Melbourne dan Sydney berselisih karena ingin ditunjuk sebagai IKN. Sebagai solusinya, Canberra dipilih sebagai ibu kota

			karena letaknya yang berada di tengah kedua kota tersebut
3	Brasil	Ibu kota negara dipindahkan dari Salvador ke Rio De Janiero. Sejak 1960, ibu kota negara kembali direlokasi ke Brasilia	Relokasi ibu kota dilakukan akibat padatnya penduduk Rio De Janiero. Brasilia juga memiliki lokasi yang lebih strategis karena lokasinya yang lebih dekat ke negara bagian lainnya
4	Kazakhstan	Pada 1997, ibu kota direlokasi dari Almaty ke Astana (sekarang bernama Nur-Sultan)	Almaty dianggap terlalu sempit dan rawan bencana gempa bumi serta lokasinya yang terlalu dekat dengan perbatasan Kazakhstan – Tiongkok
5	Malaysia	Pada 1999, ibu kota sebagai pusat administrasi dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya	Pemindahan dilakukan karena waktu itu Kuala Lumpur terlalu sempit sebagai ibu kota. Meski demikian, masih ada beberapa lembaga administrasi yang tetap berlokasi di Kuala Lumpur
6	Nigeria	Pada 1991, ibu kota negara dipindahkan dari Lagos ke Abuja	Lagos terletak di wilayah pesisir sehingga rentan terhadap serangan laut. Selain itu, Lagos juga sering diklaim sebagai kekuasaan etnik tertentu. Lagos juga merupakan kawasan terpadat di Nigeria dan memiliki iklim yang lembab dan panas. Pemilihan Abuja salah satunya karena dinilai netral dari klaim kekuasaan dan lokasinya yang lebih mudah diakses serta iklimnya yang lebih ramah dan mendukung.
7	Myanmar	Ibu kota dipindahkan dari Yangon ke Naypyidaw pada 6 November 2006 tapi baru disampaikan pemerintah secara resmi pada 27 Maret 2006	Naypyidaw dianggap lebih strategis karena lokasinya yang lebih di tengah

Sumber: *The Indonesian Institute, Wikipedia*

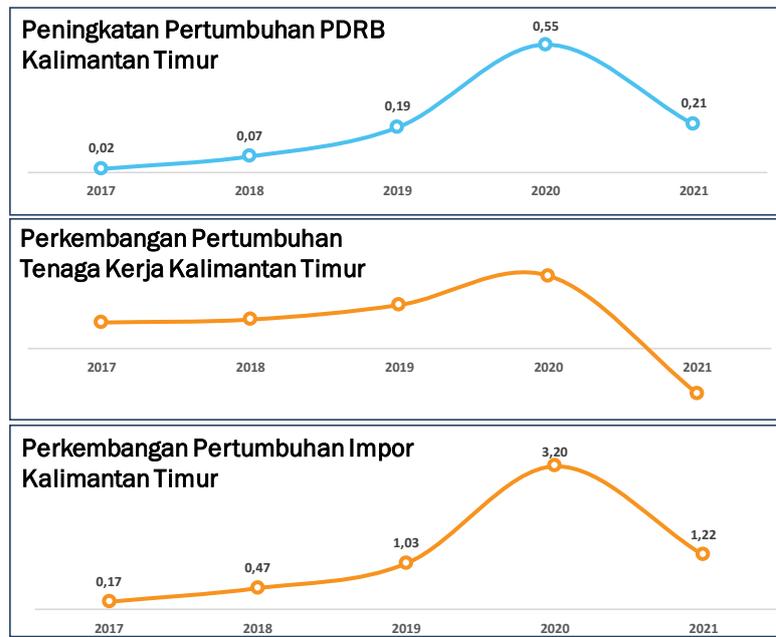
Selain dapat meningkatkan ekonomi di wilayah yang baru, pemindahan IKN juga dapat menjadi alat untuk pemerataan ekonomi di Indonesia. Dengan dipindahkannya IKN ke Provinsi Kalimantan Timur, arus urbanisasi akan terfokus ke IKN baru, sehingga kecenderungan urbanisasi ke pulau Jawa akan menurun. Arus urbanisasi ini akan meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan barang dan jasa di wilayah IKN baru. Pembangunan infrastruktur di IKN baru akan menumbuhkan kesempatan kerja di provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, perpindahan aparaturnegara juga membuka kesempatan kerja yang lebih luas, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan warga IKN baru. Relokasi IKN ke provinsi Kalimantan Timur juga akan meningkatkan konektivitas di tingkat nasional. Secara jarak, IKN baru berada lebih di tengah dibandingkan Jakarta, sehingga secara umum jaraknya relatif lebih mudah dijangkau. Dengan demikian, konektivitas IKN baru ke daerah lain seharusnya lebih dekat sehingga perekonomian akan lebih merata dan tidak terkonsentrasi di pulau Jawa saja. Bappenas dalam studinya pada 2019 menyimpulkan bahwa pemindahan IKN ke lokasi baru di luar pulau Jawa tidak akan berdampak negative terhadap perekonomian nasional. Sebaliknya, pemindahan IKN diperkirakan akan mendongkrak PDB riil nasional sebesar +0,1%. Meskipun tidak terlalu besar untuk skala nasional, namun potensi peningkatan perekonomian di provinsi Kalimantan Timur kian terbuka lebar dengan adanya

relokasi IKN ini. Kenaikan PDB tersebut diantaranya akibat kegiatan perdagangan antar daerah yang lebih bergairah. Pemandahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur akan lebih mendorong perdagangan karena jaraknya yang lebih mudah. Selain itu, relokasi IKN ke provinsi yang baru akan mendorong kegiatan investasi. Konstruksi pembangunan IKN yang baru akan mendatangkan investasi, termasuk potensi munculnya kawasan industri yang baru. Di sisi lain, migrasi penduduk ke iKN baru juga akan mendorong kenaikan investasi di provinsi Kalimantan Timur, termasuk di bidang jasa. Sementara itu, pengaruh pemindahan IKN terhadap inflasi nasional juga tidak signifikan. Relokasi IKN akan mendorong kenaikan tekanan dari sisi permintaan akibat semakin banyaknya jumlah penduduk, namun pengaruhnya terhadap inflasi nasional tidak signifikan. Kenaikan inflasi akibat relokasi IKN ini diperkirakan hanya 0,2%, relatif kecil untuk skala nasional. Pengaruh yang lebih besar akan lebih terasa di wilayah IKN baru. Namun pengaruh ini juga akan menjadi tidak signifikan apabila wilayahnya memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik dan sektor produksi yang relatif beragam.

Namun di sisi lain masih terdapat beberapa tantangan dari pemindahan IKN tersebut. Berdasarkan studi yang dilakukan INDEF (2019), menyebutkan bahwa pemindahan IKN ke provinsi Kalimantan Timur, secara umum akan menstimulus turunnya jumlah output sektoral yang terjadi hampir di semua sektor atau industri baik di tingkat provinsi maupun nasional. Penurunan output tersebut terutama terjadi di sektor *tradable-good* dan berbasis sumber daya alam. Akibatnya, secara umum harga-harga komoditas akan meningkat dan penyerapan jumlah tenaga kerja secara umum juga akan turun. INDEF (2019) juga menyimpulkan bahwa pemindahan ibu kota hanya menguntungkan untuk provinsi tujuan saja dan belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi tujuan. Namun demikian, kenaikan pertumbuhan PDRB di wilayah Kalimantan akibat relokasi IKN ini, nilainya sangat kecil dan tidak signifikan. Bahkan, konektivitas yang belum terbangun antara provinsi Kalimantan Timur dengan provinsi lain mendorong kerugian bagi provinsi lainnya karena harus menyiapkan terlebih dahulu infrastruktur pendukung konektivitasnya.

Berdasarkan hal tersebut, proyek infrastruktur penunjang konektivitas IKN harus dipersiapkan secara matang guna menyambut momentum pertumbuhan ekonomi. Salah satu proyek infrastruktur penunjang konektivitas IKN adalah Jembatan Pulau Balang. Proyek yang bernilai Rp1,4 triliun dengan panjang total mencapai 804 meter tersebut saat ini sudah terbangun badan jalan dan bentang pendek, sehingga tinggal membangun bentang Panjang

dan jalan pendekatnya. Pembangunan Jembatan Pulau Balang yang direncanakan selesai pada tahun 2021 memberikan dampak positif pada PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Simulasi yang dilakukan dengan menggunakan Gempack Indoterm yang berbasis IRIO 2010 menunjukkan bahwa proyek tersebut dapat meningkatkan PDRB provinsi Kalimantan Timur hingga 0,21%.



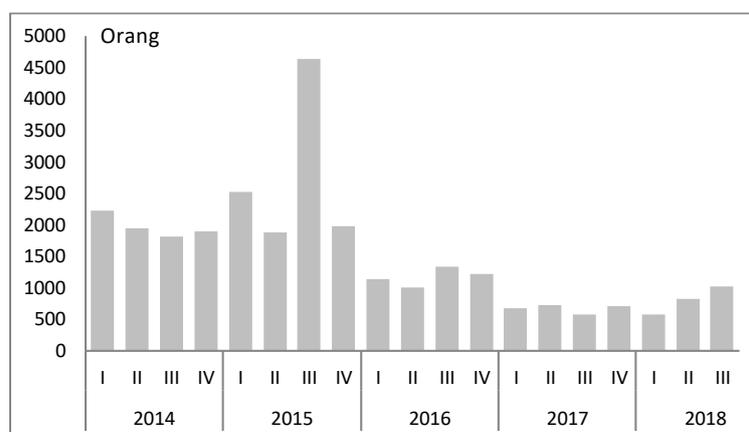
Grafik 1.54 Simulasi Dampak Proyek Jembatan Pulau Balang

Analisis terhadap salah satu proyek konektivitas IKN baru menunjukkan bahwa secara umum relokasi IKN dapat mendongkrak perekonomian provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif untuk mensimulasikan dampak IKN terhadap perekonomian nasional, khususnya terhadap perekonomian provinsi Kalimantan Timur. Studi yang lebih mikro dengan menghitung dampak pembangunan IKN serta proyek pembangunan infrastruktur pendukung dan proyek konektivitasnya perlu dilakukan guna melengkapi kajian yang telah dilakukan oleh Bappenas dan INDEF.

BOKS I.2

“Roadmap Pembangunan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur”

Sektor Pariwisata Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian Kalimantan Timur ditengah dominasi sektor primer yang terpapar ketidakpastian global. Pemerintah Pusat sebagai salah satu *leading sector* dalam RPJMN 2015-2019 bersama dengan sektor infrastruktur, maritim, energi, dan pangan. Optimalisasi potensi sektor pariwisata yang dimiliki Indonesia mampu membantu mengurangi defisit neraca transaksi berjalan melalui penerimaan devisa yang meningkat seiring pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara. Lebih lanjut, sektor pariwisata dapat menjadi alternatif sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang selama ini masih bergantung pada lapangan usaha pertambangan. Ketergantungan terhadap sektor usaha pertambangan menyebabkan perekonomian Kaltim rentan terhadap volatilitas eksternal, terutama dari pergerakan harga batubara di pasar internasional.



Sumber: BPS, diolah

Grafik I.55 Jumlah Wisatawan Mancanegara di Kalimantan Timur

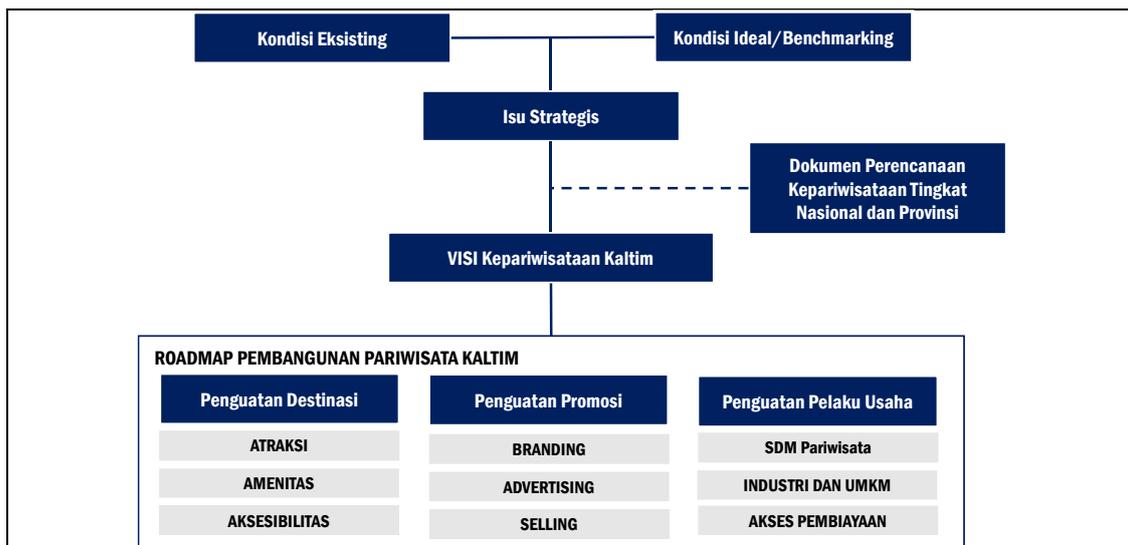
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 1.009 kunjungan atau mengalami kenaikan sebesar 190 kunjungan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dengan demikian, jumlah kumulatif wisman yang berkunjung ke Kalimantan Timur pada bulan Januari hingga September 2019 mencapai 2.390 kunjungan. Dengan

potensi wisata Kalimantan Timur yang cukup tinggi, jumlah kunjungan wisman masih dapat dioptimalkan. Sesuai dengan PP no. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, terdapat 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Kalimantan Timur, yakni KSPN Derawan Sangalaki, KSPN Kota Bangun-Tanjung Isuy, dan KSPN Long Bagun dan sekitarnya. Tiga KSPN yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata ini dapat dijadikan prioritas pembangunan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur sehingga pembangunannya dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dan efektif.



Gambar 1.4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Kalimantan Timur

Namun kondisi *existing* pariwisata di Kalimantan Timur masih menghadapi beberapa tantangan dan isu strategis yang perlu menjadi fokus pembangunan. Isu strategis inilah yang perlu diselesaikan melalui dokumen perencanaan kepariwisataan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional untuk kemudian diturunkan menjadi visi kepariwisataan Kalimantan Timur. Sesuai dengan Perda No. 14 tahun 2008 tentang Ripparprov Kalimantan Timur, visi kepariwisataan Kaltim yakni untuk mewujudkan kepariwisataan Kalimantan Timur menjadi industri pariwisata yang berbasis pada masyarakat, alam dan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah yang berwawasan lingkungan. Guna mencapai visi tersebut, perlu penguatan dari tiga pilar, yakni penguatan destinasi, penguatan promosi, dan penguatan pelaku usaha.



Gambar 1.5 Alur Pikir dan *Roadmap* Pembangunan Pariwisata Kaltim

Penguatan Destinasi

Pengembangan destinasi pariwisata dapat dilakukan menggunakan konsep 3A, yakni **Atraksi** melalui diversifikasi aktivitas wisata (alam, budaya, buatan), pengembangan produk dan interpretasi daya tarik wisata, serta penguatan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, **Amenitas** meliputi pemenuhan fasilitas dasar dan fasilitas pendukung pariwisata, termasuk bagaimana menarik minat investor di bidang pariwisata. **Aksesibilitas**, peningkatan konektivitas menuju destinasi wisata dengan memperhatikan kualitas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan sarana transportasi darat, sungai, dan laut.

Penguatan Promosi

Setelah pengembangan 3A dilaksanakan sehingga destinasi siap dikunjungi oleh wisatawan, selanjutnya perlu dilakukan penguatan promosi melalui kegiatan *branding*, *advertising*, dan *selling*. **Branding** merupakan pemberian identitas terhadap suatu destinasi, membedakan suatu destinasi dengan destinasi lainnya sehingga menarik minat wisatawan untuk datang. **Advertising**, promosi destinasi wisata sesuai dengan *branding* yang dilakukan secara masif dengan memanfaatkan media, baik cetak maupun elektronik. Kegiatan ini akan meningkatkan *awareness* serta popularitas destinasi, destinasi yang populer memiliki kemungkinan lebih besar untuk dipilih wisatawan sebagai destinasi wisata dibandingkan dengan destinasi yang kurang populer. **Selling**, merupakan kegiatan promosi yang sudah

fokus atau mengarah kepada satu pasar tertentu, misalnya berpartisipasi dalam pameran wisata (*travel fair*), *sales mission*, atau kerja sama promosi terpadu dengan *airlines*.

Implementasi strategi pemasaran dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan “DOT”, yakni *destination* (destinasi), *origin* (asal), dan *time* (waktu). Pendekatan “DOT” dimaksudkan agar kegiatan promosi yang dilakukan lebih efektif dan efisien karena langsung menyangkut pada segmen tertentu sesuai dengan profil wisatawan. **Destination** atau destinasi yakni melakukan prioritas promosi di destinasi yang paling diminati oleh wisatawan tersebut. **Origin** atau asal merupakan profil wisatawan meliputi usia, jenis kelamin, asal negara wisatawan tersebut serta mencakup bagaimana pola *spending* wisatawan. Paket-paket wisata yang nantinya dibuat harus disesuaikan dengan profil wisatawan. **Time** atau waktu, pola waktu kunjungan wisatawan (*seasonal*) misalnya pada hari libur musim panas, tahun baru dan sebagainya harus dipertimbangkan dalam melakukan promosi wisata.

Penguatan Pelaku Usaha

Pariwisata merupakan sektor padat karya, mampu menyerap banyak tenaga kerja di berbagai bidang. Kemajuan sektor pariwisata perlu disertai peningkatan kualitas SDM, khususnya yang mendukung pariwisata, seperti pegawai hotel, *tour guide* maupun penyedia jasa lainnya. Peningkatan kualitas dapat dilakukan secara berkala dan terukur melalui pelatihan dengan standar internasional sekaligus sertifikasi profesi. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengembangan UMKM yang mendukung kegiatan pariwisata disertai dengan sertifikasi usaha atau industri dan program yang mendorong peningkatan akses pembiayaan oleh masyarakat.

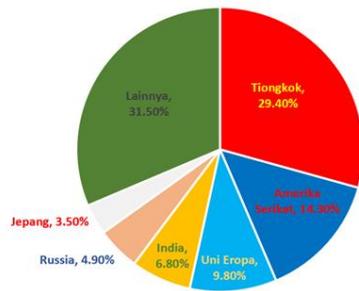
BOKS I.3

“Kebijakan Ekonomi Hijau Tiongkok”

Kebijakan ekonomi hijau Tiongkok berpotensi membuat ekspor batubara Kaltim kedepan akan mengalami tekanan. Tiongkok dikenal sebagai produser, konsumen dan importir batubara terbesar di dunia. Dinamika batubara Tiongkok, terutama dalam hal kebijakan yang berdampak pada permintaan impor batubara, selalu menjadi perhatian serius pemerintah dan pelaku usaha tambang di Indonesia terutama Kalimantan Timur. Kebijakan pemerintah Tiongkok tentang kuota impor batubara sejak tahun 2017 menjadi isu hangat sektor batubara yang mana kebijakan ini berakar dari revolusi bauran energi yang merupakan bagian dari kebijakan besar ekonomi hijau atau *Green Economy* Pemerintah Tiongkok. Tujuan dari revolusi ini adalah menyelaraskan kebutuhan energi untuk perekonomian dengan kewajiban sosial dan lingkungan di samping menjalankan komitmen internasional atas ratifikasi pakta iklim *The Paris Agreement* oleh pemerintah Tiongkok pada bulan September 2016. Negara-negara anggota yang tergabung dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) merumuskan kerangka kerja yang mengikat dengan tujuan membatasi kenaikan suhu global maksimum 2 derajat Celcius hingga tahun 2100. Pembatasan ini dilakukan melalui usaha-usaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) oleh masing-masing negara yang meratifikasi perjanjian tersebut. Tiongkok merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar dengan persentase 29% dari total emisi pada 2017 (Gambar I.6) yang diratifikasi dalam perjanjian iklim Paris. Oleh karena itu, dukungan pemerintah Tiongkok berupa tindakan-tindakan pengurangan emisi GRK melalui kebijakan operasional dan *financing* sangat krusial bagi mitigasi perubahan iklim dan *role-modelling* oleh negara-negara anggota lainnya.

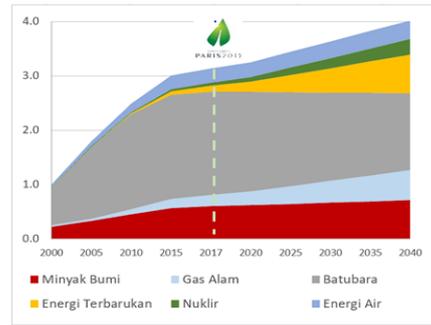
Implementasi Tiongkok dalam mewujudkan ekonomi hijau dilakukan dalam bentuk pengalihan penggunaan energi. Dalam inisiatif terbaru, *The Thirteenth Five-Year Plan* (FYP) atau Rencana Lima Tahunan 2015-2020 Ketigabelas mengenai pengembangan ekonomi dan sosial, pemerintah Tiongkok merumuskan area fokus perbaikan kualitas lingkungan dan ekosistem sebagai salah satu strategi utama pengembangan ekonomi 2015-2020. Untuk itu, pemerintah Tiongkok mengubah struktur konsumsi sektor energi dengan melakukan transisi

dari energi berbasis karbon ke energi terbarukan non-karbon (Gambar I.7). Dalam



Sumber: The Publications Office of European Union

Gambar I.6 Emisi CO₂ Global secara Geografis pada Tahun 2017



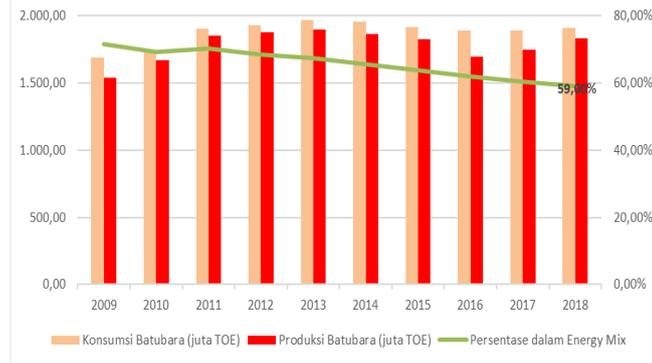
Sumber: BP Statistical Review

Gambar I.7 Konsumsi Energi Primer Tiongkok 2000-2040.

implementasi Rencana Lima Tahunan ke-12, proporsi energi non-fossil telah berhasil mencapai angka yang lebih tinggi, yakni 12% dari target yang ditetapkan sebesar 11,4%. Selanjutnya pada periode 2015-2020 dalam rencana ke-13, beberapa usaha terkait *energy mix* antara lain:

1. Pengembangan *hydropower* dengan konservasi ekologi. Direncanakan konstruksi pembangkit sebesar 60 GW di wilayah timur laut.
2. Pengembangan teknologi *windpower* dan *photovoltaic*. Pembangunan zona demonstrasi energi terintegrasi baru.
3. Pembangunan rantai pembangkit listrik tenaga nuklir *coastal*.
4. Akselerasi pengembangan biomassa, energi geothermal dan eksploitasi energi pasang surut air laut pada wilayah pesisir.
5. Perbaikan kebijakan terkait EBTK.
6. Aplikasi teknologi pembangkitan *ultra-low emission* dan efisien energi untuk pembangkit tenaga batubara. *Upgrading action plan* untuk pembangkit tenaga batubara *existing*.

Lebih lanjut, bauran energi nasional menetapkan proporsi batubara tidak lebih dari 58%, berkurang sebesar 6% dari 64% total konsumsi energi nasional pada tahun 2015. (NRDC, 2017). Konsumsi rata-rata batubara per Kwh dijaga di bawah 310 gram untuk pembangkit *existing* dan 300 gram untuk pembangkit baru. Pemerintah telah melakukan transformasi di berbagai industri-industri konsumen batubara seperti baja, semen dan pembangkit dan promosi menggunakan LNG untuk menggantikan batubara pada kota-kota besar sehingga meningkatkan konsumsi LNG sebesar 45 milyar meter kubik dan mengeliminasi 189.000 ton kapasitas boiler tenaga batubara.



Sumber: BP Statistical Review

Gambar I.8 Konsumsi, Produksi, dan Proporsi Batubara dalam Energy Mix Tiongkok

Dampak dari salah satu produk kebijakan *green economy* yang *impactful* bagi negara-negara mitra dagang adalah pembatasan kuota impor batubara. Kebijakan ini selain bertujuan untuk mengubah pola konsumsi energi, juga turut memberikan suplementasi dan proteksi pada bisnis batubara domestik, memastikan volume impor pada batas yang wajar dan menjaga neraca perdagangan antara Tiongkok dan negara pengekspor. Dalam membatasi kuota, pemerintah Tiongkok mengambil langkah penerapan *tariff*, pengetatan persyaratan kualitas, *clearance procedure control* dan pelarangan kapal berlabuh ke pelabuhan-pelabuhan peti kemas. Pencapaian dari kebijakan ini dan implementasi FYP ke-13 pada tahun 2018 menunjukkan konsumsi batubara Tiongkok telah berhasil turun tipis menjadi 59%. Batas atas kuota batubara impor atau *import cap* untuk tahun 2019 ditetapkan sebesar total volume impor batubara tahun 2018, yakni sebesar 280,78 juta metrik ton (MT). Berdasarkan data yang diperoleh dari IHS Energy, sebanyak 230,61 juta MT dari *import cap* 2019 tersebut telah terpenuhi pada bulan November. Analisis dan pelaku usaha sektor batubara memperkirakan kuota akan tercapai penuh pada bulan November 2019. Sehubungan dengan terpenuhinya kuota, laporan McCloskey terkait usaha batubara mencatat terjadinya intervensi oleh otoritas pelabuhan dan bea cukai dalam *unloading* batubara di wilayah Tiongkok Selatan pada bulan November 2019. Otoritas tidak memberikan izin bongkar muat kepada kapal pengangkut batubara asing dan melarang semua pengiriman batubara. Oleh karenanya, kapal pengiriman yang tiba setelah berlakunya larangan menanggung kerugian akibat biaya kelebihan waktu berlabuh atau *demurrage* sebesar US\$16.000 per hari rata-rata untuk kapal dengan kapasitas 80.000 ton.

II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kalimantan Timur triwulan III 2019 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dari sisi pendapatan terjadi seiring dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, peningkatan kinerja keuangan pemerintah dari sisi belanja bersumber dari peningkatan realisasi belanja operasional Pemerintah Provinsi dan peningkatan penyerapan anggaran di tingkat Kabupaten/Kota.

2.1 Gambaran Umum

Sampai dengan triwulan III 2019, kinerja keuangan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami peningkatan baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, realisasi pendapatan keuangan daerah Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp24,90 triliun atau 69,63% dari total anggaran pendapatan Kaltim tahun 2019. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp20,53 triliun atau 63,42% dari total anggaran pendapatan Kaltim tahun 2018. Peningkatan realisasi pendapatan bersumber dari naiknya kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim. Sementara itu, realisasi belanja keuangan daerah Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 mencapai Rp25,90 triliun atau 54,90% dari total anggaran belanja tahun 2019. Realisasi belanja keuangan daerah Kaltim triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp17,43 triliun atau 50,77% dari total pagu anggaran 2018. Peningkatan belanja bersumber dari peningkatan belanja APBD di tingkat Kab/Kota serta peningkatan serapan anggaran operasional pada APBD tingkat provinsi (Tabel II.1).

Tabel II.1 Perkembangan Keuangan Daerah Kaltim Triwulan III 2018 dan 2019

Keterangan	Anggaran 2018	Realisasi s.d. Triwulan III 2018		Anggaran 2019	Realisasi s.d. Triwulan III 2019	
	Rp Juta	Rp Juta	%	Rp Juta	Rp Juta	%
Pendapatan						
APBD - Provinsi	9,591.24	6,855.74	71.48	10,549.62	7,753.70	73.50
APBD - Kab/Kota	22,782.37	13,675.38	60.03	25,209.56	17,146.80	68.02
APBN - Provinsi & Kab/Kota						
TOTAL PENDAPATAN	32,373.61	20,531.12	63.42	35,759.19	24,900.50	69.63
Belanja						
APBD - Provinsi	10,128.81	5,777	57.04	10,669.67	5,857.11	54.89
APBD - Kab/Kota	25,382.94	11,829.67	46.60	25,527.63	13,654.08	53.49
APBN - Provinsi & Kab/Kota	8,695.77	4,839.30	55.65	10,989.67	6,393.60	58.18
TOTAL BELANJA	44,207.52	22,446.27	50.77	47,186.97	25,904.80	54.90

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim

2.2 APBD Pemerintah Provinsi

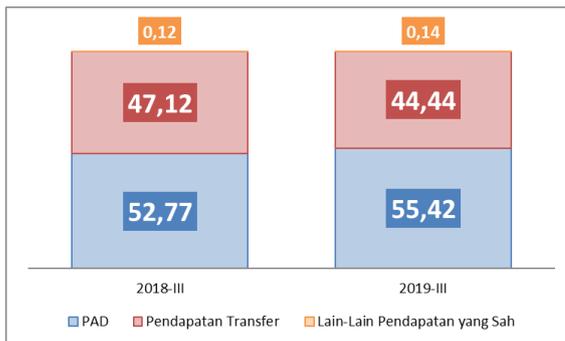
Realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya³. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD provinsi Kaltim, realisasi pendapatan triwulan III tahun 2019 mencapai Rp7,75 triliun atau 73,5% dari target penerimaan tahun 2019. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi pendapatan pada triwulan III tahun 2019 mengalami peningkatan 13,10% (yoy). Berdasarkan disagregasinya, APBD sisi pendapatan Pemprov Kaltim didominasi oleh Pendapatan Asli Saerah (PAD) dengan pangsa 55,42% disusul oleh pendapatan transfer dengan pangsa 44,44% terhadap realisasi pendapatan triwulan III 2019 (Grafik II.1). Faktor utama meningkatnya pendapatan daerah Pemprov Kaltim pada triwulan III tahun 2019 adalah kenaikan PAD yang tercatat meningkat sebesar 18,79% (yoy) dimana peningkatan terjadi di seluruh sub-komponen PAD (Tabel II.2). Berdasarkan pangasanya, penerimaan pajak masih memberikan kontribusi terbesar untuk realisasi PAD Pemprov Kaltim pada triwulan III 2019 yaitu sebesar 78,8% (Grafik II.2).

Tabel II.2 Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)

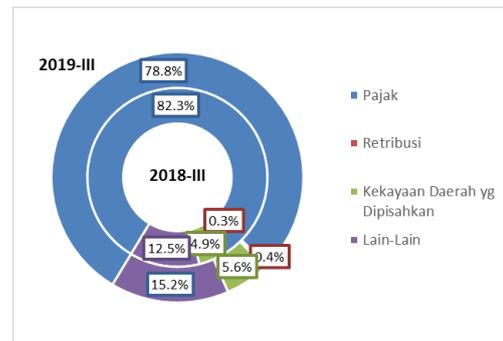
	2018			2019			Selisih	Growth
	APBD-P	Realisasi Tw-III		APBD	Realisasi Tw-III			
	Rp juta	Rp juta	%	Rp Juta	Rp juta	%		
PENDAPATAN (I+II+III)	9.591.235	6.855.742	71,48	10.549.624	7.753.702	73,50	897.960	13,10
I. PAD	5.129.057	3.617.484	70,53	5.452.964	4.297.051	78,80	679.566	18,79
Pajak daerah	4.020.200	2.975.804	74,02	4.420.000	3.385.317	76,59	409.513	13,76
Retribusi daerah	19.956	11.724	58,75	28.617	16.418	57,37	4.694	40,04
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	195.941	176.454	90,05	224.524	242.209	107,88	65.755	37,26
Lain-lain PAD yang sah	892.960	453.502	50,79	779.824	653.106	83,75	199.604	44,01
II. Pendapatan Transfer (a+b)	4.424.922	3.230.245	73,00	5.069.716	3.445.638	67,97	215.392	6,67
a. Dana Perimbangan	4.424.922	3.230.245	73,00	5.059.833	3.435.754	67,90	205.509	6,36
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.539.449	1.715.088	67,54	3.038.477	1.936.762	63,74	221.674	12,92
Dana alokasi umum	767.682	639.735	83,33	815.694	679.745	83,33	40.009	6,25
Dana alokasi khusus	1.117.791	875.422	78,32	1.205.662	819.248	67,95	(56.175)	-6,42
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	9.883	9.883	100,00	9.883	0,00
Dana Penyesuaian	-	-	-	9.883	9.883	100,00	9.883	0,00
III. Lain-lain Pendapatan yang sah	37.256	8.012	21,51	26.944	11.013	40,88	3.001	37,46
Pendapatan Hibah	3.072	8.012	260,81	12.272	10.996	89,60	2.984	37,24
Pendapatan Lainnya	34.184	-	-	14.672	17	0,12	17	0,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

³ Asesmen realisasi triwulan III fiskal dalam bab ini merupakan realisasi kumulatif dari triwulan I hingga triwulan III

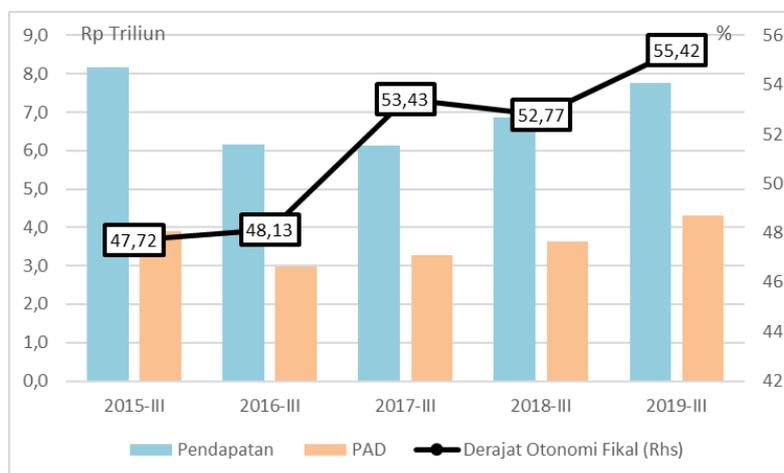


Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim
Grafik II.1 Komponen Realisasi Pendapatan APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim
Grafik II.2 Komponen Realisasi PAD APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019

Tingkat kemandirian fiskal Pemprov Kaltim yang tercermin dari **Derajat Otonomi Fiskal (DOF)** triwulan III 2019 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. DOF Provinsi Kaltim sampai dengan triwulan III 2019 tercatat 55,42%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2018 yang tercatat 52,77% (Grafik II.3). DOF merupakan indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam mencari pendapatan yang bersumber dari daerahnya masing-masing sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan PAD Pemprov Kaltim pada triwulan III 2019.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah
Grafik II.3 Derajat Otonomi Fiskal Pemprov Kaltim

Realisasi Belanja

Secara nominal, penyerapan anggaran belanja Pemprov Kaltim triwulan III 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemprov Kaltim triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp5,86 triliun, meningkat sebesar 1,38% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai

Rp5,78 triliun. Namun demikian, realisasi belanja pada triwulan III 2019 baru mencapai 54,89% dari pagu anggaran tahun 2019, lebih rendah daripada realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 57,04% dari pagu anggaran tahun 2018 (Tabel II.3).

Tabel II.3 Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)

	2018			2019			Selisih	Growth
	APBD-P	Realisasi Tw-III		APBD	Realisasi Tw-III			
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%		
BELANJA (I+II+III+IV)	10.128.810	5.777.309	57,04	10.669.670	5.857.110	54,89	79.800	1,38
I. Belanja Operasional	5.639.965	3.196.881	56,68	6.634.966	4.006.176	60,38	809.295	25,32
Belanja Pegawai	1.707.144	1.234.840	72,33	2.067.437	1.374.794	66,50	139.955	11,33
Belanja Barang	2.155.013	835.394	38,77	2.419.924	1.226.321	50,68	390.927	46,80
Belanja Hibah	1.077.644	820.360	76,13	765.271	553.922	72,38	(266.437)	-32,48
Belanja Bantuan sosial	5.809	-	-	9.775	-	-	-	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	694.354	306.287	44,11	1.372.559	851.138	62,01	544.851	177,89
II. Belanja Modal	2.071.097	971.990	46,93	1.430.451	345.184	24,13	(626.807)	-64,49
Belanja Tanah	1.449	1.140	78,71	350	-	-	(1.140)	-100,00
Belanja Peralatan Mesin	336.129	62.706	18,66	299.542	87.105	29,08	24.398	38,91
Belanja Bangunan dan Gedung	148.253	50.115	33,80	402.568	91.703	22,78	41.588	82,98
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.552.959	852.042	54,87	696.365	154.252	22,15	(697.790)	-81,90
Belanja Aset Tetap Lainnya	32.307	5.986	18,53	31.626	12.123	38,33	6.137	102,51
III. Belanja tidak terduga	6.334	394	6,22	25.000	26	0,10	(368)	-93,45
Belanja tidak terduga	6.334	394	6,22	25.000	26	0,10	(368)	-93,45
IV. Transfer	2.411.414	1.608.044	66,68	2.579.253	1.505.724	58,38	(102.320)	-6,36
Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota/Desa	2.411.414	1.608.044	66,68	2.579.253	1.505.724	58,38	(102.320)	-6,36

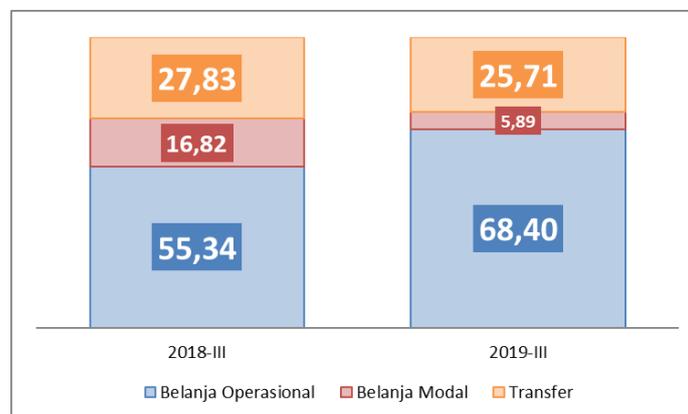
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Persentase realisasi belanja Pemprov Kaltim triwulan III 2019 yang lebih rendah daripada triwulan yang sama tahun sebelumnya disebabkan oleh penyerapan belanja modal yang masih rendah. Realisasi belanja modal pada triwulan III tahun 2019 menurun 64,49% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi belanja modal pada triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp345,18 miliar atau 24,13% dari pagu anggaran belanja modal tahun 2019. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi belanja modal pada periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp971,99 miliar atau 46,93% dari pagu anggaran belanja modal tahun 2018. Penurunan belanja modal salah satunya dipengaruhi oleh belum selesainya paket lelang untuk beberapa proyek. Selain itu, pagu anggaran belanja modal pada triwulan III 2019 juga mengalami penurunan sebesar 30,93% di mana penurunan terbesar terjadi pada anggaran belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp856,59 miliar yang diantaranya dikarenakan sudah adanya *sharing* pembiayaan dengan APBN untuk Proyek Strategis Nasional.

Penurunan realisasi belanja lebih lanjut tertahan oleh kenaikan realisasi belanja operasional yang mengalami peningkatan pada triwulan III 2019. Realisasi belanja operasional pemerintah daerah Kaltim pada triwulan III tahun 2019 tercatat sebesar Rp4,01 triliun atau 60,38% dari pagu anggaran belanja operasional tahun 2019. Realisasi tersebut baik secara nominal maupun persentase dibandingkan dengan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar

Rp3,20 triliun. Peningkatan belanja operasional pada triwulan III 2019 disebabkan oleh meningkatnya realisasi sub-komponen belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan keuangan. Sementara itu, realisasi belanja hibah pada triwulan III 2019 menurun seiring dengan penurunan pagu anggaran untuk belanja hibah sebesar 28,99% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pangsa belanja operasional Pemprov Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pangsa komponen belanja operasional Pemprov Kaltim naik dari 55,34% pada triwulan III 2018 menjadi 68,40% pada triwulan III tahun 2019. Peningkatan dominasi belanja operasional ini sejalan dengan peningkatan pagu anggaran belanja operasional dan penurunan pagu anggaran belanja modal dari tahun sebelumnya. Berdasarkan kontribusinya, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kaltim pada triwulan III 2019 didominasi oleh realisasi belanja operasional dengan pangsa 68,40% dari keseluruhan realisasi belanja operasional. Komponen belanja terbesar kedua adalah transfer ke kabupaten/kota/desa dengan pangsa 25,71% dan komponen belanja terakhir adalah belanja modal yang mencapai pangsa sebesar 5,89%. Sementara itu, proporsi realisasi komponen belanja modal dan transfer pada triwulan III 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan III 2018 (Grafik II.4).



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Grafik II.4 **Komponen Realisasi Belanja APBD Pemprov Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019**

2.3 APBD Kabupaten/Kota

Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan kabupaten/kota di Kaltim hingga triwulan III 2019 mengalami kenaikan. Sampai dengan triwulan III 2019, realisasi pendapatan 10 kabupaten/kota di wilayah

Kaltim telah mencapai Rp17,15 triliun atau sebesar 68,02% dari target pendapatan tahun 2019. Capaian tersebut meningkat sebesar 25,38% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp13,68 triliun atau 60,03% dari target pendapatan tahun 2018 (Tabel II.4). Peningkatan realisasi pendapatan triwulan III 2019 dialami oleh seluruh kabupaten/kota di wilayah Kaltim dengan peningkatan tertinggi dialami oleh Kota Balikpapan yang meningkat sebesar Rp677,40 miliar atau 65,78% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kabupaten Berau menempati urutan kedua dengan peningkatan sebesar sebesar Rp413,74 miliar atau 29,25% (yoy) dari triwulan yang sama tahun sebelumnya.

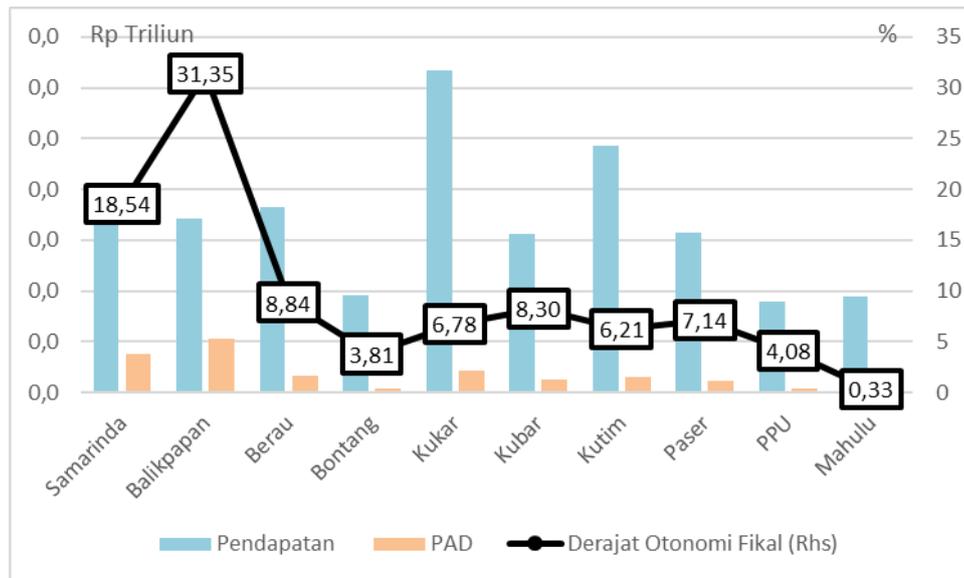
Tabel II.4 Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2018			2019			Selisih	Growth% (yoy)	Share (%)
	APBD-P	Realisasi Tw-III		APBD-P	Realisasi Tw-III				
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%			
PENDAPATAN									
Kota Samarinda	2.542,66	1.781,57	70,07	2.815,80	2.064,82	73,33	283,24	15,90	12,04
Kota Balikpapan	2.227,83	1.029,80	46,22	2.464,40	1.707,20	69,27	677,40	65,78	9,96
Kota Bontang	1.190,84	746,20	62,66	1.351,23	961,78	71,18	215,57	28,89	5,61
Kab. Kutai Kartanegara	4.165,97	2.533,97	60,83	5.002,31	3.167,30	63,32	633,33	24,99	18,47
Kab. Kutai Barat	2.170,31	1.286,49	59,28	2.310,67	1.560,72	67,54	274,23	21,32	9,10
Kab. Kutai Timur	3.755,85	2.013,72	53,62	3.359,94	2.433,41	72,42	419,70	20,84	14,19
Kab. Paser	1.977,35	1.275,78	64,52	2.256,07	1.576,10	69,86	300,32	23,54	9,19
Kab. Penajam Paser Utara	1.295,85	765,26	59,05	1.598,14	896,27	56,08	131,01	17,12	5,23
Kab. Berau	2.130,95	1.414,32	66,37	2.649,84	1.828,06	68,99	413,74	29,25	10,66
Kab. Mahakam Ulu	1.324,76	828,27	62,52	1.401,17	951,14	67,88	122,86	14,83	5,55
Total Kab/Kota Kaltim	22.782,37	13.675,38	60,03	25.209,56	17.146,80	68,02	3.471,41	25,38	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

Secara spasial, Kota Balikpapan memiliki DOF tertinggi pada triwulan III 2019.

Realisasi DOF triwulan III 2019 untuk Kota Balikpapan tercatat sebesar 31,35%. Sementara itu, Kota Samarinda mencatat realisasi DOF terbesar kedua dengan mencatat realisasi sebesar 18,54% dan Kabupaten Berau menjadi peringkat ketiga terbesar dengan realisasi DOF sebesar 8,84% (Grafik II.5). Realisasi DOF terendah masih terjadi di Kabupaten Mahulu yang tercatat sebesar 0,33%. Sebagai kabupaten yang baru berdiri pada tahun 2013, Mahulu masih bergantung pada dana transfer sebagai sumber utama pendapatannya. Di samping itu, aktivitas ekonomi di kabupaten tersebut masih relatif kecil sehingga belum dapat mengandalkan pendapatan dari PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan di wilayah perkotaan relatif tinggi dibandingkan dengan kabupaten penghasil sumber daya alam besar seperti Kukar dan Kutim. Konsentrasi aktivitas keuangan, perdagangan, dan jasa lainnya yang terjadi di wilayah perkotaan berdampak pada kontribusi pajak dan retribusi daerah lebih tinggi.



Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, diolah

Grifik II.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019

Realisasi Belanja

Realisasi belanja di 10 kabupaten/kota di wilayah Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami kenaikan. Pada triwulan III 2019, realisasi belanja di seluruh kabupaten/kota di wilayah Kaltim telah mencapai Rp13,65 triliun atau 53,49% dari pagu belanja tahun 2019. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1,82 triliun atau sebesar 15,42% (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2018 yang tercatat sebesar Rp11,829 triliun. Peningkatan realisasi belanja tertinggi dialami oleh Kabupaten Berau yang meningkat sebesar 30,40%, disusul oleh Kota Bontang dan Kabupaten Paser yang masing-masing meningkat sebesar 28,98% (yoy) dan 28,31% (yoy). Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah yang mengalami penurunan realisasi belanja pada triwulan III 2019 sebesar -10,33% (yoy) (Tabel II.5).

Tabel II.5 Realisasi Belanja APBD Kabupaten/Kota Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2018			2019			Selisih	Growth% (yoy)	Share (%)
	APBD-P	Realisasi Tw-III		APBD-P	Realisasi Tw-III				
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%			
BELANJA									
Kota Samarinda	2.726,53	1.373,53	50,38	2.815,80	1.555,55	55,24	182,02	13,25	11,39
Kota Balikpapan	2.407,57	1.215,77	50,50	2.434,69	1.238,33	50,86	22,56	1,86	9,07
Kota Bontang	1.380,20	634,70	45,99	1.451,23	818,64	56,41	183,94	28,98	6,00
Kab. Kutai Kartanegara	4.399,32	1.919,26	43,63	5.105,96	2.293,41	44,92	374,14	19,49	16,80
Kab. Kutai Barat	2.391,97	1.116,06	46,66	2.088,22	1.251,14	59,91	135,08	12,10	9,16
Kab. Kutai Timur	4.070,51	1.922,18	47,22	3.509,23	2.221,21	63,30	299,04	15,56	16,27
Kab. Paser	2.138,94	1.132,51	52,95	2.383,82	1.453,11	60,96	320,60	28,31	10,64
Kab. Penajam Paser Utara	1.660,54	800,89	48,23	1.588,75	836,25	52,64	35,36	4,42	6,12
Kab. Berau	2.738,68	1.101,95	40,24	2.642,34	1.436,95	54,38	334,99	30,40	10,52
Kab. Mahakam Ulu	1.468,68	612,82	41,73	1.507,61	549,50	36,45	(63,32)	(10,33)	4,02
Total Kab/Kota Kaltim	25.382,94	11.829,67	46,60	25.527,63	13.654,08	53,49	1.824,42	15,42	100,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim

2.4 APBN di Wilayah Kalimantan Timur

Belanja Kementerian dan Lembaga

Realisasi belanja APBN di wilayah Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim, realisasi belanja APBN wilayah Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp6,39 triliun atau 58,18% dari pagu belanja APBN di wilayah Kaltim tahun 2019. Berdasarkan daerahnya, Kota Samarinda memiliki pagu belanja APBN tertinggi dengan realisasi belanja sampai dengan triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp2,15 triliun atau 59,81% dari total pagu belanja tahun 2019. Pagu belanja APBN tertinggi kedua adalah Kota Balikpapan dengan realisasi sebesar Rp1,83 triliun atau 61,70% dari total pagu belanja TA 2019. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu merupakan daerah dengan realisasi belanja paling rendah yaitu sebesar Rp73,35 miliar atau 42,47% dari pagu belanja tahun 2019. Di sisi lain, Pemprov Kaltim sendiri mencatatkan kenaikan realisasi belanja APBN pada triwulan III 2019 sebesar Rp719,22 miliar atau 45.88% dari pagu belanja tahun 2019, meningkat dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2018 sebesar Rp486,85 miliar (Tabel II.6).

Tabel II.6 Realisasi Belanja APBN di Wilayah Kaltim Triwulan III Tahun 2018 dan 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2018			2019		
	PAGU	Realisasi Tw-III		PAGU	Realisasi Tw-III	
	Rp juta	Rp juta	%	Rp juta	Rp juta	%
Kota Samarinda	3.673.005	2.021.167	55,03	3.589.012	2.146.421	59,81
Kota Balikpapan	2.471.313	1.469.714	59,47	2.970.233	1.832.514	61,70
Kota Bontang	167.200	111.955	66,96	193.227	125.515	64,96
Kab. Kutai Kartanegara	272.503	186.554	68,46	588.747	358.229	60,85
Kab. Paser	197.012	126.522	64,22	420.175	233.986	55,69
Kab. Penajam Paser Utara	113.750	72.560	63,79	206.195	136.126	66,02
Kab. Berau	254.966	157.842	61,91	455.051	272.269	59,83
Kab. Kutai Barat	142.090	91.592	64,46	402.941	227.752	56,52
Kab. Kutai Timur	190.133	100.865	53,05	423.072	267.937	63,33
Kab. Mahakam Ulu	26.551	13.676	51,51	172.710	73.352	42,47
Prov. Kalimantan Timur	1.187.246	486.851	41,01	1.568.302	719.503	45,88
Total Kalimantan Timur	8.695.769	4.839.299	55,65	10.989.667	6.393.604	58,18

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltim

Transfer Dana Desa

Pada tahun 2019, Provinsi Kaltim memperoleh alokasi anggaran dana desa sebesar Rp870,11 miliar yang tersebar di 841 desa di wilayah Kaltim, lebih besar dibandingkan dengan anggaran pada tahun 2018. Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan alokasi dana desa tertinggi sebesar Rp185,36 miliar yang tersebar di 193 desa, disusul Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp173,09 miliar yang tersebar di 190 desa. Di sisi lain, Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan alokasi terendah sebesar Rp34,77 miliar yang

tersebar di 30 desa. Alokasi dana desa Kaltim 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp731,71 miliar atau tumbuh 18,92% (yoy). Sampai dengan September 2019, realisasi dana desa tahap I, II dan III secara keseluruhan yang telah di salurkan RKUN ke RKUD sebesar Rp547,08 miliar atau 62,87% dari total alokasi 2019. Sementara itu realisasi dana desa yang telah disalurkan ke RKD masing-masing sebesar Rp174,02 atau sebesar 100% dari total dana desa di RKUD tahap I, dan 320,85 miliar atau sebesar 94,45% dari total dana desa di RKUD tahap II. Sedangkan total saldo dana desa yang belum sampai ke RKD yaitu sebesar Rp362,77 atau sebesar 41,69% dari total alokasi dana desa 2019 (Tabel II.7).

Tabel II.7 Transfer Dana Desa Kaltim Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Rp Juta)

Kabupaten/Kota	2019														Saldo	
	Alokasi Dana Desa 2019		Realisasi Tahap I				Realisasi Tahap II				Realisasi Tahap III					
			Pempus-Pemda (RKUN-RKUD)		Pemda-Pemdes (RKUD-RKD)		Pempus-Pemda (RKUN-RKUD)		Pemda-Pemdes (RKUD-RKD)		Pempus-Pemda (RKUN-RKUD)		Pemda-Pemdes (RKUD-RKD)			
	Rp Juta	Desa	Rp Juta	%*	Rp Juta	%**	Rp Juta	%*	Rp Juta	%**	Rp Juta	%*	Rp Juta	%**	Rp Juta	%
Kab. Paser	122.624,62	139	24.524,92	20,00	24.524,92	100,00	47.500,30	38,74	46.663,89	98,24					51.435,80	41,95
Kab. Kutai Kartanegara	185.361,77	193	37.072,35	20,00	37.072,35	100,00	70.701,26	38,14	70.618,38	99,88					77.671,04	41,90
Kab. Berau	109.901,42	100	21.980,28	20,00	21.980,28	100,00	43.960,57	40,00	43.960,57	100,00	19.447,66	17,70	6.396,75	32,89	37.563,82	34,18
Kab. Kutai Barat	173.097,83	190	34.619,57	20,00	34.619,57	100,00	69.239,13	40,00	68.901,64	99,51					69.576,63	40,19
Kab. Kutai Timur	171.877,60	139	34.375,52	20,00	34.375,52	100,00	66.134,84	38,48	58.540,02	88,52					78.962,06	45,94
Kab. Penajam Paser Utara	34.774,86	30	6.954,97	20,00	6.954,97	100,00	13.909,94	40,00	13.909,94	100,00	13.909,94	40,00	6.080,36	43,71	7.829,58	22,52
Kab. Mahakam Ulu	72.481,48	50	14.496,30	20,00	14.496,30	100,00	28.252,61	38,98	18.256,15	64,62					39.729,03	54,81
TOTAL	870.119,58	841	174.023,92	20,00	174.023,92	100,00	339.698,66	39,04	320.850,59	94,45	33.357,60	3,83	12.477,11	37,40	362.767,97	41,69

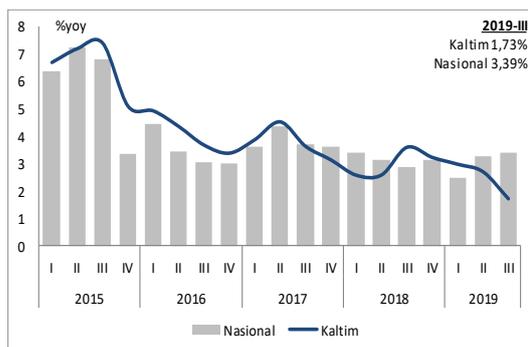
Sumber: DPMPD Prov Kaltim

III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi Kalimantan Timur triwulan III 2019 masih terkendali bahkan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019. Meredanya tekanan inflasi Kalimantan Timur triwulan III 2019 utamanya dipengaruhi oleh deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi. Secara spasial, penurunan tekanan inflasi Kaltim bersumber dari kedua kota pembentuknya yakni Kota Samarinda dan Kota Balikpapan yang tekanan inflasinya tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

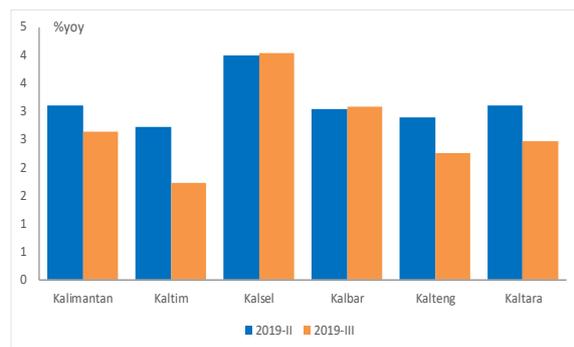
3.1 Gambaran Umum

Inflasi Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat terkendali pada level yang rendah bahkan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 1,73% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada triwulan II 2019 sebesar 2,71% (yoy). Meredanya tekanan inflasi Kaltim dipengaruhi oleh penurunan harga tiket pasca ditetapkan kebijakan pemerintah terkait penyesuaian Tarif Batas Atas (TBA) pesawat terbang dan upaya pemberian insentif kepada maskapai yang menerapkannya. Capaian inflasi Kaltim triwulan III 2019 berada dibawah level inflasi nasional yaitu sebesar 3,39% (yoy) (Grafik III.1). Secara spasial, inflasi Kaltim triwulan III 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi di wilayah Kalimantan baik secara keseluruhan yang mencapai 2,64% (yoy) maupun dibandingkan dengan provinsi lainnya di wilayah Kalimantan (Grafik III.2). Berdasarkan kota pembentuk inflasinya, meredanya inflasi Kaltim dipengaruhi oleh berkurangnya tekanan inflasi di kedua kota pembentuknya, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan.



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.1 Inflasi Kaltim & Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik III.2 Perbandingan Inflasi di Kalimantan

3.1.1 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kelompok Pembentuk

Penurunan tekanan inflasi Kaltim pada triwulan III 2019 utamanya dipengaruhi oleh kelompok transportasi dan komunikasi. Pada triwulan III 2019, kelompok transportasi dan

komunikasi tercatat mengalami deflasi sebesar -0,62% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat mengalami inflasi sebesar 3,30% (yoy) (Tabel III.1). Meski demikian, penurunan harga yang lebih dalam tertahan oleh inflasi pada kelompok bahan makanan.

Kebijakan pemerintah untuk mengatur tarif angkutan udara berhasil mengendalikan harga kelompok transportasi dan komunikasi. Pemerintah berupaya mengendalikan tarif angkutan udara antara lain melalui penyesuaian TBA dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 106 Tahun 2019 mengenai Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Meski aturan tersebut telah ditetapkan sejak triwulan II 2019, namun baru berdampak pada triwulan III 2019. Lebih lanjut, pada bulan Juli 2019, berdasarkan hasil rapat koordinasi evaluasi kebijakan penurunan tarif, pemerintah meminta maskapai untuk menurunkan harga tiket pesawat berbiaya murah (*Low Cost Carrier/LCC*) menjadi sebesar 50% dari TBA untuk penerbangan pada jam-jam tertentu. Pemerintah juga melakukan upaya pengendalian tarif angkutan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) per bulan Juli 2019. Penerbitan PP tersebut utamanya merupakan bentuk insentif fiskal untuk menekan komponen biaya yang dikeluarkan maskapai sehingga pada akhirnya mampu menurunkan tarif angkutan udara.

Namun pada bulan September 2019, kelompok transportasi dan komunikasi mengalami kenaikan tekanan inflasi. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan tiket pesawat dari Kota Balikpapan. Hal tersebut terutama disebabkan oleh bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan yang mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (AAP) di Samarinda. Akibat karhutla tersebut sebagian penerbangan dari Bandara AAP Samarinda harus dialihkan melalui Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (BPN) di Balikpapan.

Penurunan tekanan inflasi pada triwulan III 2019 juga terjadi pada beberapa kelompok lainnya. Selain kelompok transportasi dan komunikasi, penurunan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar, serta kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga. Penurunan tekanan inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga terutama oleh normalisasi setelah kenaikan tekanan pada triwulan sebelumnya akibat musim liburan sekolah dan mulainya tahun ajaran baru.

Tabel III.1 Inflasi Tahunan Kaltim (yoy)

No	Kelompok Barang	INFLASI YOY												Andil		
		2017				2018				2019				2019		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	
	UMUM/TOTAL	3.89	4.54	3.65	3.15	2.59	2.60	3.61	3.24	2.99	2.71	1.73	2.99	2.71	1.73	
1	Bahan Makanan	0.61	1.38	1.10	-0.24	2.34	5.46	4.53	3.31	1.64	1.90	2.15	0.32	0.38	0.42	
2	Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	4.17	2.86	3.30	3.11	2.68	3.19	2.47	2.93	3.23	2.98	2.98	0.65	0.59	0.59	
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	4.01	6.09	6.11	5.51	3.97	2.08	2.81	2.64	2.22	2.04	0.78	0.58	0.53	0.20	
4	Sandang	2.12	2.01	2.18	2.77	3.48	2.59	2.72	2.78	3.03	4.31	5.12	0.16	0.22	0.26	
5	Kesehatan	4.85	3.81	3.34	2.74	2.43	3.49	2.94	3.24	2.21	1.45	1.65	0.12	0.08	0.09	
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	2.41	2.40	2.43	2.24	2.28	2.17	3.81	3.97	4.40	4.89	4.07	0.29	0.32	0.27	
7	Transportasi dan Komunikasi	8.14	9.82	4.51	4.12	0.57	-0.63	5.44	4.28	5.02	3.30	-0.62	0.87	0.57	-0.11	

Sumber: BPS, diolah

Penurunan tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok bahan makanan. Pada triwulan III 2019, kelompok bahan makanan tercatat mengalami inflasi di level yang cukup rendah sebesar 2,15% (yoy). Inflasi tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan sebelumnya yang mencapai 1,90% (yoy). Inflasi pada kelompok bahan makanan utamanya disebabkan oleh kenaikan harga sub-kelompok sayur-sayuran. Hal tersebut disebabkan oleh produksi di daerah sentra yang terhambat akibat kurang kondusifnya cuaca sehingga berpengaruh pada keterbatasan jumlah pasokan di pasar. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok bahan makanan antara lain kangkung, sawi hijau, cabai merah dan cabai rawit. Di tingkat nasional, cabai juga menjadi salah satu penyumbang inflasi utama. Iklim kemarau yang lebih panjang membuat beberapa sentra produksi khususnya di wilayah Jawa mengalami gagal panen sehingga menyebabkan harga jual di pasar meningkat.

Peningkatan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang seiring dengan peningkatan harga emas internasional. Tekanan inflasi pada kelompok sandang terus mengalami peningkatan sejak triwulan I sampai dengan triwulan III 2019. Pada triwulan III 2019, kelompok sandang tercatat mengalami inflasi sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada triwulan II 2019 sebesar 4,31% (yoy). Kenaikan tekanan inflasi pada kelompok sandang ini sejalan dengan tren peningkatan harga emas internasional yang pada akhir triwulan III 2019 mengalami kenaikan sebesar 26,05% (yoy). Lebih lanjut, pada bulan Juli 2019 harga emas global di pasar spot mencapai US\$ 1.446/oz. selanjutnya, harga emas mencetak rekor tertingginya pada 27 Agustus 2019 dengan mencapai US\$1.542,39/oz. Kenaikan harga emas tersebut turut mendorong peningkatan harga emas perhiasan di Indonesia.

Berdasarkan komoditasnya, turunnya tekanan inflasi pada triwulan III 2019 terutama berasal dari penurunan harga daging ayam ras dan ikan layang. Komoditas daging ayam ras

pada triwulan III 2019 mengalami deflasi sebesar -15,12% (yoy) dan memberikan andil sebesar -0,22% (yoy). Komoditas bahan makanan lainnya yang juga mengalami deflasi adalah ikan layang. Pada triwulan III 2019, harga komoditas ikan layang turun hingga -10,92% (yoy) dan memberikan andil terhadap penurunan tekanan inflasi Kaltim sebesar -0,09% (yoy). Penurunan harga daging ayam ras dan ikan layang terutama bersumber dari normalisasi pasokan di tengah permintaan yang melambat pasca HBKN pada triwulan sebelumnya.

Penurunan harga lebih lanjut pada triwulan III 2019 tertahan oleh inflasi pada komoditas rokok kretek filter akibat kenaikan tarif cukai. Pada triwulan III 2019, rokok kretek filter mengalami inflasi sebesar 6,79% (yoy) dengan andil 0,15% (yoy) terhadap inflasi Kaltim. Kenaikan harga rokok tersebut terutama didorong oleh rencana kenaikan tarif cukai rokok. Meski kenaikan tarif cukai baru akan dilakukan pada tahun 2020, namun pelaku industri rokok mulai melakukan penyesuaian harga secara bertahap untuk menghindari lonjakan harga di tahun depan. Komoditas selanjutnya yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah cabai rawit dengan andil sebesar 0,15% (yoy). Selain itu, harga emas perhiasan yang terus mengalami kenaikan juga turut menahan terjadinya deflasi yang lebih dalam. (Tabel III.2).

Tabel III.2 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kaltim Triwulan III 2019 (yoy)

Andil Inflasi			Andil Deflasi		
Komoditas	yoy	andil	Komoditas	yoy	andil
Rokok Kretek Filter	6.79	0.15	Daging Ayam Ras	-15.12	-0.22
Cabai Rawit	61.65	0.15	Angkutan Udara	-4.50	-0.12
Emas Perhiasan	15.29	0.10	Layang/Benggol	-10.92	-0.09
Kangkung	40.89	0.10	Telur Ayam Ras	-8.65	-0.07
Sewa Rumah	1.61	0.09	Minyak Goreng	-7.75	-0.07
Sawi Hijau	66.41	0.08	Tarip Pulsa Ponsel	-2.19	-0.06
Cabai Merah	43.65	0.07	Tarip Listrik	-0.89	-0.03
Sekolah Dasar	6.18	0.07	Telepon Seluler	-6.32	-0.03
Bayam	54.19	0.06	Ayam Hidup	-29.20	-0.03
Air Kemasan	8.09	0.05	Seng	-1.99	-0.02

Sumber: BPS, diolah (estimasi analis Bank Indonesia)

3.1.2 Perkembangan Inflasi Daerah Berdasarkan Kota Pembentuk

Secara spasial, tingkat inflasi Kota Samarinda pada triwulan III 2019 terkendali dengan realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, disumbang oleh kelompok transportasi dan komunikasi. Inflasi kota Samarinda pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 1,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 2,49% (yoy) (Tabel III.7). Penurunan tingkat inflasi Kota Samarinda pada triwulan III 2019 utamanya disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi. Kelompok transportasi dan komunikasi tercatat mengalami deflasi sebesar -0,78%

(yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,70 % (yoy). Namun penurunan lebih lanjut tertahan oleh tekanan inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga serta kelompok kesehatan. Sementara itu, kelompok sandang di Kota Samarinda juga mengalami inflasi sejalan dengan kenaikan harga emas dunia yang terus mengalami peningkatan.

Sejalan dengan kota Samarinda, inflasi Kota Balikpapan juga mengalami penurunan dari 2,97% (yoy) pada triwulan II 2019 menjadi 3,00% (yoy) pada triwulan III 2019. Penurunan tekanan inflasi di Kota Balikpapan terutama dipengaruhi oleh penurunan tekanan inflasi pada kelompok transportasi dan komunikasi. Kelompok transportasi dan komunikasi menyumbang andil deflasi sebesar -0,45% (yoy) terhadap inflasi Kota Balikpapan pada triwulan III 2019. Selain itu, tingkat inflasi kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga di Kota Balikpapan juga mengalami penurunan pada triwulan III 2019 menjadi sebesar 3,61% (yoy) setelah sebelumnya mengalami inflasi cukup tinggi mencapai 6,08% (yoy) (Tabel III.3)

Tabel III.3 Inflasi Kaltim dan Kota Pembentuk Menurut Kelompok Barang (yoy)

No	Kelompok Barang	Inflasi Kaltim		Inflasi Samarinda		Inflasi Balikpapan	
		2019	2019	2019	2019	2019	2019
		II	III	II	III	II	III
	UMUM/ TOTAL	2.71	1.73	2.49	1.56	3.00	1.94
1	Bahan Makanan	1.90	2.15	1.07	0.83	2.96	3.76
2	Makanan & Minuman, Rokok dan Tembakau	2.98	2.98	2.97	2.78	3.00	3.28
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan BB	2.04	0.78	2.81	0.88	1.02	0.64
4	Sandang	4.31	5.12	6.31	6.40	1.67	2.99
5	Kesehatan	1.45	1.65	0.86	1.09	2.22	2.51
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	4.89	4.07	4.02	4.43	6.08	3.61
7	Transportasi dan Komunikasi	3.30	-0.62	1.70	-0.78	5.08	-0.45

Sumber: BPS, diolah

3.1.3 Tracking Inflasi Triwulan IV 2019

Tekanan inflasi pada triwulan IV 2019 diperkirakan tetap terjaga pada level yang rendah dan stabil dan berada pada rentang 2,65%-3,05% (yoy). Namun demikian, tekanan inflasi pada triwulan akhir 2019 ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2019 yang mencapai 1,73% (yoy). Berdasarkan komponen pembentuk inflasi, kenaikan tekanan inflasi diperkirakan akan berasal dari kelompok bahan makanan seiring dengan permintaan yang meningkat menjelang HBKN Natal dan akhir tahun. Selain itu, peningkatan tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan juga bersumber dari mundurnya masa panen di beberapa daerah sentra produksi di Kaltim yang menyebabkan pasokan menjadi terbatas.

Kenaikan tekanan inflasi pada triwulan IV 2019 diperkirakan juga berasal dari kelompok transportasi dan komunikasi serta komoditas rokok kretek. Kelompok transportasi dan komunikasi pada triwulan IV 2019 diperkirakan akan mengalami kenaikan tekanan inflasi seiring dengan kenaikan permintaan menjelang HBKN Natal dan liburan akhir tahun. Selain itu, kenaikan permintaan di bandara Sepinggang Kota Balikpapan akibat penutupan bandara APT Pranoto Kota Samarinda pada akhir November hingga awal Desember 2019 berpotensi untuk meningkatkan harga tarif angkutan udara. Selain itu, kenaikan tingkat inflasi juga diperkirakan akan didorong oleh kenaikan harga rokok kretek seiring dengan implementasi kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2020, namun pedagang rokok sudah mulai melakukan peningkatan harga jual secara gradual.

Pantauan harga komoditas selama periode Oktober sampai dengan November 2019 menunjukkan kenaikan tekanan inflasi. Monitoring harga komoditas dilakukan melalui situs PIHPS Kaltim (hargapangan.id) yang melaporkan perkembangan harga komoditas di pasar utama Kaltim. Hasil monitoring pada periode Oktober sampai dengan November 2019 menunjukkan bahwa beberapa komoditas mengalami kenaikan tekanan inflasi khususnya pada harga komoditas daging ayam yang mengalami kenaikan dari Rp29.900 pada triwulan III 2019 menjadi Rp38.800 pada November 2019 (Tabel III.4).

Tabel III.4 Harga Komoditas Pangan Kaltim

No	Komoditas	Jul-19	Aug-19	Sep-19	2019-III (Average)	Oct-19	Nov-19	Growth Oct-19 to 2019- III (Avg)	Growth Oct-19 to Nov-19
1	Beras	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,641.67	13,150.00	-0.07	4.02
2	Daging Ayam	32,650.00	30,900.00	26,150.00	29,900.00	31,750.00	38,800.00	6.19	22.20
3	Daging Sapi	123,175.00	123,375.00	123,525.00	123,358.33	123,125.00	131,400.00	-0.19	6.72
4	Telur Ayam Ras	23,450.00	23,300.00	23,100.00	23,283.33	23,150.00	28,450.00	-0.57	22.89
5	Bawang Merah	34,850.00	27,650.00	21,800.00	28,100.00	22,450.00	28,000.00	-20.11	24.72
6	Bawang Putih	35,050.00	32,500.00	30,900.00	32,816.67	30,600.00	31,400.00	-6.75	2.61
7	Cabai Merah	61,675.00	73,200.00	50,525.00	61,800.00	46,600.00	59,200.00	-24.60	27.04
8	Cabai Rawit	56,000.00	75,675.00	64,475.00	65,383.33	62,200.00	63,900.00	-4.87	2.73
9	Minyak Goreng	17,000.00	17,016.67	17,000.00	17,005.56	16,816.67	14,300.00	-1.11	-14.97
10	Gula Pasir	14,225.00	14,075.00	13,975.00	14,091.67	14,000.00	14,400.00	-0.65	2.86

Sumber: hargapangan.id, diolah

Pada bulan Oktober 2019, Kaltim mengalami deflasi sebesar -0,37% (mtm) lebih dalam dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tercatat -0,27% (mtm). Penurunan tersebut disumbang oleh kelompok transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, inflasi tahun kalender Kaltim sampai dengan bulan Oktober 2019 tercatat 1,04% (ytd) atau secara tahunan mengalami inflasi 1,52% (yoy). Deflasi IHK Kaltim Oktober 2019 lebih dalam dibandingkan dengan rata-rata deflasi IHK Oktober pada 3 tahun terakhir yang tercatat sebesar

-0,24% (mtm). Deflasi Kaltim Oktober 2019 terutama dipengaruhi oleh deflasi kelompok transportasi dan komunikasi dengan tarif angkutan udara sebagai komoditas penyumbang andil deflasi terbesar. Tarif angkutan udara pada Oktober 2019 mengalami deflasi sebesar -6,74% (mtm) dan memberikan andil sebesar -0,17% (mtm) terhadap deflasi Kaltim. Penurunan permintaan tiket pesawat, khususnya di Kota Balikpapan, menjelang periode penerbangan *low season* menyebabkan maskapai penerbangan menurunkan tarif tiket angkutan udara. Namun demikian, IHK komoditas tarif angkutan udara di Kaltim masih lebih tinggi dibandingkan dengan IHK angkutan udara di kota besar lainnya. Meski mengalami deflasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun secara tahunan, kelompok transportasi dan komunikasi tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46% (yoy) pada bulan Oktober 2019. Inflasi tersebut berkebalikan dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,62% (yoy).

Selain itu, kelompok bahan makanan juga mengalami deflasi pada bulan Oktober 2019 sebesar -1,28% (mtm), lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar -1,98% (mtm). Deflasi pada kelompok ini utamanya disumbang oleh komoditas ikan layang/benggol sebesar -15,08% (mtm) dengan andil sebesar -0,10% (mtm) terhadap deflasi Kaltim Oktober 2019. Penurunan harga komoditas ikan layang/benggol disebabkan oleh arus gelombang dan cuaca yang kondusif bagi nelayan untuk pergi melaut serta pola historis musiman. Komoditas lain yang turut mendorong terjadinya deflasi yaitu kangkung dengan tingkat deflasi -22,14% (mtm) dan memberikan andil sebesar -0,08% (mtm). Penurunan harga kangkung terjadi seiring dengan melimpahnya stok di pasar di tengah cuaca yang kondusif karena mulai memasuki musim penghujan sehingga meningkatkan jumlah produksi kangkung di daerah sentra di tengah permintaan yang mengalami perlambatan.

Penurunan IHK kelompok bahan makanan yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga daging ayam ras. Pada bulan Oktober 2019, harga daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 10,28% (mtm) dan memiliki andil sebesar 0,13% (mtm) terhadap inflasi Kaltim. Selain di Kaltim, kenaikan harga daging ayam ras juga terjadi di beberapa wilayah nasional. Hal tersebut terutama sebagai akibat dari kebijakan pengurangan produksi bibit ayam atau *Day Old Chick* (DOC) oleh Kementerian Pertanian agar harga daging ayam ras yang rendah sejak awal tahun tidak semakin merugikan peternak.

Sementara itu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami kenaikan tekanan inflasi pada Oktober 2019 sebesar 0,26% (mtm), meningkat dibandingkan dengan bulan September 2019 yang tercatat inflasi sebesar 0,16% (mtm). Peningkatan

tekanan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau utamanya didorong oleh komoditas rokok kretek filter yang mengalami inflasi sebesar 1,17% (mtm) dengan andil 0,03% (mtm). Kenaikan harga rokok kretek filter yang terjadi di Kaltim seiring dengan adanya keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok dengan rerata tertimbang sebesar 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 35% yang akan diberlakukan mulai 2020. Namun demikian, produsen rokok perlahan mulai menaikkan harga jual rokok setelah kenaikan cukai tembakau disahkan oleh Pemerintah. Selain itu, informasi kenaikan cukai rokok juga disinyalir mendorong kenaikan permintaan sebagai upaya untuk menyimpan pasokan rokok baik untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi pada tahun 2020 maupun untuk dikonsumsi.

Secara tahunan, inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan tetap terkendali dengan level yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, berkurangnya tekanan inflasi Kaltim pada tahun 2019 terutama dipengaruhi oleh terjaganya harga pada kelompok bahan makanan. Hal tersebut terutama didorong oleh terjaganya pasokan komoditas pangan seiring dengan optimalnya program TPID yang dijalankan serta mekanisme pemantauan harga di tingkat pedagang eceran yang lebih efektif. Selain itu, meredanya tekanan inflasi Kaltim tahun 2019 juga dipengaruhi oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Pada tahun 2019, inflasi yang lebih rendah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memilih untuk tidak melakukan penyesuaian tarif dasar listrik dan cukai rokok. Terlebih pemerintah melakukan penurunan tarif dasar listrik untuk pelanggan berkapasitas 900 VA sebesar Rp52/kWh pada April 2019. Di sisi lain, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga terjaga seiring dengan penurunan perkiraan harga minyak dunia sesuai IMF *Commodity Market Outlook* periode Oktober 2019 yang turun dari US\$68,3/bbl di tahun 2018 menjadi US\$60,0/bbl pada tahun 2019. Lebih lanjut, berkurangnya tekanan inflasi juga bersumber dari kelompok transportasi dan komunikasi seiring dengan berhasilnya kebijakan penyesuaian TBA oleh pemerintah untuk menekan kenaikan tarif yang sempat terjadi di akhir tahun 2018.

3.2 Program Pengendalian Inflasi Daerah

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim serta jajaran TPID Kabupaten/Kota terus melakukan koordinasi dan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan harga komoditas dan menjaga ketersediaan pasokan agar inflasi tetap berada pada target inflasi nasional yaitu 3,5%±1%. Berbagai program pengendalian inflasi yang

dilakukan difokuskan pada upaya menjamin ketersediaan barang dan kelancaran distribusi pasokan, khususnya untuk jenis bahan makanan pokok. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu pemantauan harga melalui Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan *onsite visit* ke pasar tradisional, pasar modern maupun kawasan pergudangan. Beberapa program yang dilakukan selama triwulan III 2019 antara lain *High Level Meeting* (HLM) TPID di wilayah Kaltim bersama *stakeholders* pada bulan Juli dan September 2019. HLM tersebut diantaranya membahas perdagangan antar daerah untuk mengatasi permasalahan pasokan dengan menjalankan fungsi pertukaran informasi komoditas dan produk unggulan perdagangan serta peningkatan nilai transaksi perdagangan untuk mengantisipasi adanya risiko-risiko yang berkaitan dengan ketahanan pangan yang mungkin terjadi pada semester II-2019. TPID Kaltim juga tengah melakukan peninjauan awal kerjasama dengan Perusda (PD. Melati Bhakti Satya) yang dikolaborasikan dengan program unggulan OPD Kaltim yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga pasokan. Selain itu, TPID juga melakukan *benchmarking* dengan TPID Eks Karesidenan Pekalongan mengenai *success story* masing-masing program TPID yang sudah diterapkan. Lebih lanjut, TPID juga sedang merumuskan program kerjasama antar daerah dengan TPID Eks Karesidenan Pekalongan yang diantaranya merupakan persiapan konsep *government to government* (G2G) dengan pemerintah Kab. Brebes yang melibatkan Perusda Kaltim (PD. PAU).

Selain melalui TPID, Bank Indonesia Provinsi Kaltim juga turut berkontribusi nyata dalam mengendalikan inflasi dengan berbagai kegiatan. Dalam rangka monitoring harga, Bank Indonesia Provinsi Kaltim melakukan survei PIHPS di Kota Samarinda dan Kota Bontang yang hasilnya dapat diakses melalui situs hargapangan.id. Selain memantau harga secara rutin, Bank Indonesia Provinsi Kaltim juga turut melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengantisipasi kenaikan harga yang berkelanjutan melalui kegiatan SINERGI (Aksi Nyata Bersama Kurangi Inflasi). SINERGI merupakan kegiatan menanam cabai pada tingkat Rukun Tetangga (RT) sehingga diharapkan mampu mengendalikan inflasi dari tatanan yang paling mikro.

Selama triwulan III 2019, TPID baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga aktif menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Sebagai salah satu bentuk upaya dalam penguatan ketersediaan pasokan Kaltim, sesuai amanat Presiden dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2016, daerah diminta untuk melakukan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dalam rangka mengurangi tekanan inflasi kelompok bahan makanan sebagai sumber utama tekanan inflasi. Selain itu, cadangan pangan juga menjadi langkah

antisipatif dalam merespon gejolak harga atau kondisi rawan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, banjir, kekeringan, gagal panen dan lainnya. Rapat koordinasi TPID terkait hal tersebut diharapkan juga dapat memberi masukan kepada TPI-P dalam menyusun panduan bagi Pemerintah Daerah/TPID (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan program CPPD sebagai salah satu strategi pengendalian inflasi pangan daerah. Beberapa kegiatan lainnya juga dilakukan oleh TPID di wilayah Kaltim selama triwulan III 2019 untuk tetap mempertahankan stabilitas harga melalui ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi (Tabel III.5).

Tabel III.5 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019

NO	TPID	TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	PIMPINAN KEGIATAN
1	Kota Balikpapan	Balikpapan	4 Juli 2019	Rapat Teknis	Melakukan <i>review</i> program semester I 2019 dan merencanakan program semester II 2019	KPwBI Balikpapan
2	Kabupaten Paser	Paser	15 Juli 2019	Rapat Teknis	Penyusunan program semester II	Asisten Ekonomi
3	Provinsi Kalimantan Timur	Hotel Mercure, Pontianak	16 Juli 2019	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Wilayah TPID se-Kalimantan diisi oleh narasumber dari TPIN, KPw Koordinator Kalimantan.	Kepala BI Koordinator Kalimantan
4	Kota Balikpapan	Balikpapan	18 Juli 2019	Edukasi Inflasi	Edukasi dan fasilitasi Akses Pasar Kluster Bawang dan Cabai, melakukan Fasilitasi dan akses modal kepada kluster komoditas penyumbang inflasi	KPwBI Balikpapan
5	Kota Balikpapan	Balikpapan	19 Juli 2019	<i>High Level Meeting</i>	<i>High Level Meeting</i> Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Balikpapan “Evaluasi Inflasi Kota Balikpapan Semester I-2019 dan Risiko Inflasi & Antisipasi Risiko Inflasi Semester II-2019”	Sekretaris Daerah
6	Kota Samarinda	Kantor Pemerintah Kota Samarinda	19 Juli 2019	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi TPID kota Samarinda yang membahas harga komoditas menjelang hari raya idul Adha sekaligus perpisahan dengan Kepala Perwakilan BI Kaltim	Walikota Samarinda
7	Provinsi Kalimantan Timur	Hotel Grand Sahid, Jakarta	25 Juli 2019	Rapat Koordinasi	Rapat Koordinasi Nasional TPID dihadiri oleh TPID se-Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, penghargaan TPID Provinsi Terbaik diberikan kepada Provinsi Kalimantan Timur, TPID Kota Terbaik kepada Kota Samarinda, dan TPID Kab. Berprestasi kepada Kabupaten Mahakam Ulu.	Wakil Presiden
8	Kota Samarinda	Susur Sungai Mahakam, Samarinda	29 Juli 2019	Rapat Evaluasi	Rapat evaluasi hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) atas prestasi TPID Kota Samarinda menjadi TPID Kota Terbaik.	Walikota Samarinda
9	Provinsi Kalimantan Timur	Banking Hall KPw BI Kaltim	22 Agt 2019	Rapat Evaluasi	Rapat evaluasi hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) atas prestasi TPID Prov Kaltim dalam mendapatkan penghargaan TPID Provinsi Terbaik	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim
10	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	4 Sep 2019	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi mengenai evaluasi kinerja 2019 serta penyampaian program unggulan OPD terkait pengendalian inflasi serta penjajakan awal kerja sama dengan Perusda Kaltim, Melati Bhakti Satya.	Kepala Biro Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: TPID Provinsi Kaltim

Tabel III.6 Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019 (Lanjutan)

NO	TPID	TEMPAT	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN	PIMPINAN KEGIATAN
11	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	11 Sep 2019	Rapat Koordinasi	Kunjungan oleh TPID Eks Karesidenan Pekalongan untuk berkoordinasi dan sharing mengenai program masing-masing TPID	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim
12	Kota Samarinda	Kantor walikota Samarinda dan PD PAU	11 Sepr 2019	Rapat Koordinasi	Kunjungan oleh TPID Eks Karesidenan Pekalongan untuk berkoordinasi dan sharing mengenai program masing-masing TPID	Wakil Walikota Samarinda
13	Kota Samarinda	Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur	19 Sep 2019	Rapat Koordinasi	Rapat koordinasi membahas program gerakan menanam cabai di kota Samarinda untuk menanggulangi tingginya harga cabai	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim
14	Kota Bontang	Kantor Walikota Bontang	24 Sep 2019	<i>High Level Meeting</i>	<i>High Level Meeting</i> TPID kota Bontang di pimpin oleh walikota Bontang dan dihadiri oleh kepala perwakilan Bank Indonesia provinsi Kaltim membahas mengenai program-program inovasi TPID tahun 2019	Walikota Bontang

Sumber: TPID Provinsi Kaltim

IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Stabilitas keuangan daerah Kaltim pada triwulan III 2019 masih terjaga meskipun melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kinerja sektor korporasi dan sektor rumah tangga masih positif meskipun melambat. Di sisi lain, fungsi intermediasi perbankan konvensional dan UMKM pada triwulan III 2019 juga masih terjaga.

4.1 Gambaran Umum

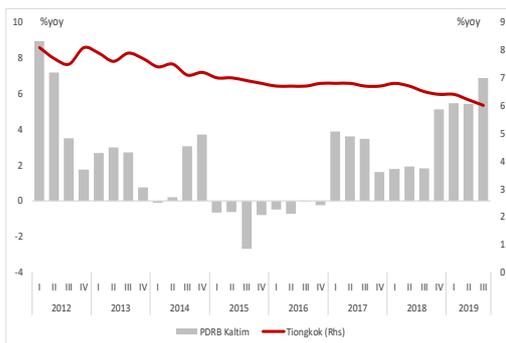
Sejalan dengan kondisi perekonomian Kaltim yang tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan III 2019, kondisi stabilitas keuangan daerah Kaltim masih terjaga. Stabilitasnya keuangan daerah Kaltim tercermin dari kinerja korporasi yang masih positif sejalan dengan kinerja positif pertumbuhan ekonomi Kaltim. Meskipun kondisi ekonomi global masih diikuti dengan ketidakpastian, kinerja lapangan usaha utama masih menunjukkan pertumbuhan. Namun demikian, kinerja sektor rumah tangga masih terbatas di tengah perlambatan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2019. Kondisi tersebut sejalan dengan normalisasi konsumsi setelah momen Ramadhan serta HBKN Idul Fitri pada triwulan II 2019. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan juga masih terjaga sebagaimana tercermin baik dari penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit pada triwulan III 2019 yang masih tumbuh positif. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan akses keuangan dan UMKM juga pada triwulan III 2019 juga masih menunjukkan kinerja yang positif meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

4.2 Stabilitas Keuangan Daerah

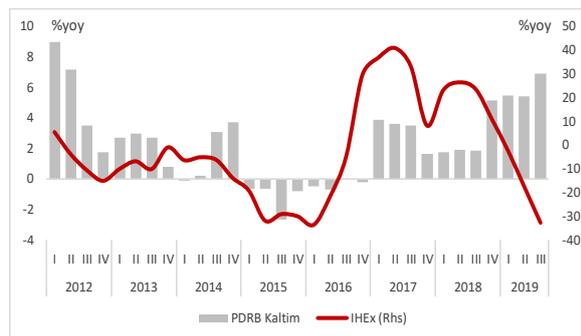
4.2.1 Asesmen Sektor Korporasi

Kinerja perekonomian Kaltim pada triwulan III 2019 yang berada pada level tinggi menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja korporasi. Namun demikian, selama beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi Kaltim didominasi oleh lapangan usaha yang berbasis komoditas. Hal tersebut menyebabkan kondisi korporasi di wilayah Kaltim sangat rentan terhadap gejala yang terutama bersumber dari eksternal karena besarnya pangsa ekspor luar negeri terhadap perekonomian Kaltim. Pangsa ekspor luar negeri Kaltim mencapai 35,88% terhadap ekonomi Kaltim. Dengan demikian, kondisi perekonomian negara mitra dagang utama Kaltim sangat berpengaruh terhadap kondisi korporasi Kaltim.

Kondisi ekonomi Tiongkok dan harga di pasar internasional dapat mempengaruhi kinerja korporasi Kaltim. Sejak tahun 2012, perekonomian Tiongkok terus berada dalam tren yang menurun. Pada saat yang sama, harga komoditas di pasar internasional juga mengalami penurunan dan baru *rebound* pada tahun 2016 untuk kembali turun sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Akibatnya perekonomian Kaltim pada tahun 2012 cenderung turun dan baru meningkat pada tahun 2016 mengikuti pergerakan harga komoditas (Grafik IV.1). Pada saat harga komoditas mengalami *booming* pada tahun 2011, perekonomian Kaltim bisa tumbuh hingga ke level 8% per tahun. Namun saat harga komoditas terpuruk seperti dialami pada tahun 2015, perekonomian Kaltim juga menalami penurunan yang cukup dalam. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik, ekspor luar negeri Kaltim periode Januari sampai dengan September 2019 didominasi oleh ekspor ke Tiongkok dengan pangsa 27,02% dari total ekspor Kaltim, disusul oleh India dan Jepang dengan pangsa masing-masing sebesar 19,33% dan 15,14%. Sementara itu, meski harga komoditas di pasar internasional kembali menurun, namun ekspor Kaltim masih tumbuh cukup tinggi karena terkompensasi dengan kenaikan volume eksportnya, sehingga ekonomi Kaltim masih tumbuh positif (Grafik IV.2).



Sumber: OECD dan BPS, diolah
Grafik IV.1 PDRB Kaltim dan PDB Tiongkok



Sumber: Worldbank dan BPS, diolah
Grafik IV.2 PDRB Kaltim dan Indeks Harga Komoditas Ekspor Kaltim

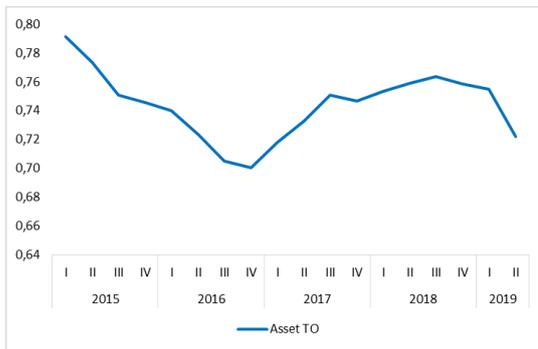
Secara umum, kinerja korporasi dapat diukur dengan 4 (empat) rasio keuangan⁴ sebagai berikut:

Produktivitas

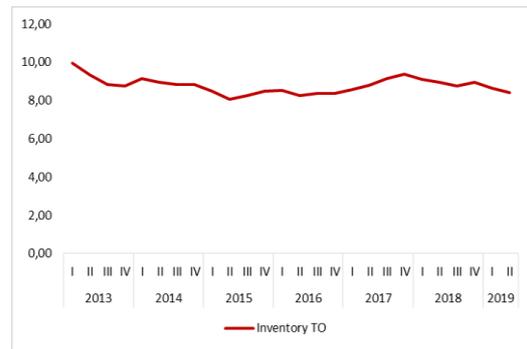
Produktivitas korporasi triwulan II 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya, tercermin dari rasio *asset turnover* dan *inventory turnover*. Rasio *asset turnover*

⁴ Rasio keuangan korporasi yang digunakan merupakan agregasi korporasi di wilayah Kalimantan yang masuk *listing* dalam Bursa Efek Indonesia. Dengan mempertimbangkan ketersediaan data, rasio keuangan korporasi masih menggunakan data triwulan II 2019.

korporasi Kalimantan pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 0,72, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 0,76 (Grafik IV.3). Rasio *asset turnover* mencerminkan tingkat efisiensi suatu korporasi dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Sementara itu, rasio *inventory turnover* pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 8,40, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 8,66. Rasio *inventory turnover* dapat mencerminkan kemampuan suatu korporasi untuk menjual komoditasnya pada periode tertentu. Penurunan tingkat produktivitas korporasi pada triwulan II 2019 perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya pada lapangan usaha utama seperti pertambangan, industri dan konstruksi.



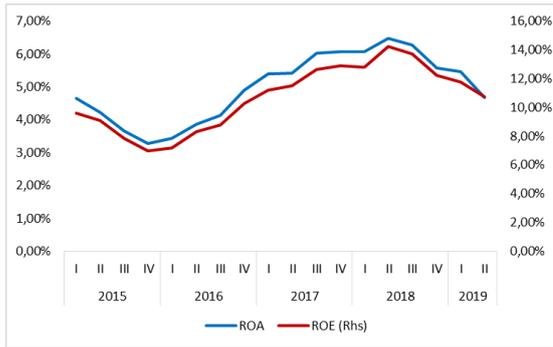
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.3 *Asset Turnover*



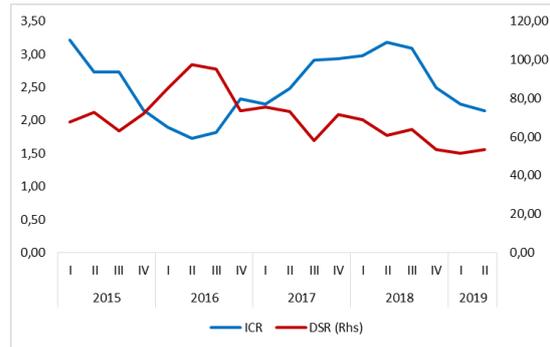
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.4 *Inventory Turnover*

Profitabilitas

Profitabilitas korporasi yang dapat diukur dari indikator *Return on Asset (ROA)* serta *Return on Equity (ROE)* tercatat lebih rendah pada triwulan II 2019. Nilai *Return on Asset (ROA)* serta *Return on Equity (ROE)* Kalimantan triwulan II 2019 masing-masing sebesar 4,67% dan 10,72%, tidak setinggi triwulan sebelumnya yang masing-masing tercatat sebesar 5,46% dan 11,78% (Grafik IV.5). Ketidakpastian ekonomi global dan tren penurunan harga komoditas menjadi faktor utama penurunan rasio profitabilitas korporasi pada triwulan II 2019.



Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.5 Return on Asset dan Return on Equity



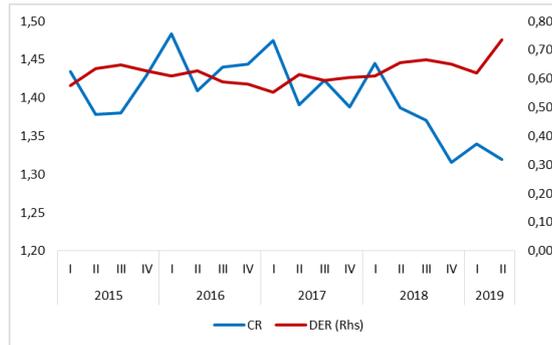
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.6 Interest Coverage Ratio dan Debt to Service Ratio

Solvabilitas

Di sisi lain, tingkat solvabilitas korporasi pada triwulan II 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 sebagaimana tercermin pada *Interest Coverage Ratio (ICR)* yang lebih rendah. Tingkat solvabilitas biasa diukur melalui ICR. Pada triwulan II 2019, tingkat ICR tercatat sebesar 2,15, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 2,25 (Grafik IV.6). Hal tersebut menunjukkan kemampuan adanya penurunan kemampuan korporasi untuk membayar bunga pinjaman sehubungan dengan penurunan tingkat profitabilitas korporasi. Hal tersebut juga tercermin dari *Debt to Service Ratio (DSR)* pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 53,55, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 51,71. Hal ini mengindikasikan kemampuan korporasi dalam melakukan pembayaran utang atas pendapatan yang diperoleh menurun serta beban utang korporasi mengalami peningkatan.

Likuiditas

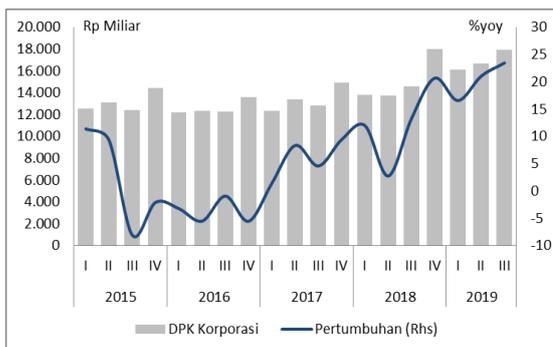
Di sisi likuiditas, korporasi memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan baik yang tercermin dari indikator likuiditas *Current Ratio*. Indikator *Current Ratio (CR)* pada triwulan II 2019 tercatat sebesar 1,34, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan CR pada triwulan I 2019 (Grafik IV.7). Indikator tersebut menunjukkan bahwa kemampuan korporasi dalam memenuhi kewajibannya masih memadai walaupun terdapat penurunan karena jumlah aset jangka pendek yang lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban jangka pendeknya. Meskipun begitu, likuiditas yang tercermin dari *Debt to Equity Ratio (DER)* tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dari 0,62 pada triwulan I 2019 menjadi 0,74. Kondisi tersebut menggambarkan total kewajiban korporasi mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan jumlah aset korporasi.



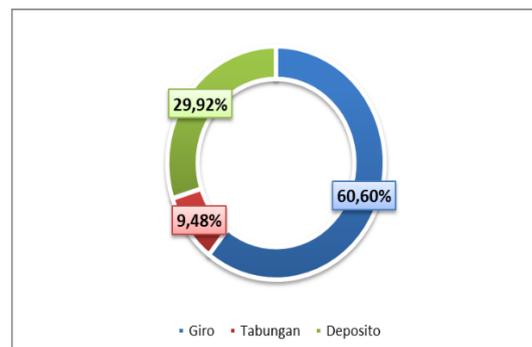
Sumber: Bloomberg, diolah (diestimasi oleh Staf Bank Indonesia)
Grafik IV.7 Current Ratio dan Debt to Equity Ratio

Eksposur Perbankan Pada Sektor Korporasi

Kinerja pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi triwulan III 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. DPK Korporasi Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp17,94 triliun atau tumbuh 23,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,02% (yoy) (Grafik IV.8). Pertumbuhan DPK korporasi bersumber dari jenis simpanan giro dan deposito yang mengalami peningkatan, sedangkan tabungan mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kesiapan korporasi dalam melakukan ekspansi ketika iklim investasi dirasa telah kondusif. Berdasarkan jenisnya, giro masih memiliki pangsa terbesar dalam DPK korporasi Kaltim sebesar 60,60%, disusul oleh deposito dan tabungan yang masing-masing memiliki pangsa sebesar 29,92% dan 9,48% (Grafik IV.9).



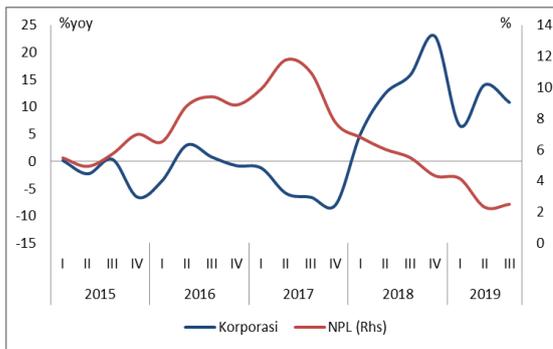
Grafik IV.8 Perkembangan DPK Korporasi Kaltim



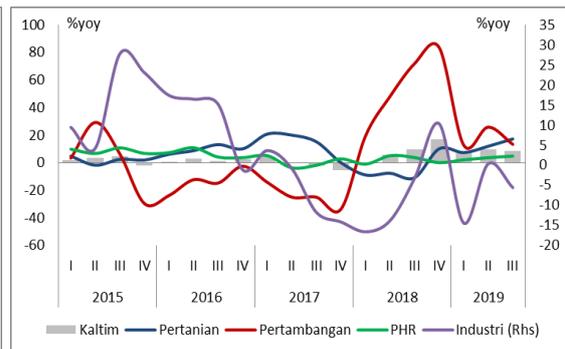
Grafik IV.9 Komposisi DPK Korporasi Kaltim Triwulan III 2019

Di sisi lain, penyaluran kredit korporasi Kaltim pada triwulan III 2019 masih tumbuh positif. Penyaluran kredit kepada debitur korporasi pada triwulan III 2019 masih tumbuh positif sebesar 10,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

14,03% (yoy) (Grafik IV.10). Kinerja positif penyaluran kredit tersebut didukung oleh kinerja kredit korporasi di sektor pertambangan yang tercatat tumbuh sebesar 13,22%, meskipun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, penyaluran kredit korporasi ke sektor industri pengolahan pada triwulan III 2019 tercatat mengalami penurunan menjadi -5,64% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh positif sebesar 0,33% (yoy) (Grafik IV.11).



Grafik IV.10 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim



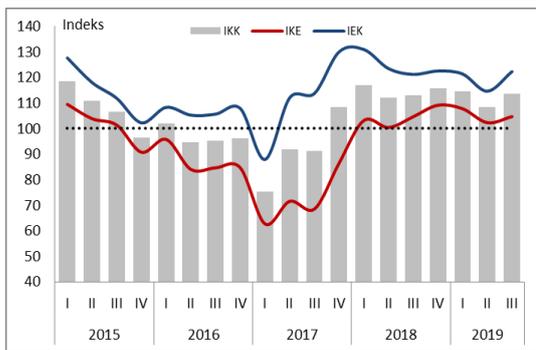
Grafik IV.11 Perkembangan Kredit Korporasi Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

Kinerja positif penyaluran kredit korporasi pada triwulan III 2019 dibarengi oleh risiko yang terjaga. NPL sektor korporasi pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 2,50%, lebih tinggi dibandingkan dengan NPL pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 2,31%. Level NPL tersebut masih berada di bawah *threshold* 5%. Peningkatan risiko kredit korporasi pada triwulan III 2019 tercermin dari peningkatan NPL pada sektor konstruksi yang merupakan sektor dengan NPL tertinggi dari 11,09% pada triwulan II 2019 menjadi 12,77% pada triwulan III 2019 sejalan dengan perlambatan kinerja konstruksi Kaltim triwulan III 2019. Peningkatan rasio NPL sektor konstruksi lebih disebabkan oleh sering tertundanya pembayaran proyek yang secara fisik telah terealisasi. Selain itu, peningkatan rasio NPL tersebut juga tercermin dari penurunan rasio solvabilitas korporasi.

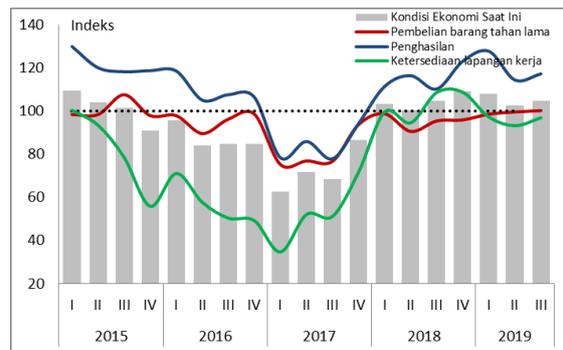
4.2.2 Asesmen Sektor Rumah Tangga

Meskipun kinerja konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan, namun Indeks Keyakinan Konsumen yang mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kinerja ekonomi di sektor rumah tangga Kaltim tercermin dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Kaltim mengalami peningkatan dari 108,50 pada

triwulan II 2019 menjadi 113,53 pada triwulan III 2019 (Grafik IV.12). Pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya kedua komponen pembentuk indeks tersebut, yaitu Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) dan Indeks Ekpektasi Konsumen (IEK). Pertumbuhan IKE terutama disebabkan oleh meningkatnya keyakinan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini dan keyakinan terhadap penghasilan dengan masing-masing sebesar 93,17 dan 114,33 pada triwulan II 2019 menjadi 96,83 dan 117,17 pada triwulan III 2019 (Grafik IV.13).

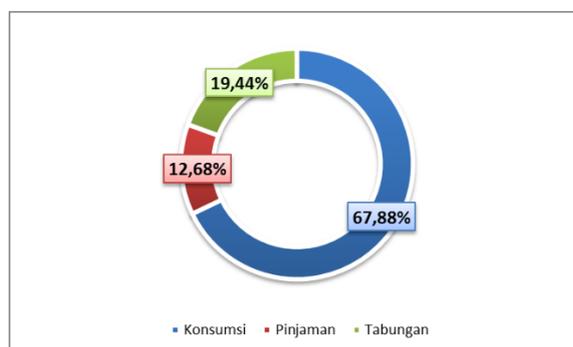


Grafik IV.12 Indeks Keyakinan Konsumen Kaltim



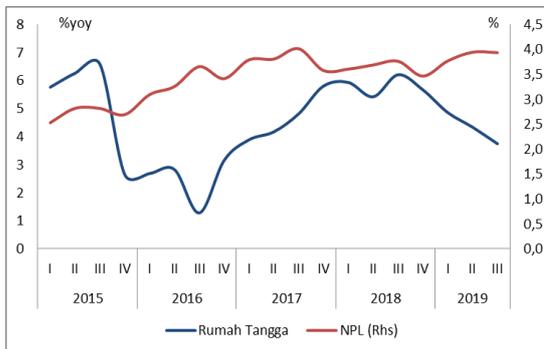
Grafik IV.13 Indeks Kondisi Ekonomi Kaltim

Komponen belanja rumah tangga di Kaltim masih didominasi oleh belanja rumah tangga. Berdasarkan komposisinya, belanja rumah tangga untuk konsumsi menempati porsi terbesar belanja masyarakat Kaltim pada triwulan III 2019 dengan pangsa 67,88% dari keseluruhan belanja rumah tangga. Namun demikian, porsi belanja konsumsi tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan komposisi konsumsi disebabkan oleh normalisasi konsumsi setelah momen Ramadhan dan HBKN Idul Fitri pada triwulan II 2019. Selanjutnya komponen tabungan dan pinjaman pada triwulan III 2019 tercatat menyumbang pangsa masing-masing sebesar 19,44% dan 12,68% (Grafik IV.14).

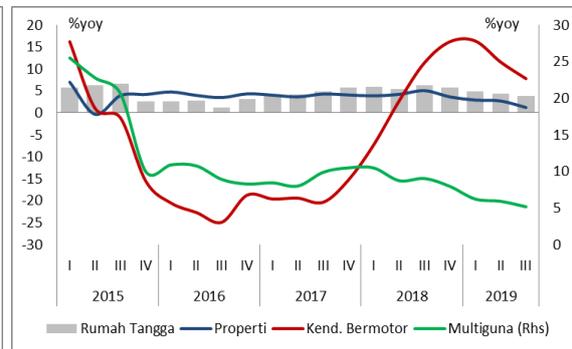


Grafik IV.14 Proporsi Belanja Rumah Tangga Kaltim Triwulan III 2019

Di sisi lain, kinerja penyaluran kredit perbankan kepada debitur Rumah Tangga (RT) pada triwulan III 2019 masih positif. Pertumbuhan kredit rumah tangga pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 3,75% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,34% (Grafik IV.15). Pertumbuhan kredit rumah tangga Kaltim pada triwulan III 2019 yang lebih rendah terjadi di seluruh komponen kredit. Penyaluran kredit properti, kendaraan bermotor, dan multiguna pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh masing-masing sebesar yang masing-masing sebesar 1,22% (yoy), 7,79% (yoy) dan 5,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 yang tercatat masing-masing sebesar 2,70% (yoy), 11,57% (yoy) dan 5,92% (yoy).

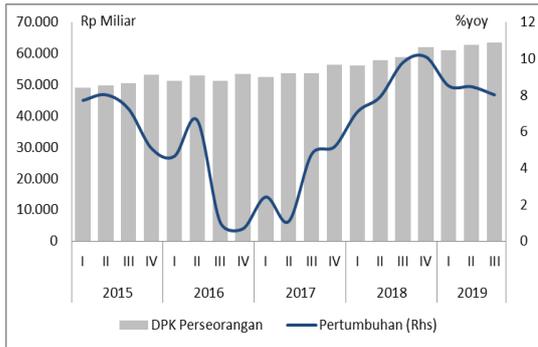


Grafik IV.15 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim

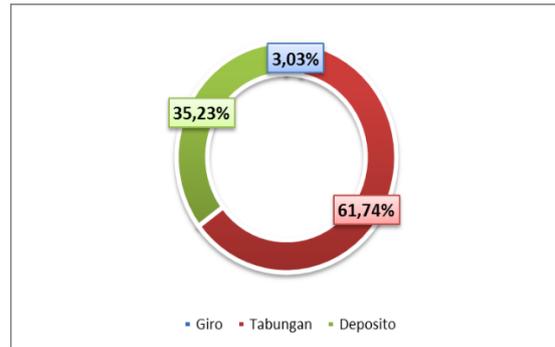


Grafik IV.16 Perkembangan Kredit Rumah Tangga Kaltim Berdasarkan Jenisnya

Sejalan dengan kinerja penyaluran kredit rumah tangga, kinerja penghimpunan DPK rumah tangga pada triwulan III 2019 juga mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan DPK perbankan yang bersumber dari perseorangan (rumah tangga) pada triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 8,02%, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 8,46% (yoy) (Grafik IV.17). Kinerja DPK rumah tangga yang positif tersebut didukung terutama oleh kinerja DPK dalam bentuk tabungan yang tumbuh menjadi 6,54% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2019 yang tercatat sebesar 7,95% (yoy). Di samping itu, kinerja positif DPK juga didukung oleh penghimpunan dana DPK dalam bentuk giro yang tumbuh sebesar 4,91% (yoy) pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan II 2019 sebesar 8,92% (yoy). Berdasarkan pangsaanya, tabungan masih mendominasi DPK perseorangan Kaltim dengan porsi sebesar 61,74%. Sementara itu, DPK perseorangan Kaltim yang disimpan dalam bentuk deposito dan giro masing-masing memiliki porsi sebesar 35,23% dan 3,03% (Grafik IV.18).

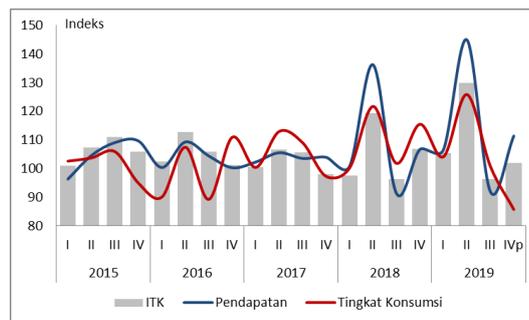


Grafik IV.17 Perkembangan DPK RT Kaltim



Grafik IV.18 Komposisi DPK RT Kaltim Triwulan III 2019

Sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga yang tumbuh lebih rendah pada triwulan III 2019, tingkat optimisme masyarakat yang tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) menunjukkan kinerja yang menurun. Nilai ITK Kaltim mengalami penurunan pada triwulan III 2019 hingga mencapai 96,27 dari triwulan sebelumnya sebesar 129,91 (Grafik IV.19). Penurunan pada triwulan ini dipengaruhi oleh normalisasi setelah momen Ramadhan dan HBKN Idul Fitri pada triwulan sebelumnya sehingga memperlambat komponen pendapatan maupun konsumsi barang dan jasa rumah tangga. Lebih lanjut, dibandingkan provinsi lainnya di Kalimantan, Kaltim memiliki ITK terendah bahkan mendekati ITK Provinsi terendah Nasional yang tercatat 96,13 di Riau pada triwulan III 2019. Rendahnya capaian ITK tersebut juga terkonfirmasi oleh perlambatan konsumsi rumah tangga di triwulan III 2019 yang tercatat tumbuh sebesar 3,10% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,35% (yoy).



Sumber: BPS, diolah

Grafik IV.19 Indeks Tendensi Konsumen Kaltim

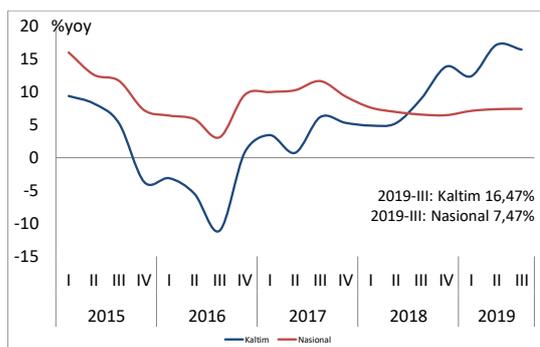
4.2.3 Asesmen Sektor Perbankan

Sejalan dengan kinerja perekonomian Kaltim yang masih tumbuh positif, kinerja intermediasi perbankan di wilayah Kaltim juga menunjukkan kinerja yang positif. Kinerja

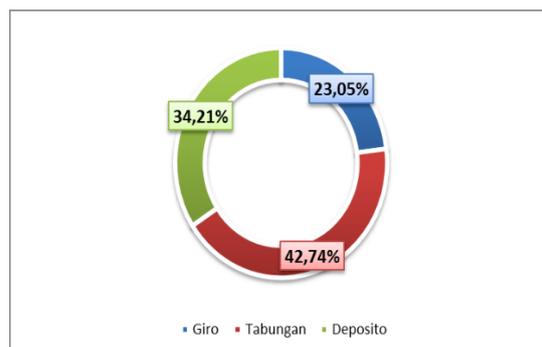
positif fungsi intermediasi perbankan juga dibarengi oleh risiko kredit perbankan yang terjaga di bawah level *threshold*. Berdasarkan jenisnya, peningkatan kinerja intermediasi juga terjadi pada penyaluran kredit UMKM pada triwulan III 2019. Di sisi lain, kinerja intermediasi perbankan syariah mengalami penurunan kinerja yang tercermin dari perlambatan pertumbuhan pembiayaan.

Asesmen Intermediasi Perbankan

Penghimpunan DPK Kaltim pada triwulan III 2019 mencatat kinerja yang positif. Pada periode laporan, DPK tumbuh sebesar 16,47% (yoy), meski lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat 17,19% (yoy), namun masih berada di atas level nasional sebesar 7,47% (yoy). Lebih lanjut, tingkat pertumbuhan DPK nasional mengalami sedikit kenaikan pada triwulan III 2019 menjadi 7,47% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya tercatat sebesar 7,42% (yoy) (Grafik IV.20). Pertumbuhan positif DPK Kaltim pada triwulan III 2019 terutama didukung oleh DPK dalam bentuk giro dan tabungan yang tumbuh masing-masing sebesar 31,23% (yoy) dan 7,21% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 36,67% (yoy) dan 8,63% (yoy). Berdasarkan jenisnya, DPK Kaltim pada triwulan III 2019 masih didominasi oleh DPK dalam bentuk tabungan dengan pangsa 42,74%, diikuti oleh DPK dalam bentuk deposito dan giro dengan pangsa masing-masing sebesar 34,21% dan 23,05% (Grafik IV.21).



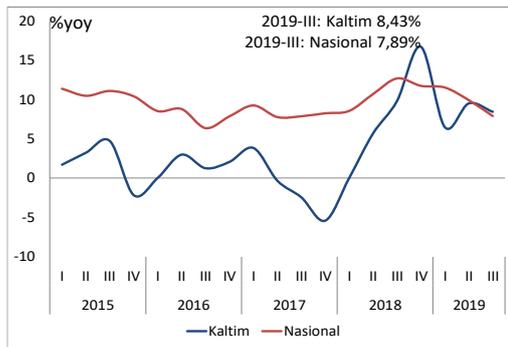
Grafik IV.20 Perkembangan DPK Kaltim dan Nasional



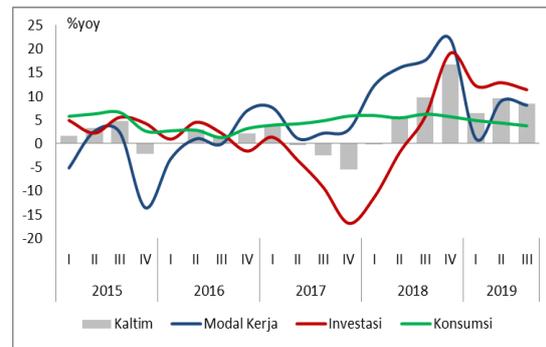
Grafik IV.21 Komposisi DPK Kaltim Triwulan III 2019

Sejalan dengan kinerja DPK yang positif, penyaluran kredit Kaltim pada triwulan III 2019 juga tumbuh positif. Pertumbuhan kredit Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat sebesar 8,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,50% (yoy). Penyaluran kredit yang lebih rendah juga terjadi pada level nasional yang tercatat tumbuh

melambat dari 9,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,89% (yoy) (Grafik IV.22). Kinerja positif penyaluran kredit Kaltim pada triwulan III 2019 dipengaruhi oleh kinerja positif kredit modal kerja dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,10% (yoy) dan 11,37% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,02% (yoy) dan 12,87% (yoy) (Grafik IV.23). Kinerja lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan yang melambat pada triwulan III 2019 menjadi penahan utama pertumbuhan kredit modal kerja Kaltim.

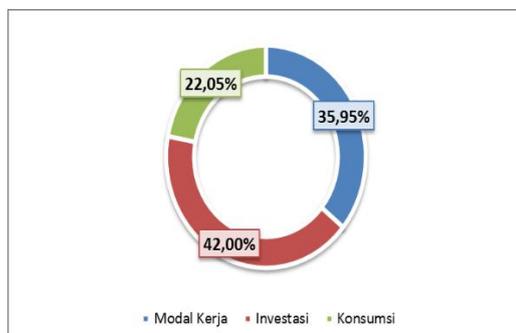


Grafik IV.22 Perkembangan Kredit Kaltim dan Nasional

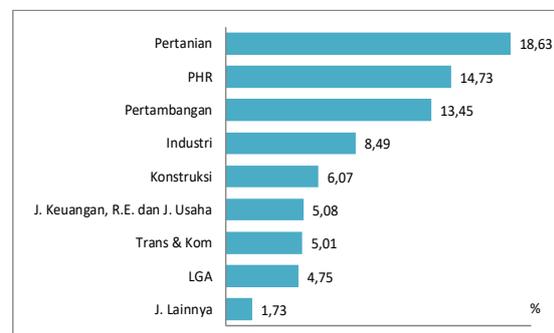


Grafik IV.23 Perkembangan Kredit Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penyaluran kredit perbankan pada triwulan III 2019 masih didominasi oleh kredit investasi. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi masih mendominasi total kredit Kaltim mencapai 42,00% dari total kredit disusul oleh kredit modal kerja dan kredit konsumsi dengan pangsa masing-masing sebesar 35,95% dan 22,05% (Grafik IV.24). Sementara itu, penyaluran kredit pertanian masih mendominasi kredit Kaltim berdasarkan sektornya. Pada triwulan III 2019, pangsa penyaluran kredit ke sektor pertanian mencapai 18,63% dari total kredit. Sektor lain yang juga memiliki pangsa tinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) sebesar 14,73% dan pertambangan sebesar 13,45% (Grafik IV.25).

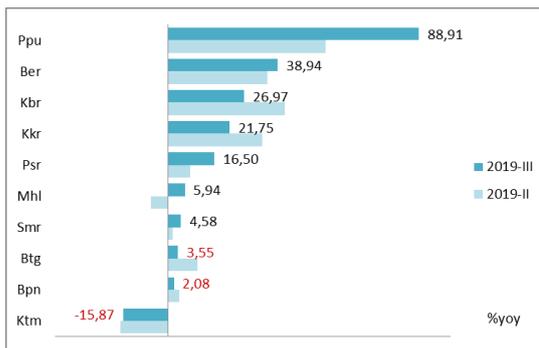


Grafik IV.24 Pangsa Kredit Kaltim Berdasarkan Penggunaan Triwulan III 2019

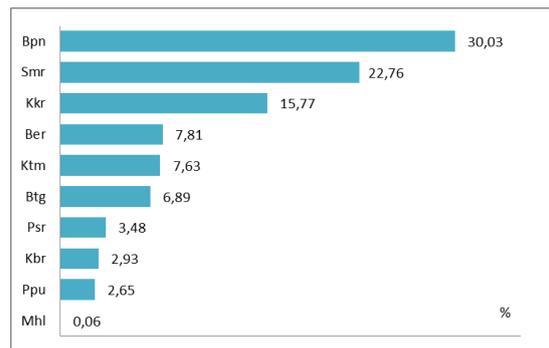


Grafik IV.25 Pangsa Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha Triwulan III 2019

Secara spasial, hampir seluruh Kab/Kota mencatat pertumbuhan kredit yang positif, kecuali Kabupaten Kutai Timur. Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kota Samarinda. Sementara itu, meski mencatat pertumbuhan yang positif, namun penyaluran kredit di Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Sementara itu, penyaluran kredit di Kabupaten Kutai Timur tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan. Kabupaten/Kota dengan tingkat pertumbuhan kredit tertinggi adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 88,91% (yoy) dan diikuti oleh Kabupaten Berau sebesar 38,94% (yoy) (Grafik IV.26). Berdasarkan pangasanya, penyaluran kredit di wilayah Kaltim masih terkonsentrasi di Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi daerah dengan pangsa total sebesar 52,79 % terhadap total kredit di Kaltim (Grafik IV.27). Salah satu faktor penyebab tingginya penyaluran kredit di Kota Balikpapan dan Kota Samarinda karena kedua kota ini merupakan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis di wilayah Kaltim.

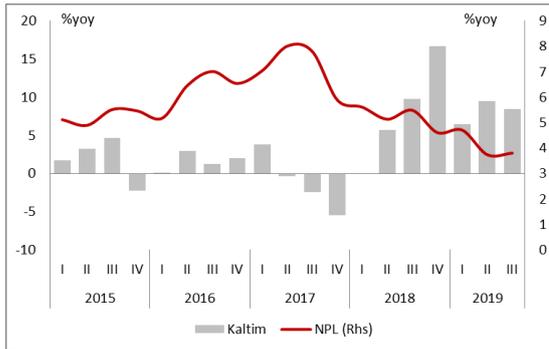


Grafik IV.26 Pertumbuhan Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

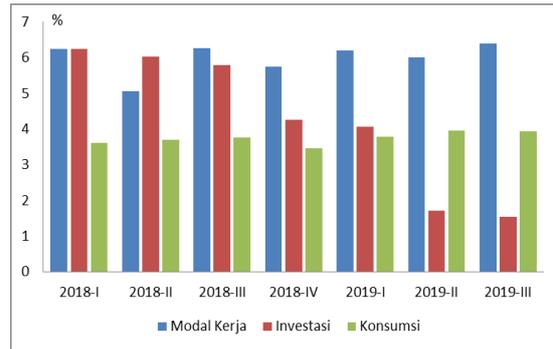


Grafik IV.27 Pangsa Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim Triwulan III 2019

Pertumbuhan penyaluran kredit Kaltim pada triwulan III 2019 diikuti oleh terjaganya kualitas kredit di bawah *threshold* 5%. Risiko kredit Kaltim yang tercermin dari tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) pada triwulan III 2019 masih terjaga di level 3,81%, lebih tinggi dari 3,74% pada triwulan II 2019. Peningkatan risiko kredit ini didukung oleh kenaikan NPL kredit modal kerja. NPL kredit modal kerja Kaltim triwulan III tercatat 6,38%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2019 sebesar 6,01%. Sementara itu, NPL kredit investasi dan konsumsi Kaltim masing-masing tercatat 1,53% dan 3,94% pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan II 2019 sebesar 1,71% dan 2,944% (Grafik IV.29).

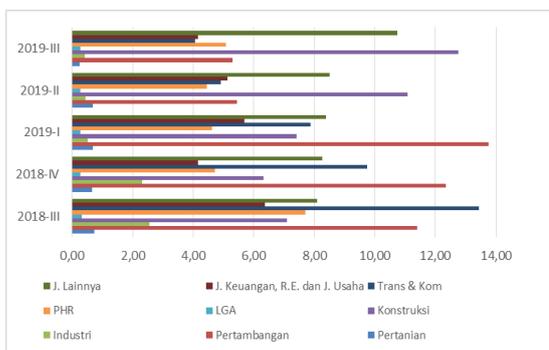


Grafik IV.28 Perkembangan Kredit dan NPL Kaltim

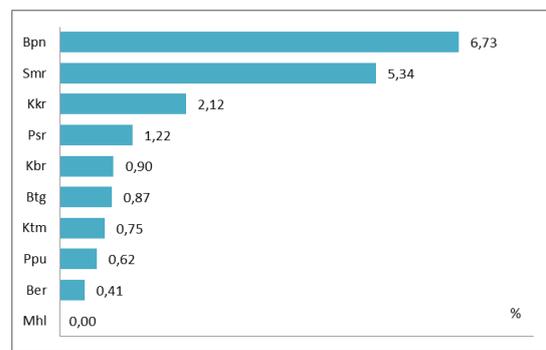


Grafik IV.29 Risiko Kredit Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan

Berdasarkan sektornya, peningkatan risiko kredit Kaltim pada triwulan III 2019 terutama terjadi pada kredit konstruksi serta kredit jasa lainnya. NPL kredit konstruksi Kaltim triwulan III 2019 tercatat 12,77%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,09%. Peningkatan risiko kredit juga terjadi pada sektor jasa lainnya dengan NPL yang meningkat dari 8,51% di triwulan II 2019 menjadi 10,75%. Berdasarkan levelnya, kredit konstruksi memiliki tingkat NPL tertinggi pada triwulan III 2019 sebesar 12,77%. Di sisi lain, tingkat NPL terendah dimiliki oleh kredit pada sektor pertanian sebesar 0,25% (Grafik IV.30). Secara spasial, Kota Balikpapan memiliki risiko kredit tertinggi di triwulan III 2019 dengan NPL sebesar 6,73%. Selain itu, wilayah lainnya yang memiliki tingkat NPL di atas *threshold* 5% adalah Kota Samarinda dengan NPL sebesar 5,34% (Grafik IV.31).



Grafik IV.30 Risiko Kredit Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

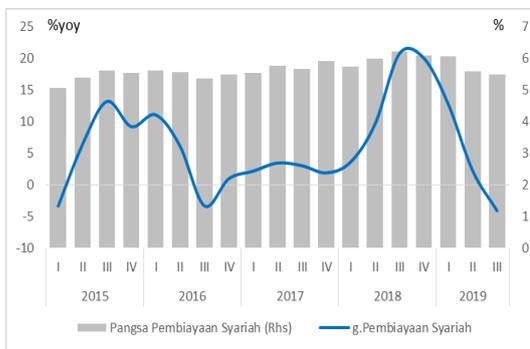


Grafik IV.31 Risiko Kredit Spasial Kabupaten/Kota di Wilayah Kaltim

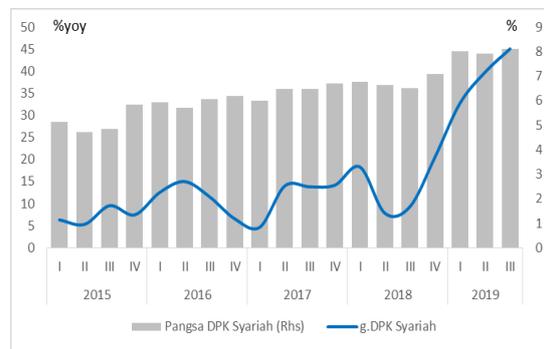
Asesmen Intermediasi Perbankan Syariah

Penyaluran pembiayaan syariah Kaltim triwulan III 2019 tercatat mengalami pengeluaran namun kinerja DPK mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Kinerja pembiayaan syariah Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami penurunan sebesar -4,09% (yoy)

setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 2,24% (yoy) (Grafik IV.32). Berdasarkan jenis penggunaan, penurunan kinerja pembiayaan syariah terutama disebabkan oleh turunnya kinerja pembiayaan jenis modal kerja dan investasi. Penurunan kinerja pembiayaan syariah Kaltim pada triwulan III 2019 berdampak pada turunnya pangsa pembiayaan syariah Kaltim dari semula 5,59% pada triwulan II 2019 menjadi 5,50% terhadap total kredit Kaltim. Di sisi lain, intermediasi perbankan syariah dari sisi penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan dari 39,77% (yoy) pada triwulan II 2019 menjadi 45,10% (yoy) pada triwulan III 2019 (Grafik IV.33). Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penghimpun DPK syariah, pangsa DPK syariah mengalami peningkatan dari 7,91% pada triwulan II 2019 menjadi 8,11% pada triwulan III 2019.

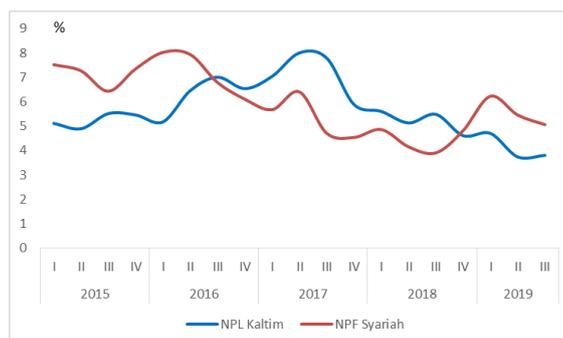


Grafik IV.32 Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim



Grafik IV.33 Perkembangan DPK Perbankan Syariah Kaltim

Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko pembiayaan syariah Kaltim tercatat masih berada di atas *threshold* walaupun tidak setinggi periode sebelumnya. Tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) Kaltim tercatat 5,06% pada triwulan III 2019, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,46%. Berdasarkan jenis penggunaan, risiko pembiayaan tertinggi dimiliki oleh pembiayaan modal kerja dengan tingkat NPF mencapai 14,30%. Tingkat risiko pembiayaan syariah Kaltim lebih tinggi jika dibandingkan tingkat risiko kredit perbankan konvensional yang tercatat 3,81% pada triwulan III 2019 (Grafik IV.34).

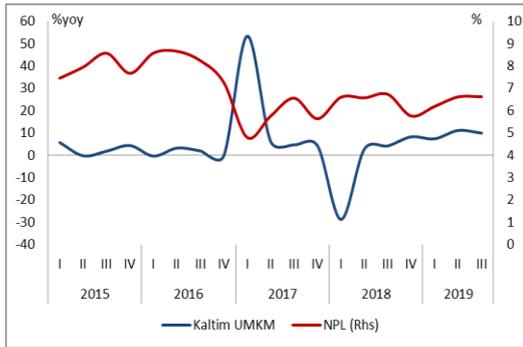


Grafik IV.34 Perkembangan Risiko Pembiayaan Perbankan Syariah Kaltim

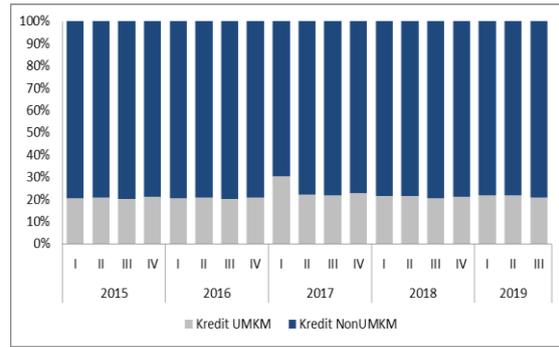
4.3 Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Sejalan dengan kinerja pertumbuhan kredit Kaltim secara umum, penyaluran kredit UMKM Kaltim juga mengalami pertumbuhan yang positif pada triwulan III 2019. Pertumbuhan kredit UMKM Kaltim triwulan III 2019 tercatat tumbuh sebesar 9,90% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11,08% (yoy) (Grafik IV.35). Pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah menyebabkan penurunan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit di Kaltim yang turun dari 21,78% di triwulan II 2019 menjadi 20,83% pada triwulan III 2019 (Grafik IV.36). Namun di sisi lain, tren penyaluran kredit UMKM Kaltim di atas 20% telah sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan rasio kredit UMKM terhadap total portofolio kredit perbankan sebesar 20% pada tahun 2018. Lebih lanjut, bagi perbankan yang telah memiliki portofolio kredit UMKM lebih besar dari 20%, Bank Indonesia memberikan pelonggaran batas atas *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 94% dari sebelumnya antara 78-92%.

Pertumbuhan kredit UMKM Kaltim triwulan III 2019 yang positif disertai dengan risiko kredit yang stabil. Risiko kredit UMKM yang tercermin dari tingkat NPL yang relatif tetap dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,62%. Risiko kredit UMKM Kaltim triwulan III 2019 tersebut terutama didorong oleh NPL pada kredit UMKM jenis jasa investasi. Berdasarkan lapangan usaha, NPL kredit UMKM tertinggi dialami oleh sektor listrik, gas, dan air sebesar 22,00%, diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 20,98%.

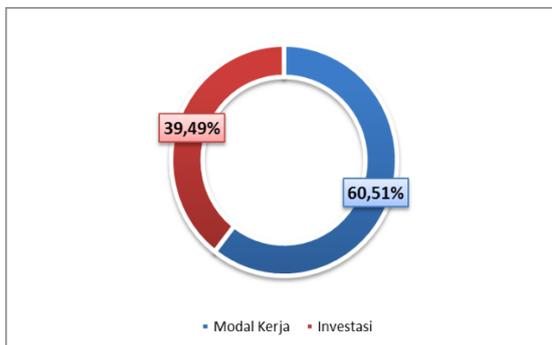


Grafik IV.35 Perkembangan Kredit UMKM Kaltim

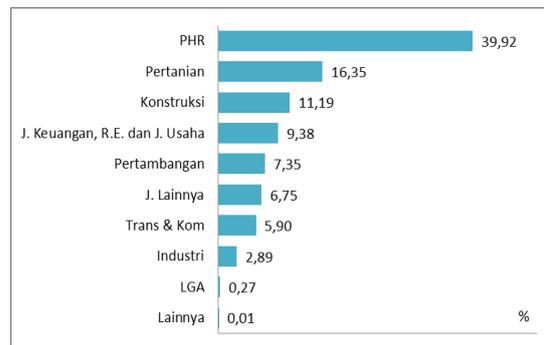


Grafik IV.36 Perkembangan Rasio Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Kaltim

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit UMKM di Kaltim pada triwulan III 2019 masih didominasi oleh jenis kredit modal kerja. Berdasarkan pangsaanya, kredit modal kerja dan kredit investasi masing-masing menyumbang pangsa sebesar 60,51% dan 39,49% terhadap total kredit UMKM Kaltim (Grafik IV.37). Lebih lanjut berdasarkan sektornya, kredit UMKM Kaltim di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) mendominasi penyaluran kredit UMKM di Kaltim dengan pangsa 39,92%, disusul oleh pertanian dan konstruksi dengan pangsa masing-masing sebesar 16,35% dan 11,19% (Grafik IV.38).



Grafik IV.37 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Jenis Penggunaan Triwulan III 2019



Grafik IV.38 Komposisi Kredit UMKM Kaltim Berdasarkan Lapangan Usaha

V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

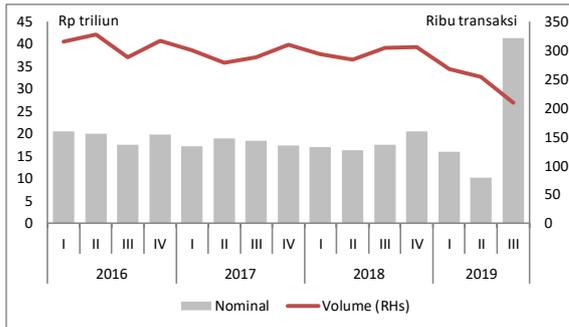
Pada triwulan III 2019, penyelenggaraan sistem pembayaran Kalimantan Timur mengalami peningkatan dengan diiringi juga oleh peningkatan net outflow. Transaksi non tunai juga mengalami peningkatan yang bersumber dari volume dan nilai transaksi transportasi online serta e-commerce di wilayah Kaltim.

5.1 Gambaran Umum

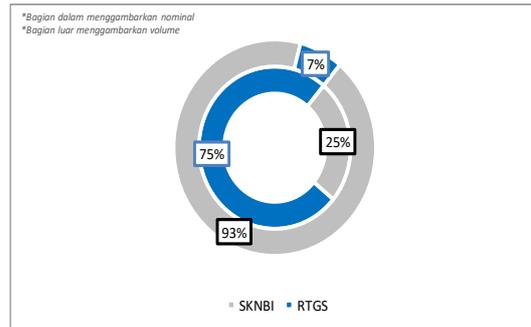
Pada triwulan III 2019 andil transaksi non tunai mengalami peningkatan. Kenaikan andil transaksi non tunai di Provinsi Kaltim terjadi baik dari sisi Bank Indonesia sebagai penyelenggara sistem pembayaran melalui BI-RTGS dan SKNBI maupun dari sisi Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang berasal dari luar Bank Indonesia, seperti PJSP yang berbasis *Market Place* atau PJSP yang berbasis Transportasi Online. Peningkatan andil transaksi non tunai pada perekonomian Kalimantan Timur dibarengi dengan peningkatan *net outflow* uang rupiah pada triwulan III 2019. Peningkatan volume dan nilai transaksi non tunai ini merupakan sinyal baik terhadap perekonomian Provinsi Kaltim karena selaras dengan peningkatan PDRB Kaltim pada triwulan III 2019. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa instrumen pembayaran non tunai merupakan instrumen yang andal sebagai alat pembayaran yang sah untuk kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat, baik secara retail atau dalam jumlah besar.

5.2 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia

Secara nominal, transaksi non tunai Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III 2019, jumlah transaksi non tunai Kaltim sebesar Rp41,38 triliun dengan volume sebesar 208,91 ribu transaksi. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2019 yang mencapai Rp10,2 triliun dengan volume sebesar 208,9 ribu transaksi (Grafik V.1). Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi non tunai Kaltim pada periode pelaporan meningkat sebesar 135,51% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan peningkatan ekonomi Kaltim yang cukup tinggi pada triwulan III 2019. Berdasarkan jenis instrumennya, transaksi non tunai Kaltim triwulan III 2019 didominasi oleh transaksi yang menggunakan RTGS senilai Rp31,26 triliun dengan volume sebanyak 14,4 ribu transaksi (Grafik V.2). Peningkatan transaksi non tunai Kaltim triwulan III 2019 dipengaruhi oleh peningkatan kinerja korporasi dan pemerintah yang mengalami pada periode laporan. Hal ini terkonfirmasi dari pertumbuhan simpanan giro korporasi dan pemerintah di perbankan triwulan III 2019 yang masing masing tumbuh sebesar 20,08% (yoy) dan 36,64% (yoy).

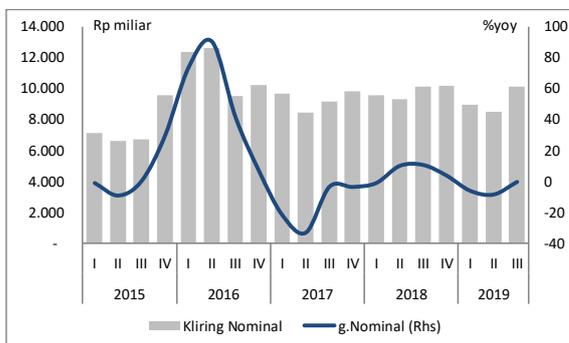


Grafik V.1 Perkembangan Nominal Transaksi Non Tunai Kaltim

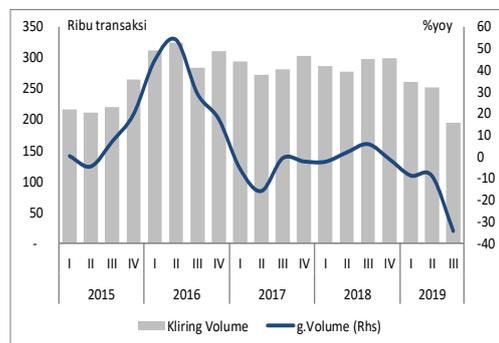


Grafik V.2 Transaksi Non Tunai Kaltim Triwulan III 2019 Berdasarkan Instrumennya

Pada triwulan III 2019, jumlah transaksi yang menggunakan SKNBI mengalami perbaikan. Nominal transaksi SKNBI triwulan III 2019 tercatat sebesar Rp10,21 triliun, terkontraksi sebesar -0,34% (yoy) sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -8,52% (yoy) (Grafik V.3). Namun peningkatan tersebut tidak diiringi dari sisi volume transaksi, dimana transaksi SKNBI Kaltim triwulan III 2019 tercatat 194,4 ribu transaksi atau terkontraksi -34,64% (yoy) lebih dalam jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar -9,07% (yoy) (Grafik V.4).



Grafik V.3 Perkembangan Nominal Transaksi Kliring Kaltim



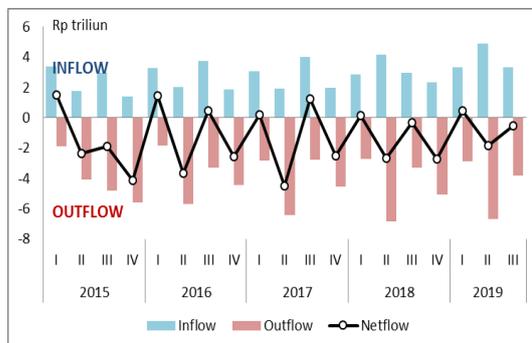
Grafik V.4 Perkembangan Volume Transaksi Kliring Kaltim

DI sisi lain, transaksi RTGS Kaltim juga menunjukkan peningkatan selama triwulan III 2019, baik dari sisi nominal maupun volume transaksi. Transaksi RTGS Kaltim pada triwulan II 2019 tercatat Rp 31,2 triliun, tumbuh sebesar 321% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 075% (yoy). Peningkatan RTGS searah dengan kinerja positif korporasi pada triwulan III 2019 yang tercatat memiliki pertumbuhan cukup tinggi khususnya di lapangan usaha pertambangan maupun perdagangan. Selarasa dengan hal tersebut, volume transaksi RTGS Kaltim triwulan III 2019 tercatat sebesar 14 ribu transaksi, atau tumbuh sebesar

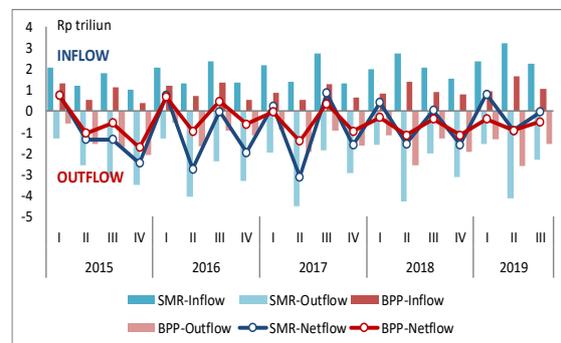
123,76% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat mengalami kontraksi sebesar -71,87% (yoy).

5.3 Pengelolaan Uang Rupiah

Pengelolaan Uang Rupiah merupakan kegiatan utama Bank Indonesia dalam memastikan ketersediaan uang rupiah yang cukup dengan kondisi yang layak edar. Provinsi Kaltim merupakan salah satu provinsi yang mempunyai kecenderungan *outflow*. Pada triwulan III 2019, uang rupiah yang diedarkan Bank Indonesia (*outflow*) tercatat sebesar Rp3,8 triliun, mengalami peningkatan dibanding triwulan III 2018 sebesar 16% (yoy). Sedangkan untuk penarikan uang dari peredaran (*inflow*) Bank Indonesia pada triwulan III 2019 melakukan penarikan sebesar Rp3,3 triliun. Oleh karena itu *net outflow* Provinsi Kalimantan Timur pada triwulan III 2019 sebesar Rp528 miliar. Secara spasial, posisi Bank Indonesia Provinsi Kaltim mengalami perubahan dari sebelumnya net *inflow* sebesar Rp 51 miliar pada triwulan III 2018 menjadi net *outflow* sebesar Rp 31,14 miliar pada triwulan III 2019. Di sisi lain, Bank Indonesia Kota Balikpapan mengalami peningkatan posisi net *outflow* dari Rp369 miliar pada triwulan III 2018 menjadi Rp496 miliar pada triwulan III 2019.



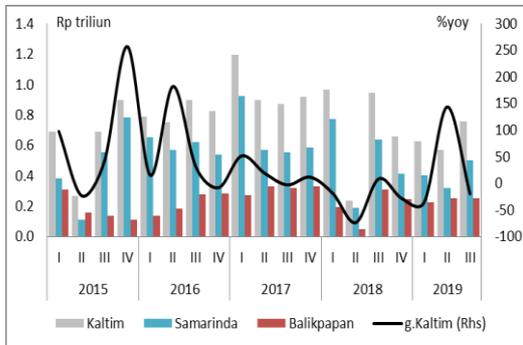
Grafik V.5 Pengedaran Uang Kartal Kaltim



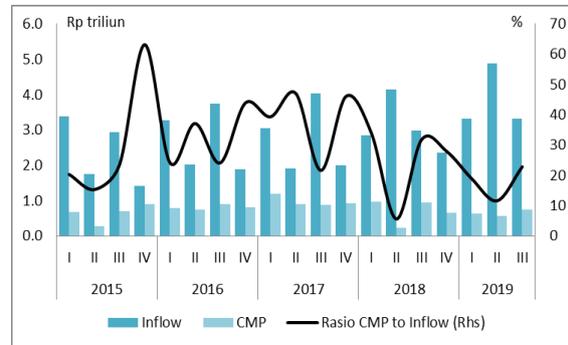
Grafik V.6 Pengedaran Uang Kartal Kaltim – Spasial

Dalam rangka peningkatan kualitas uang layak edar, Bank Indonesia terus melakukan upaya untuk memastikan kualitas uang rupiah yang beredar di masyarakat. Dasar kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan kualitas uang rupiah adalah *Clean Money Policy* (CMP). Kebijakan CMP Bank Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya Kas Keliling Dalam Kota (KKDK), Kas Keliling Luar Kota (KKLK), Penukaran Uang Tidak Layak Edar, dan BI Jangkau. Pada triwulan III 2019, penarikan UTLE yang dilakukan Bank Indonesia di wilayah Kaltim tercatat sebesar Rp755 triliun, menurun dibandingkan triwulan III 2018 sebesar Rp943 miliar (Grafik

V.7). Tingginya penarikan UTLE pada triwulan III 2019 seiring dengan upaya peningkatan kualitas ULE melalui optimalisasi kegiatan KKDK dan KKLK yang dilakukan di wilayah Kaltim. Selanjutnya, rasio penarikan UTLE terhadap *inflow* pada triwulan III 2019 tercatat 22,83% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2018 yaitu sebesar 31,75% (yoy) (Grafik V.8).



Grafik V.7 Penarikan Uang Tidak Layak Edar Kaltim
Grafik



Grafik V.8 Penarikan Uang Tidak Layak Edar terhadap
Inflow Kaltim

Dalam rangka meningkatkan peran pengedaran uang rupiah di seluruh kota/kabupaten di Kalimantan Timur, Bank Indonesia bekerjasama dengan BPD Kaltim Kaltara untuk membuka lokasi kas titipan di 4 (empat) lokasi, yakni di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan Paser. *Dropping* Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Hasil Cetak Sempurna (HCS) ke Bank Pengelola Kas Titipan rutin dilaksanakan untuk memastikan kondisi uang di beberapa lokasi di Kalimantan Timur yang belum dapat dijangkau oleh kegiatan Kas Keliling. *Dropping* ke empat lokasi kas titipan pada triwulan III 2019 sebesar Rp1,4 triliun dan dari keempat kas titipan tersebut Bank Indonesia dapat menarik UTLE sebesar Rp35 miliar sepanjang triwulan III 2019.

Salah satu kegiatan yang menjadi senjata utama Bank Indonesia untuk meningkatkan kualitas uang layak edar di wilayah Kaltim, terutama di wilayah pelosok adalah Kas Keliling Luar Kota. Kas Keliling Luar Kota ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan secara langsung agar masyarakat Kalimantan Timur memegang Uang Rupiah dengan kondisi terbaik. Pada triwulan II 2019, Bank Indonesia di wilayah Kaltim melakukan kas keliling dalam kota yaitu di Samarinda dan Balikpapan, sedangkan luar kota yaitu di Bontang, Muara Wahau, Mahakam Ulu, Muara Lawa, Kota Bangun, dan Samboja. Bank Indonesia juga melakukan kegiatan kegiatan kas keliling hingga wilayah pelosok dan terpencil, seperti Kecamatan Long Bagun di Kabupaten Mahakam Ulu. Jumlah uang yang diedarkan melalui kegiatan kas keliling sebesar Rp19 miliar pada triwulan III 2019. Ke depan, untuk memperluas cakupan wilayah kebijakan CMP, Bank

Indonesia akan memulai Program BI Jangkau dengan mengirimkan Uang Rupiah HCS ke daerah-daerah pelosok dan daerah strategis di Kalimantan Timur. Pengiriman uang melalui program BI Jangkau ini akan dimulai pada November 2019 dan bekerjasama dengan BPD Kaltim Kaltara sebagai Bank Pemerintah yang memiliki jaringan kantor terbanyak di Kalimantan Timur. Berikut adalah 14 (empat belas) kecamatan lokasi BI Jangkau :

Tabel V.1 Kecamatan Lokasi BI Jangkau

No	Kabupaten	Kecamatan
1	Mahakam Ulu	Long Apari
		Long Pahangai
2	Kutai Barat	Long Iram
		Muara Lawa
3	Kutai Kartanegara	Marangkayu
		Muara Badak
		Kota Bangun
4	Kutai Timur	Kongbeng
		Muara Wahau
		Telen
		Sangkulirang
5	Berau	Pulau Derawan
		Talisayan
		Batu Putih

Sementara itu, jumlah uang palsu yang ditemukan di wilayah Kaltim mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Uang palsu yang ditemukan oleh masyarakat atau perbankan di Provinsi Kaltim pada triwulan III 2019 mencapai 336 bilyet, meningkat dibandingkan triwulan III 2018 sebanyak 248 bilyet. Secara spasial, jumlah uang palsu yang ditemukan oleh Bank Indonesia Provinsi Kaltim tercatat 303 bilyet dan Bank Indonesia Balikpapan sebanyak 33 bilyet pada triwulan III 2019. Bank Indonesia terus melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat, termasuk pegawai/karyawan, mahasiswa/i dan siswa/i sekolah di wilayah Kaltim untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait ciri-ciri keaslian uang rupiah. Melalui sosialisasi dimaksud, diharapkan masyarakat semakin memahami keaslian uang rupiah dan segera melaporkan kepada Bank Indonesia atau kepolisian jika menemukan uang yang diragukan keasliannya.

5.4 Program Elektronifikasi Transaksi Keuangan

Elektronifikasi merupakan proses konversi model transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai menjadi non tunai dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan, kecepatan, dan akurasi transaksi. Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan volume transaksi non tunai untuk menciptakan iklim transaksi yang cepat dan praktis sehingga dapat

mendukung efisiensi dan transparansi transaksi. Beberapa program elektronifikasi yang tengah digalakkan oleh Bank Indonesia adalah Elektronifikasi Transaksi Ritel dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah. Bentuk-bentuk elektronifikasi transaksi ritel diantaranya adalah elektronifikasi sektor transportasi dan perdagangan barang/jasa. Sedangkan bentuk-bentuk program elektronifikasi transaksi pemerintah adalah Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), Bantuan Sosial Non Tunai (Bansos NT), dan Bantuan Operasional Sekolah Non Tunai (Bansos NT). Selain itu, Bank Indonesia juga terus meningkatkan akseptasi Kartu Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dalam rangka memperkuat *payment gateway* nasional yang aman dan berdaulat.

Elektronifikasi Transaksi Tol (Balikpapan – Samarinda)

Tol Balikpapan – Samarinda (Bal – Sam) merupakan ruas tol pertama di Pulau Kalimantan yang diharapkan mampu menjadi sarana baru untuk menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di Provinsi Kalimantan Timur. Tol Bal – Sam merupakan jalan tol dengan panjang total 99 Km dan membentang dari Kota Balikpapan sampai Kota Samarinda. Ruas Tol Bal – Sam dibagi menjadi 5 (lima) seksi. Sesuai dengan Peraturan Menteri PU-PR Republik Indonesia No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol, seluruh transaksi pembayaran retribusi jalan tol harus dilakukan secara non tunai. Kebijakan ini perlu dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembayaran retribusi tol. Selain itu, kebijakan non tunai dapat mengurangi biaya *cash handling* dan mengurangi risiko *human error* untuk pencatatan harian transaksi di Jalan Tol. Instrumen yang digunakan sebagai alat pembayaran di Tol Balikpapan – Samarinda adalah Uang Elektronik (UE) Berbasis *Chip*. Untuk itu, demi memastikan kelancaran dan kesiapan transaksi non tunai, Bank Indonesia terus mengadakan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholders* terkait, seperti pengelola jalan tol, perbankan, serta *merchant-merchant* yang menyediakan UE serta sarana *top-up* saldo. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kaltim melalui berbagai saluran komunikasi untuk memastikan ketika jalan tol Bal – Sam mulai beroperasi, masyarakat sudah siap untuk memakai jalan tol Bal – Sam serta telah mengetahui cara penggunaan UE tersebut.

Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai

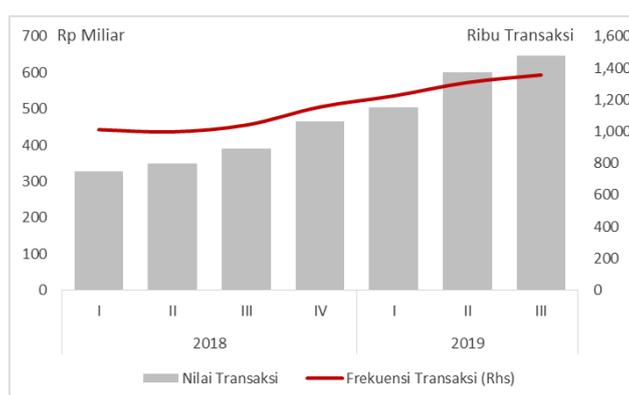
Bantuan Sosial Non Tunai (Bansos NT) merupakan program pemberian bantuan secara langsung kepada masyarakat berpenghasilan ke bawah dengan kriteria kemiskinan tertentu. Bansos sendiri terdiri dari dua jenis bantuan, yakni Bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). PKH merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah kepada keluarga miskin yang memiliki kriteria tertentu, diantaranya terdapat balita, ibu hamil, manula, dan penyandang disabilitas. PKH diberikan dalam bentuk uang dan didistribusikan setiap tiga bulan. Sedangkan BPNT merupakan pemberian bantuan pangan kepada keluarga miskin berupa beras dan telur serta didistribusikan setiap bulan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui E-Waroeng. Dalam rangka mendukung program pemerintah, Bank Indonesia terus melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak, seperti Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping, *e-waroeng* dan bank penyalur. Selain memperluas akseptasi, diharapkan sosialisasi ini dapat mengurai permasalahan yang timbul dalam penyaluran bansos non tunai. Bansos Non Tunai ini dapat meningkatkan akurasi, efisiensi dan transparansi penyaluran bansos kepada KPM. Selain meningkatkan akurasi, efisiensi dan transparansi, Bansos NT juga dapat meningkatkan persentase inklusi keuangan masyarakat Kalimantan Timur dikarenakan dengan Bansos NT setiap KPM diwajibkan untuk memiliki rekening di bank penyalur.

Selama triwulan III 2019, penyaluran BPNT Kaltim mencapai Rp23,9 miliar yang didistribusikan kepada 217.363 KPM. Sedangkan untuk PKH, penyaluran pada triwulan III 2019 tercatat Rp54,6 miliar kepada 66.012 KPM. Sampai dengan triwulan III 2019, BPNT telah terdistribusi ke seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian ini merupakan signal positif yang menunjukkan peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat enam kabupaten di Kaltim yang menjadi lokasi terakhir penyaluran BPNT, yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Enam kabupaten tersebut melakukan penyaluran BPNT pada triwulan III 2019, tepatnya bulan September 2019.

Perkembangan E-Commerce

Transaksi e-commerce di Kaltim pada triwulan III 2019 mengalami peningkatan. Nominal transaksi e-commerce di Kaltim pada triwulan III 2019 tercatat mencapai Rp646,7 miliar atau meningkat sebesar 65,9 % (yoy) dibandingkan dengan triwulan III 2018 yang tercatat Rp389,6 miliar. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah transaksi e-commerce Kaltim pada triwulan III 2019 naik dari 1,04 juta transaksi pada triwulan III 2018 menjadi 1,35 juta transaksi atau tumbuh 17% (yoy) (Grafik V.9).

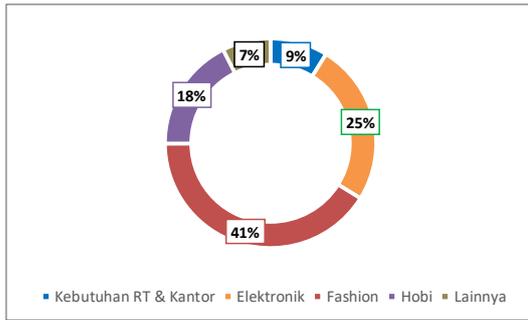


Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah

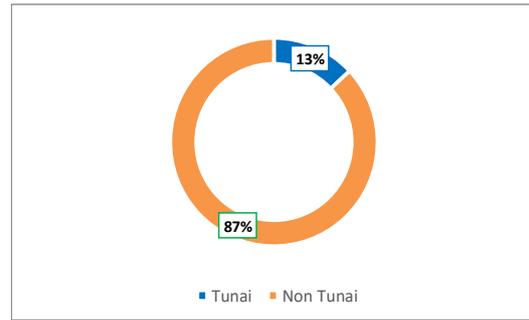
Grafik V.9 Perkembangan Transaksi E-Commerce Kaltim

Berdasarkan kategori barang⁵, transaksi pada E-commerce masih didominasi oleh barang *fashion* dengan pangsa sebesar 41,2% dari seluruh barang yang dijual pada aplikasi e-commerce. Pangsa pasar e-commerce terbesar kedua adalah barang elektronik dengan pangsa sebesar 25%. Selanjutnya disusul oleh barang hobi dengan pangsa menyentuh angka 17,6%. Kemudian disusul oleh Kebutuhan Rumah Tangga dan Kantor yang memiliki pangsa pasar sebesar 8,8%. Sisanya merupakan barang lainnya. Hasil olahan data mengenai pembagian pangsa barang ini menunjukkan bahwa usaha *fashion* merupakan salah satu usaha yang paling terdistribusi dengan adanya konsep *sharing economy* ini. Kondisi ini menjadi peringatan bagi pengusaha *fashion* konvensional untuk segera melakukan *shifting* bisnis atau mengembangkan bisnis dengan terobosan lain agar dapat tetap bersaing dengan model bisnis lainnya (Grafik V.10 dan V.11).

⁵ Kategori kebutuhan rumah tangga dan kantor meliputi buku, alat tulis, makanan dan minuman; Kategori elektronik meliputi *handphone*, komputer dan aksesoris; Kategori *fashion* meliputi *personal care* dan kosmetik; Kategori hobi meliputi fotografi, musik, film, olahraga dan koleksi lainnya; Kategori lainnya meliputi ticket, *voucher* dan barang lainnya.



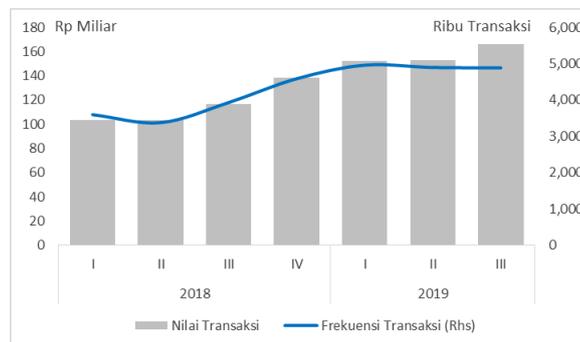
Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah
Grafik V.10 Pangsa Transaksi E-Commerce Kaltim Berdasarkan Kategori Barang Triwulan III 2019



Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah
Grafik V.11 Pangsa Transaksi E-Commerce Kaltim Berdasarkan Metode Pembayaran Triwulan III 2019

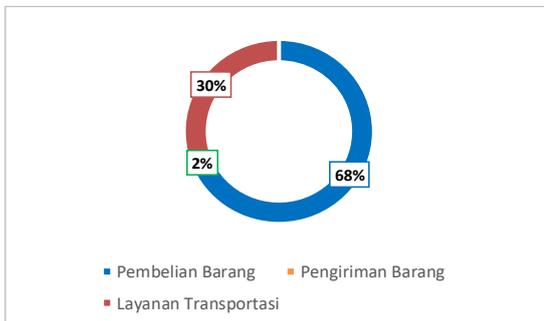
Perkembangan Layanan Transportasi Online

Transportasi *Online* merupakan sebuah bentuk implementasi dari *sharing economy* dan sampai saat ini dapat pula mengakomodir kebutuhan lain di luar kebutuhan pengantaran manusia. Berdasarkan penyediaan produk, jasa transportasi *online* saat ini dapat mengakomodir beberapa kebutuhan masyarakat seperti pembelian barang utamanya makanan, ekspedisi barang, serta layanan pengantaran manusia. Berdasarkan data yang diperoleh Bank Indonesia, jumlah transaksi *e-commerce* Kaltim pada triwulan III 2019 naik dari 3,9 juta transaksi di triwulan III 2018 menjadi 4,8 juta transaksi atau tumbuh 24% (yoy) (Grafik V.12). Secara nominal, jumlah transaksi Kaltim menyumbang pangsa 49,2% transaksi *e-commerce* di wilayah Kalimantan atau 1,71% terhadap total transaksi nasional. Sejalan dengan hal tersebut, nominal transaksi transportasi *online* di Kaltim pada triwulan III 2019 mencapai Rp 166,4 miliar atau meningkat 42,3% (yoy) dibandingkan triwulan III 2018 yang tercatat Rp 116,9 miliar.



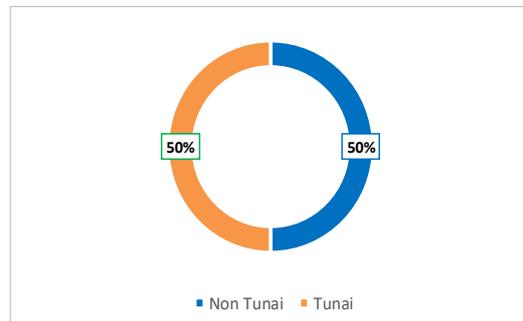
Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah
Grafik V.4 Perkembangan Transaksi Transportasi Online Kaltim

Berdasarkan kategori layanan, transaksi transportasi online Kaltim pada triwulan III 2019 masih didominasi oleh kategori pembelian barang dengan pangsa 67,7%. Kemudian diikuti oleh layanan transportasi dengan pangsa pasar sebesar 30,4 % dan terakhir disusul oleh layanan pengiriman barang dengan pangsa 1,9% (Grafik V.13). Kondisi ini mencerminkan bahwa usaha jual beli barang begitu terbantu dengan adanya jasa transportasi *online*. Selain terbantu dari segi pengiriman barang, pembeli juga dapat terbantu dengan mudahnya mengakses menu apa saja yang ditawarkan oleh seluruh penjual yang terdaftar di aplikasi transportasi online tersebut. Secara *cost efficiency*, hal ini dapat mengurangi biaya pemasaran yang sejauh ini menjadi salah satu komponen biaya terbesar dari sebuah usaha disamping biaya bahan baku dan biaya pengolahan. Apabila ditinjau menurut metode pembayaran yang dilakukan, terdapat 50% transaksi pada aplikasi transportasi *online* yang dilakukan menggunakan Uang Elektronik, sedangkan sisanya dibayar menggunakan uang tunai (Grafik V.14). Kondisi tersebut menandakan bahwa kesadaran masyarakat Kaltim untuk menggunakan alat pembayaran non tunai dalam transaksi transportasi online sudah cukup tinggi. Dengan demikian, sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur telah mengetahui manfaat transaksi menggunakan instrumen non tunai karena lebih cepat dan lebih efisien.



Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah

Grafik V.5 Pangsa Transaksi
Transportasi *Online* Kaltim Berdasarkan Layanan



Sumber: Big Data Bank Indonesia, diolah

Grafik V.6 Pangsa Transaksi
Transportasi *Online* Kaltim Alat Pembayaran

BOKS V.1

“Upaya Elektronifikasi Kalimantan Timur”

Upaya Bank Indonesia untuk mendorong elektronifikasi di Kalimantan Timur terus berlanjut demi mewujudkan masyarakat Kaltim menjadi *cashless society*. Bank Indonesia terus bekerja sama dengan pemerintah daerah (PEMDA) dalam rangka perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP). Sinergi ini merupakan wujud penerapan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana Pemprov/Pemkot/Pemkab harus mengencangkan transaksi secara non tunai di lingkungan pemerintah. ETP ini juga merupakan salah satu wujud implementasi Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Sebagai turunan SE Kemendagri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 51/Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Transaksi Non Tunai dimana penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai sedangkan pengeluaran daerah paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dapat dilakukan secara tunai.

Percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan pemda bertujuan untuk meningkatkan keuangan inklusif yang terarah, efisien dan tersinergi melalui pemanfaatan teknologi, inovasi produk dan saluran distribusi, serta mendorong transaksi keuangan secara elektronik di lingkungan pemda. Program ini diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan potensi penerimaan pemda. Untuk memastikan bahwa pengembangan ETP berjalan secara terintegrasi dan berkesinambungan, akan dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD dimaksud merupakan kolaborasi antara 4 kementerian/lembaga yakni Kemenko Perekonomian, Kemendagri, Bank Indonesia dan Kemenkeu. Selanjutnya, Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Perluasan Digitalisasi Daerah (PDD) akan dibentuk pada tahun 2020 sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk mendorong inovasi, mempercepat dan memperluas pelaksanaan ETP, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital guna mendukung kinerja TP2DD.

Beberapa program perluasan elektronifikasi di Kalimantan Timur telah menjadi fokus utama pemerintah provinsi . Di tingkat provinsi, Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk TP2DD Provinsi Kalimantan Timur tahun depan. Sebagai *quick win*, akan diluncurkan program e-retribusi pasar di Kota Samarinda pada akhir tahun ini. Sebagai persiapan pembentukan TP2DD Provinsi Kaltim, pada tanggal 30 September 2019 telah dilaksanakan Sarasehan Elektronifikasi Transaksi Keuangan Kalimantan Timur di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Acara tingkat Provinsi Kalimantan Timur ini mengangkat tema “Percepatan Elektronifikasi Transaksi Keuangan di Provinsi Kalimantan Timur” dengan peserta dari seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim. Selanjutnya, indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat elektronifikasi transaksi Pemda yakni penerapan SP2D *online*, *payroll* secara non tunai, dan penggunaan *tapping box*. Sebagai informasi, seluruh Pemda di Kalimantan Timur telah menerapkan SP2D *Online* yang sudah sepenuhnya berakhir di rekening (non tunai) kecuali di Kab. Mahakam Ulu dimana SKPD terkait di kabupaten dimaksud masih berkolaborasi dengan perbankan dalam pengembangan sistem. Sementara itu, *payroll* seluruh pegawai di lingkungan Pemda (ASN) di Kalimantan Timur telah dilakukan secara non tunai. Dalam rangka mendukung optimalisasi elektronifikasi penerimaan Pemda di Balikpapan dan Samarinda, khususnya dalam hal penerimaan pajak, digunakan *tapping box* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Sistem Pelaporan Pajak Daerah Online (E-SPTPD) dari pelaku usaha hotel, restoran dan tempat hiburan. Kunci keberhasilan dalam penerapan *tapping box* adalah kerjasama dengan instansi terkait untuk *law enforcement* dan *sharing* penyediaan alat. Dengan *tapping box* dimaksud, pajak online dari rumah makan, hotel, dan tempat hiburan dapat termonitor secara online. Untuk di Samarinda, telah tersedia 26 *tapping box*, sedangkan terdapat 25 unit *tapping box* di Balikpapan.

Di tingkat provinsi, Bapenda Provinsi Kalimantan Timur meluncurkan e-Samsat tahun 2016 bersama 6 perbankan yakni Bankaltimtara, BNI, BTN, BRI Syariah, Bank Mandiri dan BCA untuk melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran asuransi Jasa Raharja, dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik. Inovasi e-Samsat telah membantu peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp 500 juta per hari. Pemerintah provinsi juga menargetkan agar peningkatan transaksi e-Samsat menjadi satu miliar rupiah per hari pada tahun 2019. *Key success* implementasi e-samsat ini yakni koordinasi intensif antar *stakeholders* terutama dengan Polda serta perbankan. Kerjasama dimaksud dikukuhkan dengan MoU serta dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi elektronifikasi Pemda di Kalimantan Timur. Pertama, ketentuan Permendagri yang mengharuskan seluruh penerimaan Pemda harus masuk pada rekening KASDA pada hari yang sama, sehingga bank

di luar PT BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kurang insentif dalam pengembangan sistem non tunai dengan Pemda. Kedua, seluruh transaksi pengeluaran dan penerimaan Pemda sesuai Perda jumlahnya harus sesuai tagihan, sementara apabila menggunakan transaksi non tunai terdapat biaya transfer yang harus ditanggung oleh Pemda. Ketiga, kendala dalam regulasi daerah yang mewajibkan tanda terima harus mendapat tandatangan basah sehingga bukti pembayaran melalui mesin ATM/EDC tidak diterima.

Namun masih terdapat tantangan dalam melakukan perluasan elektronifikasi tersebut.

Selanjutnya, meskipun telah dilakukan *training of trainers* (ToT) dari Bank Indonesia kepada ASN terkait elektronifikasi transaksi kepada perwakilan SKPD terkait, peserta kegiatan dimaksud belum memberikan edukasi/sosialisasi kepada pegawai di satuan kerjanya karena keterbatasan kompetensi SDM dan anggaran. Selain itu, rotasi pegawai Pemda tanpa diikuti *transfer knowledge* yang memadai kepada pengganti menyebabkan program elektronifikasi terhambat. Lebih lanjut lagi, secara infrastruktur masih terdapat keterbatasan dukungan sistem informasi Pemda untuk diintegrasikan dengan perbankan dan masih banyak terdapat daerah *blank spot* dan belum mendapat jaringan PLN sebagai hal yang sangat krusial dalam implementasi elektronifikasi transaksi Pemda. Di sisi ritel, elektronifikasi transaksi pembayaran secara non tunai semakin banyak tersedia antara lain di pusat perbelanjaan, lokasi wisata, maupun lokasi parkir. Selain itu, untuk mendukung peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI No. 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PT Jasamarga Balikpapan Samarinda (JBS) serta perbankan untuk mempersiapkan ekosistem transaksi non tunai pada jalan tol Balikpapan-Samarinda.

VI. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Kaltim mengalami perbaikan yang tercermin dari naiknya beberapa indikator ketenagakerjaan. Namun demikian, tingkat kesejahteraan Kaltim yang tercermin dari perkembangan nilai tukar petani lebih baik.

6.1 Gambaran Umum

Kondisi ketenagakerjaan Kaltim mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan kondisi ketenagakerjaan Kaltim tercermin dari naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kaltim pada tahun 2019. Peningkatan TPAK Kaltim tahun 2019 didorong oleh naiknya jumlah penduduk yang bekerja. Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018. Kondisi serupa juga terjadi pada kondisi kesejahteraan Kaltim yang terus mengalami perbaikan pada tahun 2019. Lebih lanjut, Nilai Tukar Petani (NTP) juga menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan III 2019. Peningkatan NTP didorong oleh didorong oleh naiknya NTP pada subsektor hortikultura, peternakan dan perikanan.

6.2 Ketenagakerjaan

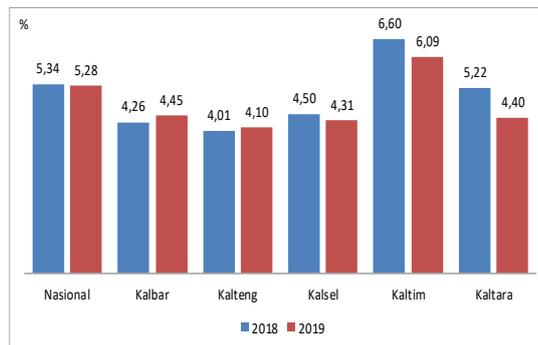
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim, kondisi ketenagakerjaan Kaltim tahun 2019 membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah angkatan kerja Kaltim tercatat 1,82 juta jiwa atau meningkat 4,78% (yoy) dibandingkan tahun 2018 sebesar 1,73 juta jiwa. Peningkatan jumlah angkatan kerja Kaltim tahun 2019 didorong oleh jumlah penduduk yang bekerja yang naik dari 1,70 juta jiwa pada tahun 2018 menjadi 1,62 juta jiwa atau tumbuh 5,35% (yoy). Dengan demikian, TPAK Kaltim tahun 2019 tercatat 66,44% atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 64,99% (Tabel VI.1).

Tabel VI.1 Angkatan Kerja dan Pengangguran Kaltim

Kondisi Ketenagakerjaan	2018	2019	Pertumbuhan	
			Orang	%
Jumlah Penduduk 15+	2.665.909	2.732.343	66.434	2,49
Jumlah Angkatan Kerja	1.732.598	1.815.382	82.784	4,78
Jumlah Bekerja	1.618.285	1.704.808	86.523	5,35
Jumlah Penganggur	114.313	110.574	(3.739)	-3,27
Bukan Angkatan Kerja	933.311	916.961	(16.350)	-1,75
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,99	66,44	↑	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,60	6,09	↓	

Sumber : BPS, diolah

Sejalan dengan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 tercatat 6,09%, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2018 yang tercatat 6,60%. Namun demikian, TPT Kaltim tahun 2019 masih relatif lebih tinggi dibandingkan capaian nasional dan beberapa provinsi di wilayah Kalimantan. TPT nasional tahun 2019 tercatat mengalami penurunan dari 5,34% menjadi 5,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran Kaltim masih relatif tinggi dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan. Di sisi lain, Kalteng merupakan provinsi yang memiliki TPT terendah di wilayah Kalimantan sebesar 4,10% pada tahun 2019 (Grafik VI.1).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.1 Perbandingan TPT Kalimantan Berdasarkan Provinsi

Berdasarkan tingkat pendidikan, tenaga kerja Kaltim tahun 2019 masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMTA. Jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat SMTA pada tahun 2019 mencapai 676,19 ribu jiwa atau mengalami kenaikan 8,62% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya dan memiliki pangsa mencapai 39,66% dari total penduduk yang bekerja. Penduduk yang bekerja dengan tingkat pendidikan SD menduduki urutan kedua dengan tenaga kerja sebanyak 467,23 ribu jiwa atau naik 2,08% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 457,71 ribu jiwa. Sementara itu, penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma keatas tercatat 314,15 ribu jiwa pada tahun 2019 atau mengalami kenaikan tertinggi dibandingkan tingkatan pendidikan yang lain yaitu sebesar 13,94% (yoy) dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 275,71 ribu jiwa (Tabel VI.2).

Tabel VI.2 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan	2018	2019	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
<SD	457.711	467.231	9.520	2,08	27,41
SMTP	262.358	277.240	14.882	5,67	16,26
SMTA	622.507	676.189	53.682	8,62	39,66
Diploma keatas	275.709	314.148	38.439	13,94	18,43
Total	1.618.285	1.704.808	86.523	5,35	100,00

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan lapangan usahanya, tenaga kerja Kaltim masih didominasi oleh sektor perdagangan pada tahun 2019. Tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel tahun 2019 tercatat sebanyak 474,11 ribu jiwa, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 434,87 ribu jiwa atau meningkat 9,03% (yoy). Berdasarkan pangsa, status usaha tenaga kerja Kaltim tahun 2019 paling banyak bekerja pada lapangan usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel dengan pangsa sebesar 27,81%, disusul oleh tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha jasa kemasyarakatan sebesar 18,84% dan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 18,76% (Tabel VI.4).

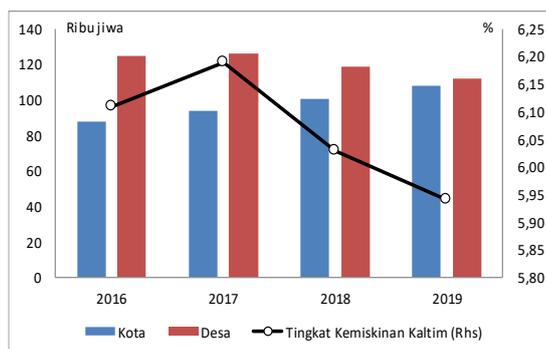
Tabel VI.3 Penduduk Yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Usaha Kaltim

Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	2018	2019	Pertumbuhan		Pangsa
			Orang	%	%
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	347.901	319.764	(28.137)	-8,09	18,76
Pertambangan dan penggalian	144.717	145.794	1.077	0,74	8,55
Industri Pengolahan	115.908	130.507	14.599	12,60	7,66
Listrik, gas dan air	15.107	23.871	8.764	58,01	1,40
Bangunan	84.908	101.671	16.763	19,74	5,96
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	434.865	474.115	39.250	9,03	27,81
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	88.195	104.710	16.515	18,73	6,14
Keuangan, asuransi, sewa dan jasa perusahaan	68.728	83.210	14.482	21,07	4,88
Jasa kemasyarakatan	317.956	321.166	3.210	1,01	18,84
Total	1.618.285	1.704.808	86.523	5,35	100,00

Sumber : BPS, diolah

6.3 Kesejahteraan

Kesejahteraan Kaltim relatif masih terkendali walaupun jumlah penduduk miskin di Kaltim tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan Kaltim pada tahun 2019 secara umum mengalami penurunan sebesar 5,94% setelah pada periode sebelumnya sebesar 6,03%. Namun di sisi lain, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,47% (yoy) atau mencapai 219,92 ribu jiwa dimana hal tersebut bersumber dari peningkatan penduduk miskin di wilayah perkotaan. Tercatat Wilayah perkotaan mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin yang cukup signifikan, dari 100,45 ribu jiwa pada tahun 2018 menjadi 107,67 ribu jiwa atau naik sebesar 7,19% (yoy). Di sisi lain, jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan mengalami penurunan dari 118,44 ribu jiwa di tahun 2018 menjadi 112,25 ribu jiwa pada tahun 2019 atau turun -5,23% (yoy) (Grafik VI.2).



Sumber: BPS, diolah

Grafik VI.2 Jumlah Penduduk Miskin Kalimantan Timur

Garis kemiskinan Kaltim mengalami peningkatan dari Rp574.704/kapita/bulan menjadi Rp609.155/kapita/bulan pada tahun 2019. Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilo kalori/kapita/hari dan kebutuhan nonpangan esensial, seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya. Garis kemiskinan di sebuah wilayah menunjukkan standar biaya hidup di daerah tersebut. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan sebesar 6,59% (yoy) di wilayah perkotaan lebih besar dibandingkan dengan wilayah pedesaan yang meningkat sebesar 4,81% (yoy) (Tabel VI.5). Adapun peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan menjadi andil terbesar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan.

Tabel VI.4 Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur

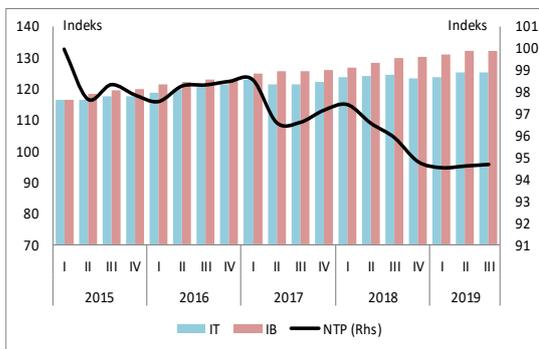
Kaltim	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				Pertumbuhan (%)	
	Rp/Kapita/Bulan				%	
	2016	2017	2018	2019	2018	2019
Kota	519.653	555.880	576.265	614.221	3,67	6,59
Desa	496.975	532.719	570.012	597.451	7,00	4,81
TOTAL	511.205	548.497	574.704	609.155	4,78	5,99

Sumber : BPS, diolah

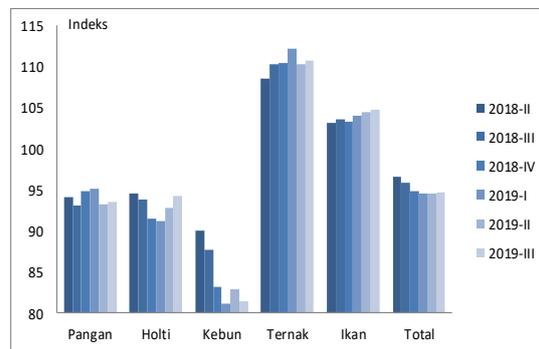
Kesejahteraan Kaltim dari sisi NTP mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nilai Tukar Petani merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. NTP Kaltim pada triwulan III 2019 sebesar 94,68 atau mengalami perbaikan dari pada triwulan sebelumnya yang tercatat 94,61 (Grafik VI.3). Kenaikan tersebut bersumber peningkatan pada NTP di subsektor pangan, hortikultura, dan perikanan. Lebih lanjut, berdasarkan komponen pembentuknya,

indeks yang diterima petani (IT) sebesar 125,18 masih lebih rendah dibandingkan indeks yang dibayarkan petani (IB) sebesar 132,22 (Gradik VI.3).

Berdasarkan jenisnya, hanya NTP sektor perkebunan yang mengalami penurunan. Peningkatan NTP Kaltim triwulan III 2019 terjadi hampir di seluruh sub-lapangan usaha pertanian kecuali sektor perkebunan (Grafik VI.4). Rendahnya NTP pada sektor perkebunan mengindikasikan masih rendahnya efisiensi sektor pertanian seiring dengan tren penurunan harga TBS level regional Kaltim maupun level Nasional. Tercatat harga pada triwulan III 2019, harga TBS Kaltim berada di angk Rp11.44,51/kg mengalami kontraksi sebesar -13,43% (yoy). Adapun tren kontraksi harga TBS telah berlangsung dari awal tahun 2018.



Sumber: BPS, diolah
Grafik VI.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim



Sumber: BPS, diolah
Grafik VI.4 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kaltim Berdasarkan Komponen

VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Perekonomian Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan akan mengalami perlambatan seiring dengan mulai diimplementasikannya restriksi impor di akhir 2019 serta perlambatan volume perdagangan global turut menekan permintaan batubara di tengah harga komoditas yang menurun. Adapun tingkat inflasi pada triwulan I 2020 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang bersumber dari kenaikan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara tahunan, pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap positif dengan tingkat inflasi yang masih terkendali.

7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan akan mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Kaltim pada triwulan I 2020 diperkirakan masih akan bersumber dari lapangan usaha pertambangan dan industri pengolahan. Namun pertumbuhan pada lapangan usaha pertambangan diperkirakan akan mengalami perlambatan yang bersumber dari potensi penurunan permintaan ekspor dari negara tujuan utama seperti Tiongkok dan India. Berdasarkan laporan HIS Markit, tercatat bahwa harga batubara domestik Tiongkok mengalami pelemahan seiring dengan stok yang melimpah pasca aksi *front loading* yang dilakukan selama tahun 2019. Selain itu terjadi peningkatan kontrol impor di beberapa pelabuhan RRC bagian selatan yang berpotensi akan terus meluas seiring dengan semua pelabuhan yang masih dalam pengawasan bea cukai Guangzhou dan Fuzhou menerapkan kebijakan baru setelah terpenuhinya kuota impor seperti pemberitahuan pelarangan impor batubara dan pelarangan kapal muat berlabuh. Selain dari sisi permintaan, pola siklikal produksi batubara triwulan awal diperkirakan tidak akan terlalu tinggi dikarenakan musim hujan yang masih berlangsung serta tren harga batubara yang diperkirakan akan terus mengalami penurunan. Di sisi lain, industri pengolahan diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan positif walaupun relatif stabil dibanding periode sebelumnya. Kondisi tersebut terutama bersumber dari permintaan CPO yang diperkirakan akan tetap pada level yang sama di tengah penurunan kinerja industri LNG. Namun penurunan lebih lanjut masih tertahan oleh membaiknya kinerja sektor konstruksi seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan serta proyek-proyek swasta lainnya. Lebih lanjut, proyek-proyek swasta tersebut pada umumnya berorientasi kepada pembangunan infrastruktur industri pengolahan yang diharapkan mampu mendorong kinerja industri pengolahan di tahun 2020 di tengah kinerja pertambangan yang diperkirakan akan mengalami perlambatan.

Pertumbuhan Ekonomi Kaltim tahun 2020 diperkirakan akan tetap tumbuh positif walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya. Perekonomian Kaltim pada tahun 2020 masih bersumber dari lapangan usaha pertambangan, namun dengan tingkat pertumbuhan yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut bersumber dari tren komoditas harga batubara yang terus mengalami penurunan ditengah permintaan negara tujuan yang masih berada dalam ketidakpastian. Rencana restriksi impor Tiongkok yang mulai diimplementasikan ditengah melimpahnya stok batubara Tiongkok serta perlambatan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan menjadi sumber utama melambatnya kinerja pertambangan. Selain itu tertahannya kinerja pertambangan batubara juga berasal dari mulai ditertibkannya lahan tambang di sekitar kawasan pembangunan IKN yang akan menyebabkan perlambatan produksi batubara Kaltim. Namun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kaltim tahun 2020 juga terus didorong dari lapangan usaha industri pengolahan dan konstruksi. Peningkatan lapangan usaha industri pengolahan bersumber dari mulai membaiknya harga komoditas CPO di akhir tahun 2019 seiring dengan bertambahnya pabrik pengolahan CPO Kaltim yang memungkinkan menambah produksi CPO di Kaltim ditengah pasokan TBS yang masih melimpah. Selain itu prakiraan membaiknya kinerja lapangan usaha industri pengolahan juga bersumber dari adanya rencana penghapusan tarif impor CPO ditengah *supply* CPO domestik yang menurun dikarenakan dampak El-Nino. Selain itu, dari sisi konstruksi juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang bersumber dari berlanjutnya pembangunan proyek strategis serta mulai dipersiapkannya rancangan awal pembangunan IKN yang diperkiraan akan mulai dilakukan di akhir tahun 2020. Namun demikian, pembangunan aspek konektivitas maupun prasarana umum di sekitar IKN mulai dilakukan. Tercatat akan dilakukan pemantapan kualitas jalan di sekitar Penajam Paser Utara (PPU) maupun di daerah Kutai Kartanegara. Selain itu pada tahun 2020 diperkirakan akan dilakukan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memenuhi kebutuhan air bersih IKN di PPU. Adapun pembiayaan pembangunan proyek tersebut akan menggunakan APBN dengan total Rp700 miliar.

Risiko ke bawah ekonomi Kaltim pada 2020 terutama bersumber dari gejolak eksternal. Harga batubara berisiko kembali mengalami penurunan sehingga berdampak pada nilai ekspor yang lebih rendah pada tahun 2020. Berlanjutnya tensi dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat juga berpotensi menimbulkan perlambatan ekonomi global yang secara langsung akan berdampak kepada penurunan ekspor komoditas lainnya. IMF dalam *World Economic Outlook* edisi Oktober 2019 merevisi ke bawah proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2020 dari sebelumnya 3,5% (yoy) menjadi 3,1% (yoy) (Tabel VII.1). Koreksi pertumbuhan

ekonomi 2020 juga terjadi di Eropa, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi Eropa juga direvisi ke bawah dari semula 1,6% (yoy) menjadi 1,0% (yoy). Hal tersebut utamanya disebabkan oleh kinerja ekspor yang mengalami perlambatan serta melemahnya lapangan usaha konstruksi dan investasi di tengah stimulus fiskal yang terbatas. Selain itu, perlambatan juga bersumber dari penurunan kinerja sektor otomotif ditengah ketidakpastian isu *brexit* dan ancaman resesi di Italia.

Tabel VII.1 *Outlook Ekonomi Dunia dan Negara Mitra Dagang Utama Kaltim*⁶

Negara	Realisasi*						World Economic Outlook				Consensus Forecast			
							Jul-19		Oct-19		Jul-19		Oct-19	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	
World	3,6	3,4	3,2	3,8	3,6	3,2	3,5	3,0	3,1	2,7	2,7	2,5	2,5	
Euro	1,3	2,1	1,8	2,3	1,8	1,3	1,6	1,0	1,0	1,1	1,2	1,1	0,9	
Jepang	0,4	1,4	0,9	1,7	0,8	0,9	0,4	0,6	0,5	0,7	0,3	1,0	0,2	
Tiongkok	7,3	6,9	6,7	6,9	6,6	6,2	6,0	6,2	6,0	6,2	6,0	6,1	5,8	
India	7,4	8,2	7,1	6,7	7,1	7,0	7,2	5,9	6,6	6,9	7,1	5,8	6,7	
ASEAN-5	4,6	4,8	5,0	5,3	5,2	5,0	5,1	4,8	4,9	4,5	4,5	4,2	4,4	

Sumber : IMF dan Consensus Forecast, diolah

Dari sisi harga, indeks Harga Ekspor (IHEx) Kaltim tahun 2020 diperkirakan akan tetap mengalami penurunan. Berdasarkan proyeksi harga yang diperoleh dari Worldbank dalam *Commodity Markets Outlook* bulan Oktober 2019, IHEx Kaltim pada tahun 2020 diperkirakan akan tetap mengalami penurunan walau tidak sedalam tahun 2019 yakni sebesar -8,5% (yoy). Tren penurunan IHEx yang berlanjut tersebut, bersumber dari kontraksinya harga batubara setelah pada beberapa tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan harga yang positif. Selain itu, penurunan juga terjadi pada komoditas CPO yang terus mengalami tren penurunan, di mana hal tersebut bersumber dari *oversupply* komoditas CPO di pasar global seiring dengan kampanye negatif terhadap penggunaan CPO yang terus dilakukan di Eropa. Berdasarkan asesmen terhadap indikator makroekonomi terkini serta memperkirakan risiko yang bersumber dari internal dan eksternal, ekonomi Kaltim tahun 2020 diperkirakan akan tumbuh pada rentang 2,87% (yoy) – 3,07% (yoy).

Tabel VII.2 *Outlook Harga Komoditas Ekspor Utama Kaltim*

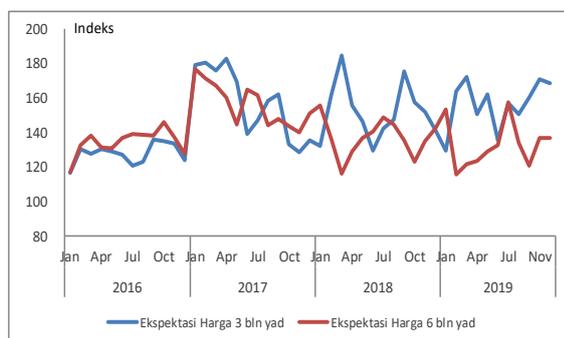
Komoditas	Realisasi*						World Bank			
							Apr-19		Oct-19	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2019	2020	
Coal	-17,1	-16,0	12,2	33,9	20,9	-13,9	-4,3	-27,6	-11,6	
LNG	0,5	-31,8	-32,6	16,7	24,0	-35,9	1,4	-1,7	-8,1	
Crude Oil	-7,5	-47,3	-15,6	23,3	29,4	-5,8	-1,5	-13,9	-4,9	
CPO	-3,8	-20,8	10,9	2,1	-14,9	-16,3	3,8	-11,7	-1,7	
Wood	-7,7	-12,8	11,5	-3,3	1,6	-5,4	1,5	0,0	-0,3	
IHEx	-8,0	-27,6	-10,1	27,6	20,7	-17,5	-3,0	-22,8	-8,5	

Sumber : Worldbank, diolah

⁶IMF menggunakan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam untuk mewakili ASEAN. Sementara itu, Consensus Forecast menggunakan Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam

7.2 Prospek Inflasi

Inflasi Kaltim pada triwulan I 2010 diperkirakan akan tetap terkendali namun lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan tingkat inflasi Kaltim pada triwulan I 2020 bersumber dari kenaikan tarif BPJS per 1 Januari 2020 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dimana kenaikan tersebut umumnya berlaku bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja. Selain tarif BPJS, pemerintah juga telah mengesahkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang akan berlaku 1 Januari 2020 mendatang. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dimana dalam PMK tersebut, rata-rata kenaikan tarif CHT tahun 2020 sebesar 21,55%. Kenaikan tingkat harga tersebut juga terkonfirmasi dari hasil survei konsumen dimana diperkirakan akan terjadi kenaikan harga pada 3 dan 6 bulan kedepan dengan indeks optimisme yang cukup tinggi masing-masing sebesar 168,00 dan 137,00 dimana ambang batas normal indeks berada di level 100 (Grafik VII.1).



Grafik VII.1 Ekspektasi Harga 3 & 6 Bulan Kedepan

Secara keseluruhan, inflasi Kaltim pada tahun 2020 juga diperkirakan akan terkendali meskipun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Peningkatan inflasi Kaltim pada tahun 2020 diperkirakan bersumber dari rencana kebijakan kenaikan beberapa acuan tarif seperti tarif BPJS, tarif dasar listrik, serta kenaikan cukai rokok. Selain itu, Kaltim sendiri mulai memasukkan komponen tarif angkutan udara Bandara APT Pranoto sebagai sumber penyumbang inflasi baru di Kaltim di tengah kenaikan volume jumlah penumpang pada bandara tersebut. Selain itu, peningkatan tekanan inflasi juga diperkirakan akan berasal baik dari kelompok bahan makanan maupun sandang yang bersumber dari mulai direalisasikannya program pembangunan kawasan

IKN yang secara langsung akan meningkatkan kebutuhan pasokan pangan di Kaltim. Namun demikian, beberapa langkah telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kaltim salah satunya adalah melakukan peninjauan perdagangan antar daerah dengan daerah sentra produksi utamanya untuk komoditas hortikultura. Stabilitas inflasi Kaltim yang terjaga juga diperkirakan akan didukung oleh terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat pasca tercapainya target inflasi dalam beberapa tahun terakhir serta upaya pengendalian inflasi daerah yang secara intensif terus dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui TPID. Berdasarkan asesmen tersebut, inflasi Kaltim tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,40%-3,80% (yoy), masih berada di dalam target inflasi nasional sebesar $3,00 \pm 1\%$ (yoy).

DAFTAR ISTILAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Clean Money Policy

Kebijakan Bank Indonesia untuk menarik uang tidak layak edar dan memusnahkannya serta menyediakan uang layak edar bagi masyarakat.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada Pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana yang dihimpun perbankan dari masyarakat, yang berupa giro, tabungan atau deposito.

Ekspor-Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi.

Indeks Harga Konsumen (IHK)

Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.

Inflasi

Kenaikan harga barang secara umum dan terus menerus (*persistent*).

Liaison

Kegiatan pengumpulan data/statistik dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif yang dilakukan secara periodik melalui wawancara langsung kepada pelaku ekonomi mengenai perkembangan dan arah kegiatan ekonomi dengan cara yang sistematis dan didokumentasikan dalam bentuk laporan.

Month to Month (mtm)

Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.

Non-Performing Loan (NPL)

Kredit/pembiayaan yang bermasalah atau nonlancar yang terdiri dari kredit dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Perubahan nilai PDRB atas harga konstan dalam suatu periode tertentu (triwulanan atau tahunan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Merupakan indeks gabungan dari berbagai indikator bertujuan untuk mengukur tingkat produksi, mendeteksi tekanan inflasi dan aktivitas perindustrian.

Year on Year (yoy)

Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.